

A/SEP
1998
0103

**FUNGSI KOTA KECAMATAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN**

(Studi Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat)

Oleh :

ARNELLA

A. 30 1585



JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1998

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya (nya).

(An Nahl: 12)

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

(Al Ankabuut: 64)

Ku persembahkan karya kecil ini untuk
Papa, Mama dan orang-orang yang Aku sayangi.....

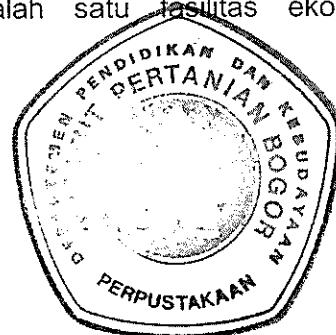
RINGKASAN

ARNELLA. Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan : Studi Kasus Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. (Di bawah bimbingan **T. HANAFIAH** dan **UMAR A.S. TUANAYA**)

Pengembangan kota kecamatan melalui sistem Unit Daerah, Kerja Pembangunan (UDKP) dirancang agar pelaksanaan pembangunan di pedesaan benar-benar sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Wilayah kecamatan dijadikan unit terkecil dalam pembangunan pedesaan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan UDKP yang menetapkan wilayah kecamatan sebagai satu unit manajemen pembangunan terpadu. Pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan kecil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah belakang melalui mekanisme *spread effects* dan aglomerasi kegiatan-kegiatan ekonomi.

Kota kecamatan memegang peranan yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan kota kecamatan diharapkan mampu menggali potensi wilayah lokal dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi baru, menumbuhkan kegiatan agroindustri dan perdagangan di wilayah kecamatan.

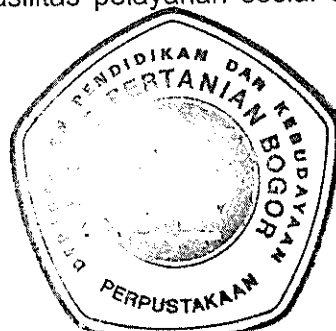
Penelitian ini menelaah fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan. Tujuan penelitian adalah : (1). Menganalisis masalah ketimpangan yang terjadi antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2). Menelaah fungsi kota kecamatan sebagai pusat pelayanan (3). Menelaah sistem dan peranan pasar sebagai salah satu fasilitas ekonomi dalam pembangunan wilayah pedesaan.



Penelitian dilakukan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat dengan mengambil tiga kecamatan contoh yang mewakili kecamatan maju, kecamatan berkembang dan kecamatan kurang berkembang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian antara lain analisis skalogram untuk mengetahui hirarkhi pusat-pusat pengembangan, analisis limpitan sejajar dengan dukungan hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi untuk menentukan kecamatan contoh dan menunjukkan adanya ketimpangan, analisis tabulasi dan deskriptif yang dilengkapi uji statistik korelasi Spearman.

Pemilihan kecamatan contoh dilakukan berdasarkan analisis skalogram, hirarkhi potensi sumberdaya wilayah, hirarkhi fasilitas sosial ekonomi dan analisis limpitan sejajar, maka dihasilkan Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Sukaraja masing-masing mewakili kecamatan maju, kecamatan berkembang dan kecamatan kurang berkembang.

Berdasarkan hasil analisis masih terdapat ketimpangan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Kecamatan-kecamatan yang terletak di sebelah utara Tasikmalaya cenderung mempunyai tingkat ketersediaan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di selatan Tasikmalaya. Terdapat pula perbedaan dalam hal potensi sumberdaya fisik wilayah. Kecamatan yang berada di wilayah utara Tasikmalaya mempunyai sumberdaya yang lebih baik dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah selatan. Dengan dukungan uji statistik menggunakan korelasi Rank Spearman, terbukti bahwa kondisi geografis dan potensi sumberdaya berpengaruh pada ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi suatu wilayah.



Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya yang baik akan memiliki fasilitas pelayanan yang lebih banyak dan lengkap.

Fungsi kota kecamatan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dapat dilihat melalui analisis skalogram dimana desa yang menjadi kota kecamatan memiliki jumlah fasilitas pelayanan paling banyak dan lebih lengkap dibandingkan desa-desa lainnya.

Fungsi kota kecamatan sebagai pusat kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui kegiatan pasarnya. Pasar merupakan fasilitas ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan wilayah. Dilihat dari waktu berlangsungnya terdapat dua jenis pasar yaitu pasar tetap dan pasar periodik. Pasar Indihiang dan pasar Cineam merupakan pasar tetap yang kegiatannya berlangsung setiap hari sedangkan pasar Sukaraja merupakan pasar periodik yang kegiatannya berlangsung dua kali dalam seminggu. Besarnya aktifitas pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah layanannya. Kecamatan Indihiang yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan luas wilayah layanannya yang tidak hanya melayani penduduk di kecamatannya sendiri tetapi juga penduduk kecamatan lain mempunyai aktifitas pasar yang paling tinggi dibandingkan kecamatan Cineam dan Sukaraja yang hanya melayani penduduk di kecamatan masing-masing.

Pasar-pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari dan dapat dijadikan lapangan berusaha bagi penduduk setempat. Namun peranan pasar sebagai sarana petani untuk memasarkan produknya masih rendah karena fungsi pasar tersebut masih menjadi pembeli produk dari luar dibandingkan menjual produk lokal yang dihasilkan.

**FUNGSI KOTA KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN
(Studi Kasus Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat)**

oleh

ARNELLA

A 30 1585

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pertanian

pada

Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1998



JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Arnella

No Pokok : A 30 1585

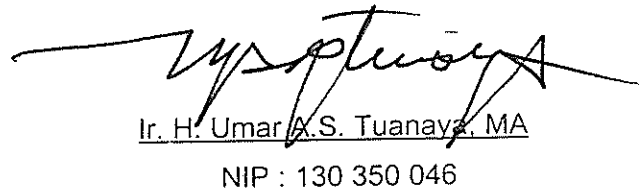
Judul : Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan
(Studi Kasus Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat)

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Dosen Pembimbing I


Ir. H. T. Hanafiah
NIP : 130 321 039

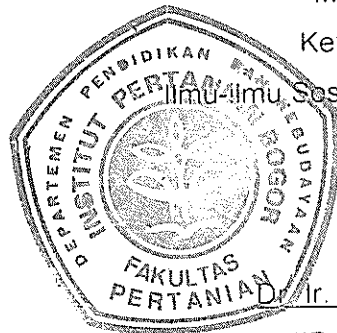
Dosen Pembimbing II



Ir. H. Umar A.S. Tuanaya, MA
NIP : 130 350 046

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian




Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS

NIP : 131 124 021

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 1998

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR MERUPAKAN KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI DAN ATAU LEMBAGA MANAPUN.

BOGOR, JANUARI 1998


ARNELLA
A 30 1585

RIWAYAT HIDUP

ARNELLA. Dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1975 di Bogor. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ir. H. Asman Aboet dan ibu Hj. Asni Farida.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kartika Bhakti, Jakarta pada tahun 1981, Sekolah Dasar Negeri 1 Pekayon, Jakarta pada tahun 1987, Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Jakarta pada tahun 1990 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bogor pada tahun 1993.

Pada tahun 1993, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI), kemudian pada tahun 1994 diterima di Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat)**.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H. T. Hanafiah dan Bapak Ir. H. Umar A.S. Tuanaya, MA sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Parulian Hutagaol, MS dan Ibu Ir. Harmini, MSi yang telah bersedia menjadi dosen penguji pada saat ujian sidang.
3. Ibu Febriantina Dewi, S.E, MM yang telah bersedia menjadi dosen moderator pada saat seminar.
4. Yang tersayang Papa, Mama, Aal dan Anna yang selalu memberi semangat, perhatian, kasih sayang, dukungan serta doa bagi keberhasilan penulis.
5. Uda Choiruddin atas segala bantuan, pengertian, doa serta dukungannya yang diberikan kepada penulis.
6. Arry Herlina dan Ervinia atas segala bantuan, saran, dukungan dan kebersamaannya dalam suka dan duka selama ini.
7. Erna, Helen dan Wahyu yang telah banyak membantu dan kerjasama yang baik, khususnya selama penelitian di Tasikmalaya.
8. Para pegawai di Kantor Statistik dan Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya atas segala bantuan yang telah diberikan.

9. Bapak-bapak di Dinas Pasar dan Informasi Harga dan Dinas Pasar Kecamatan Indihiang, Cineam dan Sukaraja atas bantuannya kepada penulis
10. Adang, Heny, Sahara, Dedy Ratmono, Novandri, Hilmiyati, Tian, Arel, Nia dan EPS '30 untuk bantuan yang telah diberikan dan kehadirannya saat seminar.
11. Mbak Yanti dan Ira untuk bantuannya, dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian maupun penulisan skripsi.

Menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini, maka saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di kemudian hari sangatlah penulis harapkan. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Amin.

Bogor, Januari 1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar Perwilayahan	7
2.1.1. Teori Lokasi	8
2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan	13
2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil	15
2.3. Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Kota Kecamatan	18
2.4. Sistem Pasar dalam Pembangunan Wilayah	23
III. KERANGKA PEMIKIRAN	
3.1. Kerangka Pemikiran	36
3.2. Hipotesis	40
IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Daerah dan Waktu Penelitian	43
4.2. Batasan Penelitian	44
4.3. Metode Analisis	44
4.3.1. Skalogram	44
4.3.2. Sistem Limpitan Sejajar	45

4.3.3. Analisis Sistem Pasar	46
4.4. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel	47
4.5. Definisi Operasional	49
V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
5.1. Kondisi Geografis	50
5.2. Kondisi Demografis	51
5.3. Struktur Perekonomian Wilayah	54
5.3.1. Sektor Primer	57
5.3.2. Sektor Sekunder	57
5.3.3. Sektor Tersier	59
5.4. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Tasikmalaya	60
5.4.1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua	60
5.4.2. Kebijakan Tata Ruang Daerah	61
VI. POTENSI SUMBERDAYA DAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA	
6.1. Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah	64
6.1.1. Wilayah Kaya	66
6.1.2. Wilayah Sedang	69
6.1.3. Wilayah Miskin	70
6.2. Hirarkhi Fasilitas Sosial Ekonomi	73
6.3. Hubungan Sumberdaya Wilayah dan Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi	75
6.4. Gambaran Umum Kecamatan Contoh	79
6.4.1. Kecamatan Indihiang	79
6.4.2. Kecamatan Cineam	82
6.4.3. Kecamatan Sukaraja	84
VII. FUNGSI KOTA KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN	
7.1. Struktur Tata Ruang Kecamatan Indihiang	88
7.2. Struktur Tata Ruang Kecamatan Cineam	90
7.3. Struktur Tata Ruang Kecamatan Sukaraja	92



7.3. Struktur Tata Ruang Kecamatan Sukaraja	92
VIII. SISTEM PASAR DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH	
8.1. Sistem Pasar di Kecamatan Indihiang	98
8.2. Sistem Pasar di Kecamatan Cineam	100
8.3. Sistem Pasar di Kecamatan Sukaraja	102
8.4. Aktifitas Pasar dan Karakteristik Perdagangan.....	104
IX. PEMBAHASAN	108
X. KESIMPULAN DAN SARAN	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1996.....	53
2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993, Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1993 - 1995, Menurut Sektor (Juta Rupiah)	55
3.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1993 -1995, Menurut Sektor.....	58
4.	Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Tahun 1997.....	72
5.	Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Tahun 1997.....	74
6.	Perhitungan Korelasi Jenjang Spearman.....	76
7.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Indihiang, Tahun 1996.....	80
8.	Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Indihiang Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan1993 (Juta rupiah).....	81
9.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Cineam, Tahun 1996.....	82
10.	Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Cineam Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan1993 (Juta rupiah).....	83
11.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sukaraja, Tahun 1996.....	85
12.	Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Sukaraja Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan1993 (Juta rupiah).....	86
13.	Analisis Skalogram Kecamatan Indihiang (Keadaan Tahun 1996).....	89
14.	Analisis Skalogram Kecamatan Cineam (Keadaan Tahun 1996).....	91
15.	Analisis Skalogram Kecamatan Sukaraja (Keadaan Tahun 1996).....	93

16. Nama, Status dan Hari Pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Tahun 1996	97
17. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Indihiang, Tahun 1997.....	99
18. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Cineam, Tahun 1997.....	101
19. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Sukaraja, Tahun 1997.....	103
20. Perbandingan Aktifitas Pasar di Kecamatan Contoh, Tahun 1997.....	104

Lampiran

1. Jarak Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya.....	119
2. Analisis Skalogram Kabupaten Dati II Tasikmalaya (Keadaan Tahun 1995).....	120
3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1994 - 1995 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Persen).....	121
4. Analisis Limpitan Sejajar Kab. Dati II Tasikmalaya, 1997.....	122
5. Langkah-langkah Metode Analisis Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah ...	123
6. Langkah-langkah Metode Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi	124

DAFTAR GAMBAR

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Perkembangan Hirarkhi Tempat Sentral	28
2.	Komponen Utama Sistem Pasar Dendritik	30
3.	Perkembangan Sistem Pasar Model Skinner	31
4.	Sistem Pasar Model Solar	32
5.	Batas Ambang dan Jangkauan Pasar serta Pergerakan Pedagang Penjual dalam Pasar Periodik	35

Lampiran

5.	Peta Kabupaten Dati II Tasikmalaya berdasarkan Batas Administrasi.....	125
6.	Peta Kabupaten Dati II Tasikmalaya berdasarkan Perwilayahan Pembangunan.....	126
7.	Peta Kecamatan Indihiang.....	127
8.	Peta Kecamatan Cineam.....	128
9.	Peta Kecamatan Sukaraja.....	129



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Kota dan desa saling terkait membentuk suatu sistem. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya.

Pada pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendayagunakan potensi daerah secara optimal. Guna mewujudkan apa yang diarahkan pada PJP II itulah maka perencanaan pembangunan daerah berperan penting. Perencanaan pembangunan daerah sendiri pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai perencanaan alokasi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya di dalam dan antara daerah-daerah kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional (Kusumadewa, *et al* (1977) dalam Setiawan, 1994). Dengan perkataan lain maksud dari perencanaan pembangunan untuk lebih memberikan hasil guna dan daya guna yang lebih baik, disamping mengurangi dampak negatif pembangunan. Dengan demikian disefisiensi pemanfaatan sumberdaya dan ruang, kerusakan lingkungan

dan tidak adanya pemerataan serta keterkaitan antar sektor perekonomian dan ruang dapat dicegah. Kebijakan dan sistem yang dipakai juga harus memperhatikan kondisi dan potensi suatu daerah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekayaan alam dan potensi fisik tidak menyebar secara merata di seluruh wilayah. Terdapat wilayah yang kaya dan terdapat pula wilayah yang miskin akan sumberdaya alam. Ke wilayah kaya akan mengalir secara alami sumberdaya dan faktor produksi lainnya, terutama tenaga kerja dan modal. Pengaliran tersebut terjadi karena wilayah kaya merupakan wilayah yang menguntungkan dan layak secara ekonomi bagi lokasi investasi pembangunan.

Di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar daerah yang tidak berkembang berada di daerah pedesaan dengan ciri perekonomian pertanian. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah ini. Pembangunan sektor pertanian menyangkut berbagai sektor yang lain, seperti perdagangan, industri dan jasa. Pembangunan pertanian memerlukan penyediaan pupuk, pestisida, benih dan alat-alat pertanian sebagai masukan dalam proses produksi, dan memerlukan kegiatan pasca panen yang berupa pemasaran hasil-hasil pertanian. Penyediaan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial sangat menentukan dalam pembangunan pertanian dan wilayah pedesaan. Efektifitas fungsi fasilitas sosial ekonomi ini menurut Van Dusseldorp (1971) dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan serta penyebaran secara geografis. Fasilitas pelayanan ini akan berfungsi secara optimal apabila terdapat jumlah penduduk tertentu yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jumlah penduduk minimum yang diperlukan untuk mendukung keberadaan suatu fasilitas (*threshold*) disebut ambang batas. Setiap jenis fasilitas sosial ekonomi mempunyai angka ambang batas yang berbeda.

Berkaitan dengan hal di atas, maka persoalan ketimpangan di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, adalah rendahnya nilai tukar sektor pertanian bila dibandingkan dengan sektor lain dan terpusatnya wilayah-wilayah kurang berkembang di pedesaan. Kedua hal ini menyebabkan semakin perlunya perhatian terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah pedesaan.

Pembangunan wilayah pedesaan berkaitan erat dengan pembangunan pertanian, mengingat di Indonesia sektor pertanian sebagian besar terletak di wilayah pedesaan. Pembangunan wilayah pedesaan mungkin terjadi kalau ada pembangunan pertanian, sebaliknya pembangunan pertanian hanya mungkin terjadi dalam wilayah pedesaan yang berkembang.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan wilayah pedesaan di Indonesia, diterapkan suatu sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Sistem ini adalah suatu manajemen pembangunan daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang menyeluruh pada tingkat kecamatan dengan pola perencanaan dari bawah. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kota-kota kecamatan sebagai pusat pembangunan terkecil di pedesaan dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kota kecamatan sebagai pusat (*centre*) menurut Van Dusseldorp (1971) memiliki tiga fungsi yaitu : (1) fungsi pelayanan dengan menyediakan fasilitas kebutuhan dasar bagi masyarakat wilayah belakangnya dan mayoritas fasilitas pelayanan yang penting terkonsentrasi di dalamnya, (2) fungsi pemukiman, sebagai konsentrasi pemukiman penduduk khususnya penduduk yang bekerja di tempat-tempat pelayanan, karena terdapat kecenderungan penduduk untuk memilih tempat

bermukim yang optimum dari pusat, (3) fungsi ekonomi, yaitu sebagai pusat aktivitas ekonomi meliputi pemasaran hasil pertanian, aktivitas industri pengolahan terutama industri skala kecil. Kota kecamatan juga berfungsi menghubungkan dan menghantarkan perkembangan kota yang lebih besar dan lebih tinggi hirarkhinya ke daerah-daerah sekitarnya.

Peranan kota kecamatan tergantung pada letak dan posisinya terhadap desa-desa sekitarnya. Pada taraf pertama, kota kecamatan mendorong perkembangan desa atau desa-desa melalui permintaan akan pangan dan penawaran akan fasilitas yang dimilikinya. Arus yang terjadi lebih banyak pada gerak sentripetal dimana penduduk desa pergi ke kota untuk melakukan transaksi. Pada tahap selanjutnya kota kecamatan akan mendorong perkembangan desa-desa sekitarnya yaitu dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, misalnya pengolahan hasil pertanian, yang akan meningkatkan pendapatan desa sekitarnya. Gerak balik ini bersifat sentrifugal dan merupakan perembesan ke wilayah pinggiran.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Tasikmalaya dalam memacu pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya meliputi : Pertama, masalah kependudukan. Permasalahan kependudukan merupakan masalah yang serius karena distribusi penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk tidak merata, penduduk lebih terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi yang sebagian besar berada di Tasikmalaya bagian Utara.

Kedua, masalah pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Dati II Tasikmalaya lebih berkembang di bagian Tasikmalaya Utara. Kurang berkembangnya wilayah

Tasikmalaya Selatan dibandingkan Tasikmalaya Utara karena kondisi fisiknya yang berbukit-bukit sehingga lebih sukar untuk dimanfaatkan, lebih besarnya sebaran lahan kering yang relatif kurang subur dibandingkan lahan basah, adanya beberapa daerah yang termasuk daerah rawan bencana alam serta terdapatnya desa-desa terpencil yang karena kondisi topografinya sulit untuk mendapatkan prasarana perhubungan yang memadai sehingga dirasakan adanya kesenjangan pemerataan hasil-hasil pembangunan diantara kelompok masyarakat dan antar wilayah di Kabupaten Dati II Tasikmalaya.

Ketiga, masalah kelestarian sumberdaya alam. Eksploitasi sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem alamiah yang apabila tidak dimanfaatkan secara bijaksana akan merugikan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan juga aktifitas kehidupan di masa yang akan datang.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan kota kecamatan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya antara lain mengenai :

- a. Ketimpangan yang terjadi antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.
- b. Fungsi kota kecamatan sebagai pusat pelayanan.
- c. Sistem dan peranan pasar sebagai salah satu fasilitas ekonomi dalam pembangunan wilayah pedesaan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Menganalisis masalah ketimpangan yang terjadi antar kecamatan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

- b. Menelaah fungsi kota kecamatan sebagai pusat pelayanan.
- c. Menelaah sistem dan peranan pasar sebagai salah satu fasilitas ekonomi dalam pembangunan wilayah pedesaan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Tasikmalaya, sebagai masukan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang mempunyai arah yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Perwilayahan

Tata ruang yang mempunyai unsur-unsur jarak, lokasi, topografi dan luas menyusun suatu unit tata ruang yang unik yang disebut wilayah. Konsep wilayah, khususnya dalam menentukan batas-batas wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut (Hanafiah, 1988a):

- 1) **Konsep Homogenitas.** Menurut kriteria homogenitas, wilayah dapat diberi batas berdasarkan beberapa persamaan unsur tertentu, seperti unsur ekonomi wilayah, yaitu pendapatan perkapita, kelompok industri maju, tingkat pengangguran, keadilan sosial politik atau identitas wilayah berdasarkan sejarah, budaya dan sebagainya.
- 2) **Konsep Nodalitas.** Menurut konsep nodal yang ditekankan adalah struktur dan organisasi tataruang. Dalam hal ini batas suatu wilayah ditetapkan berdasarkan pengaruh suatu pusat (kota) terhadap wilayahnya. Hubungan antara pusat dan wilayah tersebut saling tergantung baik di bidang ekonomi maupun pelayanan sosial.
- 3) **Konsep Administrasi atau Unit Program.** Penentuan batas wilayah administrasi atau unit program adalah lebih mudah karena didasarkan atas perlakuan kebijaksanaan yang seragam, seperti sistem dan tingkat pajak yang sama dan lain sebagainya.

Klasifikasi wilayah juga dapat dibedakan atas :

- **Wilayah formal** adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Pada mulanya, klasifikasi wilayah formal didasarkan atas persamaan fisik, seperti topografi, iklim, atau vegetasi, kemudian

berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi, seperti adanya wilayah industri dan wilayah pertanian bahkan menggunakan kriteria sosial politik.

- **Wilayah fungsional** adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu. Kadang-kadang dimaksudkan juga sebagai wilayah nodal atau wilayah polarisasi dan terdiri atas unit-unit yang heterogen seperti kota besar, kota-kota kecil dan desa-desa yang secara fungsional saling tergantung.
- **Wilayah perencanaan** sebagai klasifikasi ketiga merupakan kombinasi wilayah formal dan wilayah fungsional. Untuk wilayah perencanaan, beberapa hal harus diperhatikan, antara lain suatu wilayah harus cukup luas untuk memenuhi kriteria investasi dalam skala ekonomi, harus mampu menunjang industri dengan pengadaan tenaga kerja, persamaan ekonomi, mempunyai paling tidak satu kota sebagai titik tumbuh dan strategi pembangunan yang sama untuk memecahkan masalah yang sama.

Perkembangan teori wilayah dalam rangka memahami struktur tata ruang wilayah telah lama dikembangkan. Para ahli perwilayahan seperti Weber (1909), Christaller (1933), Losch (1954), dan lain-lain mencoba memformulasikan konsep wilayah untuk keperluan penelaahan perwilayahan dan memberikan panduan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan wilayah, terutama menyangkut tata ruang dan hubungan antar wilayah.

2.1.1. Teori Lokasi

Penelaahan secara komprehensif tentang lokasi dilaksanakan pertama kali oleh Weber (1909) dalam Hanafiah (1989). Telaah yang dilakukan oleh Weber, dan

disempurnakan oleh Losch terutama menyangkut asumsi yang digunakan. Telaah Weber ini didasarkan pada asumsi :

- a. Unit telaah adalah suatu wilayah yang terisolasi, mempunyai iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.
- b. Beberapa sumberdaya alam seperti tanah liat, pasir dan air tersedia di mana-mana dalam jumlah yang memadai (*ubiquitous*).
- c. Bahan-bahan lainnya seperti bahan mineral, bahan tambang tersedia secara *sporadis* pada tempat-tempat yang terbatas.
- d. Tenaga kerja tidak tersedia secara luas, tetapi terbatas pada beberapa lokasi dengan mobilitas ada yang tetap.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi adalah :

- 1). **Biaya transportasi dan biaya tenaga kerja**, kedua faktor ini merupakan faktor-faktor umum yang fundamental dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi. Dalam model Weber, diasumsikan bahwa biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh dan berat yang diangkut. Di sisi lain tersedianya tenaga kerja dengan upah yang rendah di lokasi tertentu akan mempengaruhi keputusan lokasi industri. Lokasi industri akan bergeser ke lokasi tenaga kerja murah selama penghematan biaya karena lebih dekat dengan lokasi tenaga kerja lebih besar dari tambahan biaya transportasi.
- 2). **Kekuatan-kekuatan aglomerasi dan deglomerasi (*agglomerative and deglomerative force*)**, yaitu faktor-faktor lokal yang menentukan konsentrasi dan penyebaran berbagai kekuatan dalam tata ruang. Sampai tingkat tertentu kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu. Bila hal

ini berlangsung terus maka akan timbul kejenuhan ekonomi yang ditandai oleh *diseconomic of scale*, yaitu dengan naiknya harga tanah, transportasi dan energi sehingga kegiatan ekonomi akan mulai menyebar ke wilayah sekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan faktor tersebut, maka lokasi industri akan memilih lokasi dengan biaya yang minimum.

Salah satu kelemahan yang fundamental dari konsep Weber adalah hanya menekankan pada biaya input, dan kurang memperhatikan aspek permintaan. Pasar adalah suatu variabel dalam penentuan lokasi industri. Pembeli tersebar di daerah yang luas dengan intensitas permintaan yang berbeda-beda. Dengan demikian pasar merupakan faktor penentu lokasi yang sangat penting, bahkan mungkin lebih penting dari faktor biaya. Dengan demikian lokasi optimum adalah lokasi dimana diperoleh laba maksimum. Hal ini yang dikemukakan oleh Losch (1954) dalam Glasson (1990). Dalam konsep lokasinya, Losch mendasarkan pada asumsi :

- a. Tidak ada perbedaan-perbedaan spasial dalam distribusi input, bahkan bahan baku, tenaga kerja dan modal pada wilayah yang homogen.
- b. Kepadatan penduduk yang seragam dan selera yang konstan.
- c. Tidak ada interdependensi antara perusahaan-perusahaan.

Teori Losch ini sebenarnya merupakan sisi lain dari teori Weber, karena teori Losch terlalu menekankan pada aspek pasar dan kurang memperhatikan aspek bahan baku dan lokasi. Perkembangan dari teori ini lebih lanjut disempurnakan oleh Isaard (1956) dalam Hanafiah (1989) yang mengembangkan konsep aglomerasi sebagai berikut :

- 1). **Faktor skala usaha yang ekonomis;** yaitu suatu besaran skala usaha yang ekonomis dari suatu perusahaan tertentu, sebagai konsekuensi dari perluasan perusahaan di suatu lokasi.
- 2). **Faktor lokalisasi yang ekonomis;** yaitu lokasi yang ekonomis bagi sekelompok perusahaan industri yang sejenis, sebagai konsekuensi dari peningkatan produksi total pada suatu lokasi.
- 3). **Faktor urbanisasi yang ekonomis;** yaitu suatu lokasi yang ekonomis bagi semua perusahaan dari berbagai jenis industri, sebagai konsekuensi kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu tempat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, produksi dan tingkat kesejahteraan setempat.

Konsep Tempat Sentral yang dikembangkan oleh Christaller pada tahun (1933) dalam Hanafiah (1989), membahas pembentukan hirarkhi pusat-pusat pelayanan yang dinyatakan dalam tempat sentral. Konsep dasar dari teori tempat sentral ini adalah:

- a. Wilayah yang dilayani oleh tempat sentral merupakan wilayah komplemen bagi tempat sentral.
- b. Tempat sentral mempunyai kegiatan sentral, yaitu yang melayani wilayah yang terluas disebut tempat sentral orde tertinggi sedangkan tempat sentral yang melayani orde terkecil disebut tempat sentral orde rendah.
- c. Batas pelayanan dari tiap kegiatan sentral digambarkan sebagai batas jangkauan dari komoditi tersebut.
- d. Permintaan terhadap komoditi sentral tersebut tergantung secara timbal balik pada distribusi dan variasi kondisi sosial ekonomi penduduk serta konsentrasi penduduk di tiap tempat sentral.

- e. Permintaan terhadap kegiatan sentral tergantung pada jarak dan usaha konsumen untuk memperoleh komoditi tersebut. Diasumsikan permintaan terhadap komoditi tersebut akan semakin berkurang hingga titik nol yaitu berdasarkan penambahan jarak dari tempat sentral.

Kegiatan-kegiatan pelayanan Tempat Sentral yang terdiri dari berbagai komoditi bervariasi dalam skala, hirarkhi, batas ambang dan jangkauan. Setiap kegiatan pelayanan tersebut mempunyai Batas Ambang Penduduk (*Threshold Population*) dan Jangkauan Pasar (*Market Range*) yang berbeda.

- 1). **Batas Ambang Penduduk;** merupakan jumlah penduduk minimum yang menunjang atau membutuhkan adanya suatu kegiatan pelayanan.
- 2). **Jangkauan Pasar;** merupakan suatu jarak yang ditempuh dan diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu pelayanan atau komoditi. Di luar batas itu konsumen akan mencari tempat sentral yang lain.

Dari studinya Christaller mengidentifikasikan tujuh Tempat Sentral mulai dari dukuh atau kampung sampai kota metropolitan. Jarak tujuh kilometer merupakan jarak diantara pusat terkecil berdasarkan asumsi bahwa jarak sekitar empat kilometer merupakan jarak tempuh seseorang yang berjalan dalam satu jam.

Untuk keperluan praktis, hirarkhi tempat sentral dapat ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- 1). **Prinsip pemasaran atau penawaran;** yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap tempat sentral hanya dapat melayani secara maksimum sepertiga dari enam sub tempat sentral ditambah dengan tempat sentral itu sendiri.
- 2). **Prinsip transportasi;** yaitu berdasarkan prinsip jarak minimum antara tempat sentral utama dan sub tempat sentral yang dilayani dan terletak pada jalur-jalur lalu-lintas diantara tempat sentral utama.

- 3). **Prinsip administrasi;** yaitu berdasarkan prinsip kontrol atau pengelolaan dan pemerintahan, dalam pengertian bahwa fungsi tiap tempat sentral mengontrol keenam sub tempat sentral yang mengelilinginya.

2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan ini muncul sebagai jawaban atas masalah yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tempat sentral sebagai suatu model struktur tata ruang regional. Konsep ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekangan dimensi geografi yang digunakan pada teori sebelumnya (teori lokasi dan tempat sentral). Teori kutub pertumbuhan menekankan pada perkembangan kutub pertumbuhan dalam ruang ekonomi (Glasson, 1990).

Konsep dari ahli ekonomi Perancis, Perroux (1955) dalam Hanafiah (1988b), tentang teori kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan berfokus pada perkembangan kutub pertumbuhan dalam ruang ekonomi. Konsep suatu kutub sebagai vektor dalam ruang ekonomi adalah sebagai medan kekuatan, ruang ekonomi mengandung pusat-pusat dan kutub-kutub yang mempunyai kekuatan sentrifugal yang memancar ke sekeliling dan mempunyai kekuatan sentripetal yang menarik sekitarnya ke pusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain.

Ahli ekonomi Perancis lainnya, Boudeville, mengembangkan teori Perroux lebih komprehensif dan mencakup dimensi geografik. Didefinisikan sebagai suatu perluasan dan perkembangan yang dialami sekelompok industri yang berada di daerah perkotaan. Secara singkat, kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan akan tampil sebagai kota-kota yang memiliki suatu kompleks industri pendorong (Boudeville (1966) dalam Hanafiah, 1988b).

Darwent (1969) dalam Nasoetion (1985) mendefinisikan kutub pertumbuhan secara lebih jelas, yaitu sebagai perusahaan-perusahaan atau industri-industri atau kelompok perusahaan. Pertumbuhan dan perubahan diciptakan atau dimulai dari dalam kutub-kutub tersebut. Sedangkan hubungan antara kutub-kutub, dalam hal ini arus masukan dan hasil merupakan media pemindahan kekuatan yang dihasilkan oleh kutub-kutub tersebut ke wilayah pengaruhnya. Kondisi dimana beberapa perusahaan didominasi oleh satu perusahaan atau beberapa industri didominasi oleh satu industri merupakan kondisi yang terpenting bagi pengertian kutub pertumbuhan ini.

Hirschman (1958) dalam Nasoetion (1985) berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi diberbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila suatu wilayah terjadi pembangunan maka akan terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar wilayah dimana pembangunan tersebut berawal. Terjadinya konsentrasi pembangunan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul di wilayah maju yang akan mempengaruhi dan menghambat pembangunan di wilayah kurang maju. Faktor-faktor yang menghambat disebut sebagai efek polarisasi atau pengaruh pemusatan, kemudian daerah maju juga mempunyai kekuatan untuk menggalakkan pembangunan ke wilayah kurang maju, yang disebut sebagai efek menetes ke bawah (*trickle down effects*) yang ternyata lebih lemah dari efek polarisasi

Glasson (1990), mengatakan bahwa konsep dasar dari kutub pertumbuhan terdiri dari konsep *Leading Industries*, konsep *Polarisasi* dan konsep *Spread Effects*.

- a. **Konsep *Leading Industries* dan *perusahaan propulsive***; menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan *propulsive* yang besar termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit-unit ekonomi

- lainnya. Ada kemungkinan bahwa suatu kompleks industri hanya terdiri dari satu perusahaan propulsive yang dominan. Ciri-ciri suatu perusahaan propulsive menurut Hermansen (1970) dalam Nasoetion (1985) antara lain (1) merupakan perusahaan, besar dengan modal besar dan teknologi maju, (2) termasuk ke dalam kelompok industri maju dan tumbuh cepat, (3) mempunyai produktivitas tinggi dan kemampuan besar dalam penerapan teknologi, (4) mempunyai posisi penawaran kuat dan hubungan yang kuat dengan kegiatan lain di wilayah tersebut.
- b. **Konsep Polarisasi;** menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Pada akhirnya hasil dari proses polarisasi adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi. Menurut Hanafiah (1988b) adanya aglomerasi ekonomi akan menimbulkan (1) *economic internal to firm*, yang dicirikan oleh biaya produksi rata-rata yang rendah, yang ditimbulkan oleh produksi skala besar, spesialisasi dan efisiensi; (2) *economic external to the firm but internal to industry*, yang ditandai dengan penurunan biaya tiap unit produksi karena lokasi tertentu dari industri tersebut, misalnya dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga kerja terampil; dan (3) *economic external to the industry but internal to urban area*, yang dicirikan oleh adanya perubahan penurunan biaya produksi rata-rata tiap perusahaan karena banyaknya industri yang tumbuh pada suatu tempat atau kota.
- c. **Konsep Spread Effects;** menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar ke luar dan memasuki ruang sekitarnya. Hirschman (1958) dalam Glasson (1990) menyatakan bahwa *spread*

effects atau *trickling down effects* dari kutub pertumbuhan sebagai lawan dari *backwash effects* atau *polarisation effects*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berbagai hal yang menarik tentang konsep kutub pertumbuhan, yaitu :

- 1). Adanya keuntungan aglomerasi, konsep ini akan menjadi suatu cara yang efisien untuk menimbulkan perkembangan yang lebih cepat di daerah tersebut.
- 2). Dari segi anggaran belanja, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang banyak.
- 3). *Spread effects* yang ditimbulkan oleh titik-titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang tertinggal.

2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil

Penerapan kebijaksanaan pembangunan wilayah dilaksanakan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil diharapkan mampu mendorong perkembangan pembangunan desa.

Pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan hasil studi di India pada tahun 1975 dalam Hanafiah (1988b) telah dimodifikasikan dan dapat dibedakan atas :

1). Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan merupakan tingkat terendah yang melayani sejumlah 5 000 sampai 10 000 penduduk yang terpusat pada satu desa atau terpecah di beberapa kampung atau pedukuhan. Pusat pelayanan tidak akan merupakan pusat pertumbuhan, melainkan akan lebih berfungsi sebagai pusat interaksi

sosial, pertukaran ide dan informasi mengenai pembangunan yang akan menyebar ke desa-desa.

Dalam jangka panjang, pusat pelayanan akan merupakan saluran perembesan pengaruh kota ke daerah belakang, di pedesaan. Pemilihan pusat pelayanan akan ditekankan pada proses interaksi sosial dan integrasi masyarakat dalam satu teritorial daripada berdasarkan kelompok atau lapisan masyarakat.

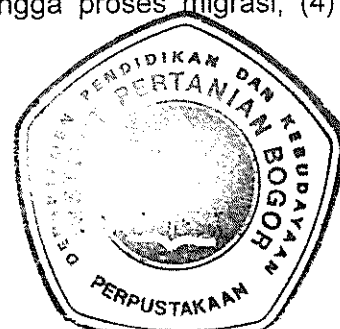
2). Titik Pertumbuhan

Titik pertumbuhan mencakup 10 sampai 20 pusat pelayanan dan melayani penduduk yang tersebar di wilayah yang bersangkutan sejumlah 50 000 sampai 100 000 jiwa. Ukuran luas titik pertumbuhan itu sendiri adalah sekitar 10 000 sampai 50 000 penduduk. Perbedaan antara titik pertumbuhan dengan pusat pelayanan tidak terletak pada ukuran dan skala pelayanan, melainkan peranan keduanya yang berbeda, walaupun saling melengkapi.

Titik pertumbuhan direncanakan sebagai pusat kecil perkotaan yang mempunyai karakteristik sosial ekonomi sendiri dan mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi pedesaan sekitarnya.

3). Pusat Pertumbuhan

Penduduk kota pusat pertumbuhan ini bervariasi antara 50 000 sampai 500 000 jiwa dan tergantung pada tingkat ekonomi wilayah tersebut. Jumlah penduduk yang dilayani sekitar 1 000 000 - 2 000 000 jiwa yang menyebar dalam wilayah yang besar. Fungsi pusat pertumbuhan adalah (1) industri, (2) konsumen dari hasil jadi atau setengah jadi yang diproduksi di titik pertumbuhan dan hasil pertanian dari pusat pelayanan, (3) penyangga proses migrasi, (4)



penghasil faktor produksi pertanian dan (5) pengumpul dan penyimpan serta lokasi fasilitas pengolahan dalam ukuran besar.

4). Kutub Pertumbuhan

Kutub pertumbuhan akan mempunyai penduduk 500 000 sampai 2 500 000 jiwa. Fungsi kutub pertumbuhan lebih menonjol di sektor tersier. Kutub pertumbuhan merupakan jantung bagi wilayah makro yang mengirim denyutan-denyutan pembangunan, seperti pembiayaan, teknologi, hasil penelitian, industri dan lain-lain ke berbagai pusat pertumbuhan.

Dalam pembangunan pedesaan penciptaan dan pengembangan pusat pelayanan kecil dan titik pertumbuhan menjadi sangat strategis. Unit wilayah yang baik untuk pengembangan pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kecil adalah kecamatan. Usaha pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat dan titik tersebut akan menimbulkan manfaat antara lain (1) timbulnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, (2) penciptaan skala ekonomi, (3) mendorong inovasi, (4) menciptakan akumulasi modal, (5) menciptakan siklus pertumbuhan dan perluasan, (6) konsentrasi kegiatan ekonomi dan (7) akan menimbulkan pengaruh komplemen dan berganda yang menciptakan pasar baru.

2.3. Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Kota Kecamatan

Pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin di pedesaan. Dengan demikian tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk menekan kemiskinan, menekan pengangguran dan ketimpangan atau ketidakmerataan keadaan sosial ekonomi. Sedangkan jika dilihat dari konsep operasionalnya, pembangunan pedesaan adalah merupakan strategi, kebijaksanaan dan program-program yang ditujukan untuk pembangunan pedesaan, yang dapat menciptakan kegiatan-

kegiatan di bidang pertanian dalam arti luas, kerajinan rumah tangga dan industri ringan dan prasarana sosial ekonomi yang semuanya bertujuan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia dalam rangka peningkatan taraf hidup penduduk miskin dengan cara berperansertanya kelompok tersebut dalam pembangunan pedesaan (Hanafiah, 1988a).

Kebijaksanaan pembangunan pedesaan yang ditempuh Indonesia adalah kebijaksanaan pembangunan wilayah pedesaan yang dilaksanakan secara terpadu. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) (1993), yang dimaksud terpadu adalah bahwa dalam kegiatan pembangunan ada : (1) keterkaitan wilayah, yaitu kegiatan pembangunan yang ada di desa satu atau kecamatan satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan utuh dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional, (2) keterkaitan fungsi, yaitu ada keserasian kegiatan pembangunan antara satu sektor dengan sektor yang lain yang harus saling mendukung dan tidak berdiri sendiri-sendiri, (3) keharmonisan, artinya ada kesesuaian antara kebijaksanaan pemerintah dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdasarkan potensi wilayah, (4) keterpaduan waktu, artinya urutan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengacu dan saling mendukung antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya, (5) keterpaduan sasaran, artinya semua kegiatan pembangunan mengacu pada kesamaan tujuan, yaitu tercapainya desa swasembada.

Berkaitan dengan pembangunan pedesaan, kota kecamatan memegang peranan yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan. Pengembangan kota kecamatan diharapkan

mampu menggali potensi wilayah lokal dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi baru, menumbuhkan kegiatan agroindustri dan perdagangan di wilayah kecamatan. Selain itu kota kecamatan mempunyai posisi strategis juga dilihat dari sisi pemerintahan menurut Ditjen PMD (1993), karena :

- 1) Pemerintahan kecamatan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia merupakan perangkat terbawah dari pelaksanaan azas desentralisasi. Dengan demikian pemerintah kecamatan merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.
- 2) Kecamatan merupakan unit pemerintahan dan unit pembangunan di tingkat paling bawah yang memiliki organisasi pemerintahan dan unsur aparatur yang relatif lengkap, dengan aparat dari berbagai instansi vertikal dan otonom.
- 3) Camat sebagai kepala wilayah memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi vertikal dan instansi otonom di tingkat kecamatan, sesuai dengan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam pengembangan kota kecamatan, hal yang perlu mendapat perhatian menurut Hanafiah (1988b) adalah :

- 1). **Pembangunan lokal;** bila pengembangan kota kecamatan merupakan strategi bagi pembangunan wilayah kecamatan, maka strategi ini dapat dikatakan sebagai pembangunan lokal dalam arti pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan melalui peranserta masyarakat.
- 2). **Desentralisasi dan Dekosentrasi;** kemampuan perencanaan pembangunan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan meningkatkan fungsi Camat sesuai INMENDAGRI No 4 Tahun 1981.

- 3). **Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan kecil di pedesaan;** dalam rangka menciptakan suatu struktur internal pedesaan yang dinamis, melalui pengembangan sektor informal pedesaan.
- 4). **Menciptakan pusat-pusat pelayanan di pedesaan;** dalam rangka menyediakan fasilitas kebutuhan dasar manusia.

Pengembangan kota kecamatan telah dirancang agar pelaksanaan program pembangunan di pedesaan benar-benar sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat, melalui sistem UDKP. Sistem UDKP adalah suatu sistem manajemen pembangunan pedesaan terpadu. Sistem ini memadukan program-program pembangunan dari berbagai sektor, instansi vertikal dan instansi otonom lainnya.

Dengan demikian wilayah kecamatan dijadikan unit terkecil dalam pembangunan pedesaan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan UDKP, yang menetapkan wilayah kecamatan sebagai satu unit manajemen pembangunan terpadu. Pengembangan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan kecil diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah belakang (*hinterland*) melalui mekanisme *spread effects* dan aglomerasi kegiatan-kegiatan ekonomi.

Unit Daerah Kerja Pembangunan juga akan mendorong terbentuknya kota-kota kecamatan dengan tipe pertanian, industri maupun jasa, sesuai dengan jenis kegiatan yang dominan di wilayah tersebut. Tipe kota kecamatan akan menggambarkan hubungan antara kota kecamatan sebagai pusat dengan desa-desa sekelilingnya sebagai hinterlandnya. Dengan demikian kota kecamatan menduduki fungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan pedesaan dan pusat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi di tingkat kecamatan.

Kelancaran transportasi antara kota dan desa akan memperlancar arus barang dan jasa. Menurut Karjoredjo (1989) ada dua belas arah dan dampak arus barang dari kota ke desa dan sebaliknya, yaitu :

- a. Keunggulan komparatif kota sangat kuat, sehingga terjadi aglomerasi ekonomi ke kota. Pengembangan kutub akan lebih menguntungkan kota.
- b. Barang yang beredar di kota mempunyai kaitan ke belakang (*back ward linkage*) di desa dan fasilitas di kota tidak hanya menguntungkan kota. Pengembangan kota akan lebih tepat sebagai pusat pelayanan.
- c. Apabila perputaran barang di kota menguntungkan ke dua belah pihak, maka pengembangan kutub akan merembes ke desa tanpa diikuti arus barang dari desa ke kota.
- d. Arus dari desa ke kota hanya menguntungkan kota, sifat hubungan ini adalah ekstraktif. Pengembangan kota dapat dijadikan sebagai transit dari daerah pedesaan ke daerah yang lebih tinggi.
- e. Desa telah memenuhi kebutuhan barang sendiri dan sisanya dialirkan ke kota. Desa ini dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan daerah sendiri.
- f. Arus dari desa ke kota menguntungkan daerah pedesaan dan proses pengembangan berlangsung dari bawah.
- g. Surplus kota ke desa lebih menguntungkan kota. Kedudukan kota lebih bersifat menghisap terhadap desa.
- h. Surplus kota ke desa lebih menguntungkan desa, kedudukan kota lebih bersifat membagi terhadap desa.
- i. Surplus kota untuk memenuhi kebutuhan desa dengan fasilitas perkotaan dan fasilitas pedesaan yang baik menyebabkan pengembangan dari atas ke bawah.

- j. Perputaran barang atau transaksi terjadi di desa mempunyai kaitan ke muka di kota.
- k. Perputaran barang atau transaksi terjadi di desa dan menguntungkan desa. Hal ini merupakan tanda efektifnya pengembangan agropolitan.
- l. Perputaran barang di desa menguntungkan daerah pedesaan. Strategi pengembangan daerah ini sebaiknya adalah pengembangan wilayah pedesaan terpadu.

2.4. Sistem Pasar dalam Pembangunan Wilayah

Pasar adalah tempat atau lokasi dimana barang dan jasa ditransaksikan antara penjual dan pembeli. Menurut Maulidian (1993), dalam skala mikro, pasar juga merupakan terminal dari macam-macam angkutan. Dalam skala makro, pasar merupakan suatu pusat transportasi dimana sistem aliran barang dan jasa didistribusikan.

Menurut Smith (1976), pasar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, adalah pandangan Adam Smith dan pengikutnya yang memandang keseimbangan pasar terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang akan membentuk keseimbangan. Sistem ini akan mengatur mekanisme pengalokasian barang dan sumberdaya yang langka melalui mekanisme harga. Distribusi dan alokasi sumberdaya akan mengarahkan pada spesialisasi dan mengintensifkan pertukaran. Kedua, berdasarkan pendapat Polanyi (1944) dalam Smith (1976) , pasar adalah suatu aktifitas manusia yang tidak alami dan membutuhkan kondisi yang spesifik untuk berkembang. Hal ini berarti membutuhkan kekuatan dari luar sistem ekonomi domestik.

Menurut Smith (1976), kedua pandangan di atas bila dipadukan dengan teori Tempat Sentral justru sangat berguna untuk menelaah sistem pasar dalam tata

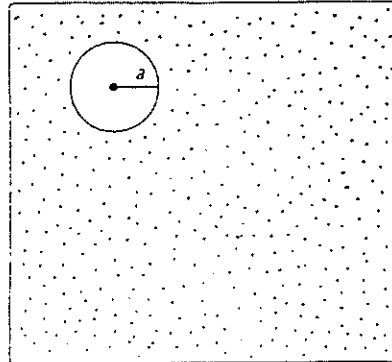
ruang. Berdasarkan teori tempat sentral Christaller, perbedaan kelas akan menumbuhkan pasar-pasar desa. Kekuatan sosial politik sebagai kekuatan dari luar sistem ekonomi domestik akan menciptakan kondisi yang dibutuhkan oleh sistem pasar untuk berkembang dan sistem harga akan menunjang perkembangannya.

Aktifitas pasar dan sistem pasar akan ditunjang oleh tersedianya fasilitas transportasi yang menghubungkan pusat-pusat pemukiman sehingga akan terbentuk jalur-jalur perdagangan yang berupa jalan antara kedua daerah tersebut. Pada lokasi-lokasi tertentu dari jalur jalan utama tersebut akan terbentuk pasar, yaitu pada lokasi yang strategis. Dengan demikian pasar ini terbentuk karena kekuatan lokasi.

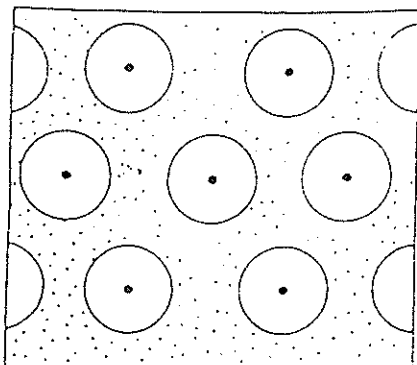
Berdasarkan konsep Tempat Sentral, dapat dianalisis sistem pasar dan struktur hirarkhi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Christaller mendasarkan pada asumsi bahwa daerah analisis adalah suatu dataran yang rata, mempunyai sumberdaya alam yang tersebar secara merata dan penduduknya, yang diasumsikan adalah petani, juga tersebar secara merata. Apabila seorang petani membuka toko yang dapat melayani suatu area pasar di sekitarnya, maka petani lain bersedia menempuh jarak tertentu untuk membeli berbagai keperluan dari petani pemilik toko tersebut. Apabila jarak yang harus ditempuh untuk mencapai toko semakin jauh, maka kemanfaatan dari toko tersebut akan menurun karena semakin besarnya biaya perjalanan yang diperlukan. Jika kegiatan pengeceran menguntungkan, petani-petani lain mungkin mengembangkan area pasar mereka sendiri sehingga timbul persaingan spasial antara para penyedia jasa. Tetapi pada tahap ini belum semua daerah pasar dapat dilayani.

Apabila radius jangkauan pasar bertambah karena adanya penemuan teknologi baru dan penurunan biaya produksi dan biaya transportasi, akan terjadi

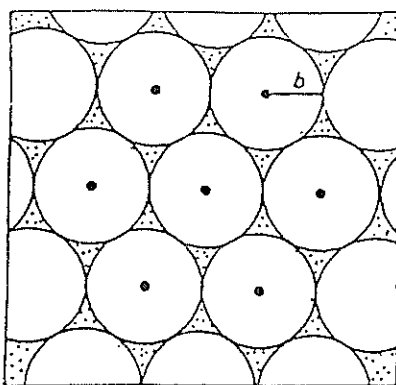
tumpang tindih pelayanan pada wilayah tersebut. Konsumen pada wilayah ini dilayani oleh lebih dari satu tempat sentral. Bila diasumsikan penduduk adalah rasional, yang akan memilih pusat pelayanan dengan jarak terdekat, maka akan terbentuk wilayah berbentuk heksagonal di sekitar tempat sentral, yang merupakan wilayah layanannya. Berdasarkan area pasar heksagonal ini, timbul sistem tempat sentral dengan orde terendah yang mempunyai wilayah layanan dan jangkauan pasar paling sempit dan tempat sentral yang memiliki orde tertinggi dengan wilayah layanan terluas dengan jangkauan pasar juga paling luas. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1.



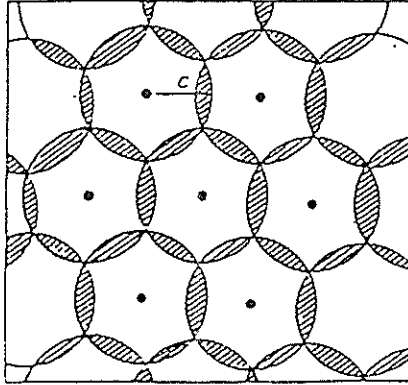
Gambar 1a. Untuk berbagai keperluan, rumah tangga dan produksi, petani mempunyai area pasar dengan radius tertentu, yaitu a



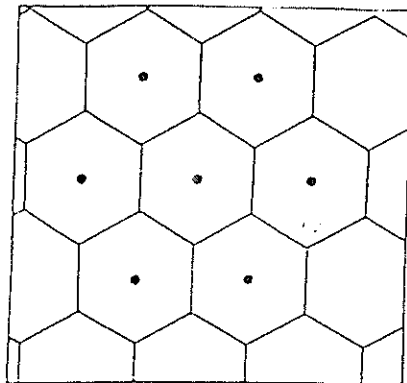
Gambar 1b. Petani lain juga demikian halnya, yaitu mempunyai masing-masing radius pasar, lebih kurang sama dengan a



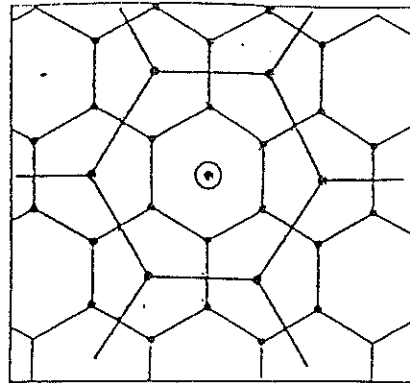
Gambar 1c. Petani-petani yang memiliki radius lebih besar dari, misalnya b , akan memperhitungkan waktu dan berat berdasarkan ongkos. Timbul persaingan tata ruang diantara yang melakukan kegiatan pelayanan. Pada tahap ini tidak semua pasar dapat dilayani.








Gambar 1d. Bila diasumsikan bahwa fasilitas transportasi dan komunikasi menjadi lebih baik, maka jarak jelajah menjadi c dan area pasar menjadi tumpang tindih, penduduk yang tinggal di area ini mempunyai beberapa pasar.



Gambar 1e. Penduduk yang tinggal di area pasar yang tidak tumpang tindih hanya mempunyai satu pasar. Secara rasional terdapat perhitungan biaya transpor minimum, maka akan timbul area pasar heksagonal di sekitar tempat sentral; disebut juga sistem sarang lebah.



Gambar 1f. Berdasarkan area pasar heksagonal ini, yaitu berdasarkan efisiensi sistem pelayanan, timbul sistem TS dengan orde tinggi dan orde rendah.

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------|
|  | : Area yang tidak dilayani |  | : Kota |
|  | : Area pasar yang tumpang tindih |  | : Desa |
| | |  | : Kampung/Dukuh |

Gambar 1. Perkembangan Hirarkhi Tempat Sentral

Sumber : Hanafiah, 1989

Berdasarkan hasil penelitian Dewey (1962) dalam Anderson (1980) pasar, seperti yang terdapat di Modjokuto berfungsi sebagai pengumpul hasil pertanian dengan mendistribusikan kembali barang-barang tersebut untuk konsumsi lokal melalui transaksi dalam skala kecil dan membawa barang-barang tersebut dalam jumlah besar untuk kota-kota besar dan menjualnya secara grosir. Pasar-pasar tersebut, seperti halnya semua pasar yang ada di Jawa, terikat dalam sebuah

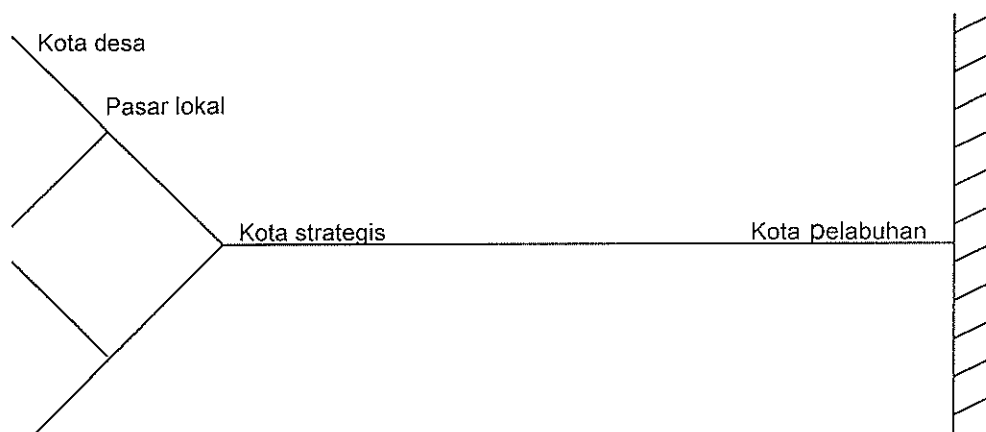
jaringan yang terdiri dari seluruh pasar-pasar yang ada, besar dan kecil dalam suatu areal yang luas. Melalui jaringan ini barang-barang yang dihasilkan oleh petani berpindah dari pedesaan dan kota-kota kecil ke kota besar, dan sebaliknya.

Pasar pedesaan di Jawa Barat berdasarkan penelitian Anderson (1980) dijelaskan sebagai berikut : (a). Administrasi dan pengawasan; pasar-pasar yang lebih besar yang terpusat di ibukota kabupaten dan pada pasar-pasar yang lebih kecil di kota kecil umumnya diawasi oleh pemerintah kabupaten. Mayoritas pasar yang lebih kecil, sebagian besar dijalankan hanya satu atau dua kali dalam seminggu, pengelolaannya dilakukan oleh pegawai pemerintahan desa, (b) Kondisi pasar desa pada saat ini berfungsi sebagai pembeli daripada penjual, dan (c) Jaringan pasar tradisional (petani) di wilayah Jawa yang dipelajari tidak ada monopoli dalam perdagangannya melainkan mempunyai susunan baik sekali sebagai subsistem dalam struktur pemasaran yang lebih besar. Hal tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi sangat besar oleh perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat Jawa.

Menurut struktur tata ruang wilayah, sistem pasar dibagi menjadi tiga yaitu sistem pasar dendritik, sistem pasar intermeshed dan sistem pasar solar. Dalam sistem pasar dendritik yang pertama kali dikenalkan oleh Johnson (1970) dalam Smith (1976) terdapat tiga komponen utama yaitu : 1) Kota pelabuhan (*port city*) yang merupakan pusat konsumsi, pusat ekspor dan impor dan biasanya merupakan ibukota nasional, 2) Kota strategis (*strategic city*) dan 3) Pasar-pasar lokal yang tersebar. Pasar lokal ini tergantung pada kota strategis dalam hal transportasi, pengolahan dan kredit.

Implikasi dari sistem pasar dendritik menurut Smith (1976) adalah (1) Karena hanya terdapat satu pusat, maka pusat yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan

untuk menekan harga komoditi pertanian dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat desa dengan harga tinggi. Dengan demikian "term of trade" sektor pertanian akan sangat tergantung pada pusat kota; (2) Karena semua barang harus melalui kota pelabuhan terlebih dahulu, maka akan terdapat inefisiensi dalam distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat desa; (3) Petani yang berlokasi di dalam "inner zone" (dekat dengan kota pelabuhan) akan memperoleh keuntungan dalam memasarkan produknya, namun sebaliknya buat para petani yang berlokasi jauh dari pusat kota. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.

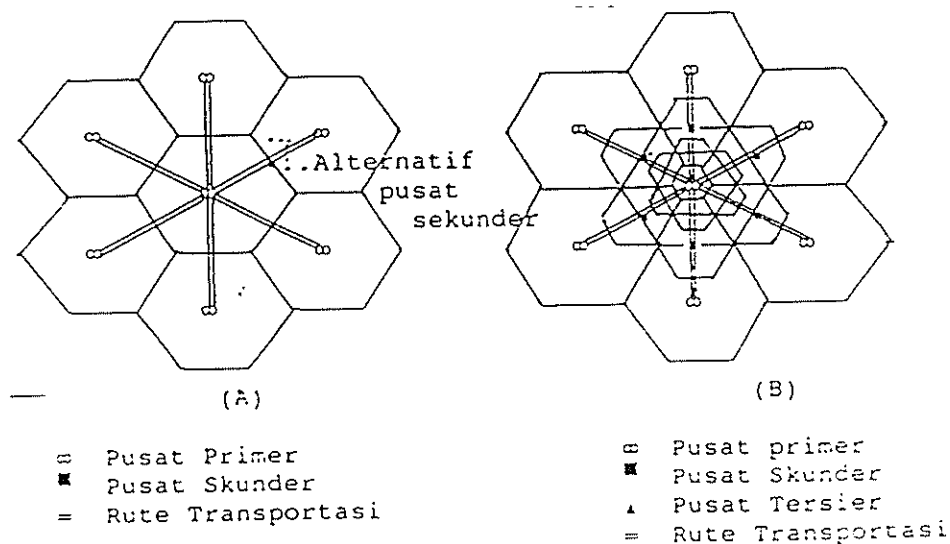


Gambar 2. Komponen Utama Sistem Pasar Dendritik

Sumber : ESCAP (1979) dalam Setiawan (1995)

Model sistem pasar yang kedua adalah sistem pasar intermeshed. Salah satu model yang dikembangkan adalah model Skinner (1965) dalam Setiawan (1995). Menurut model ini, pasar timbul karena adanya pertukaran pada suatu daerah yang terisolasi dan memiliki spesialisasi yang terbatas. Daerah ini kemudian mengadakan hubungan dengan daerah lain yang berdekatan sehingga pasar semakin meluas dan menimbulkan ekspansi penduduk atau bertambahnya sektor

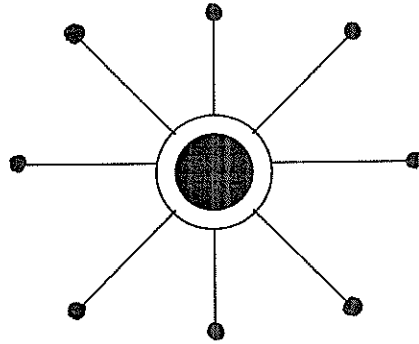
domestik yang dipertukarkan. Jika diasumsikan distribusi produksi dan konsumen homogen serta konsumen rasional dengan minimisasi biaya perjalanan maka dapat diperkirakan terbentuknya suatu pola heksagonal yang merupakan pelayanan suatu pusat. Pusat akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui sistem jalan dan transportasi yang memencar dari enam buah pusat lainnya (Gambar 3A). Pada tahap ini pertukaran yang terjadi mungkin rendah tetapi areal permintaan akan meningkat oleh pengaturan pasar secara temporal. Perkembangan selanjutnya akan mendorong timbulnya pusat-pusat baru. Ketika pusat sekunder muncul, maka pusat-pusat sebelumnya akan memiliki fungsi tambahan. Proses pendalaman sistem pasar akan menghasilkan hirarkhi dengan tiga tingkatan pusat (Gambar 3B).



Gambar 3. Perkembangan Sistem Pasar Model Skinner

Sumber : Schwimmer (1976) dalam Setiawan (1995)

Model sistem pasar yang ketiga adalah sistem pasar solar. Sistem pasar ini atau sistem matahari memiliki mata rantai pemasaran yang pendek, dari produsen langsung ke pasar yang besar dan tetap, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Sistem Pasar Model Solar

Sumber : Hanafiah (1997)

Pasar kecil-kecil yang mengelilingi kota besar (konsumen) seperti pasar ternak, saling bersaing yang menguntungkan konsumen. Ternak potong yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, NTT, dan NTB memiliki lokasi pasar sendiri di sekitar Jakarta.

Menurut Maulidian (1993), pasar sebagai salah satu fasilitas pelayanan dalam suatu pemukiman, sifatnya melayani penduduk dalam pemukiman tersebut. Keadaan pasar mengikuti keadaan manusia yang dilayaninya. Semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, semakin kompleks keadaan pasar tersebut. Kompleksnya keadaan pasar tergambar pada intensitas kegiatan, berbagai ragam barang, serta volume barang yang diperjualbelikan.

Menurut Johnson (1970) dalam Smith (1976), salah satu bentuk nyata intensitas kegiatan pasar adalah waktu berlangsungnya kegiatan pasar tersebut

yang dihubungkan dengan jumlah dan tingkat kehidupan penduduk, serta ragam dan volume barang yang dibutuhkan.

Secara umum pasar dapat dibedakan :

- a. Pasar tetap, yaitu pasar yang relatif besar ukurannya dimana penduduk dapat membeli segala keperluannya dan menjual hasil-hasil produksinya setiap hari. Pasar ini mempunyai wilayah pengaruh berdasarkan prinsip sentralitas, pusat persimpangan, transportasi dan aksesibilitas yang baik, misalnya pasar kota kecamatan.
- b. Pasar tidak tetap atau pasar periodik, yaitu pasar yang hanya terdapat 1 - 3 kali per minggu, relatif kecil, komoditi yang diperjualbelikan juga terbatas dan pasar ini bergerak dari satu desa ke desa lainnya dengan suatu pola tertentu. Pasar desa periodik ini mempunyai radius yang kecil 3 - 6 kilometer di sekitar desa.

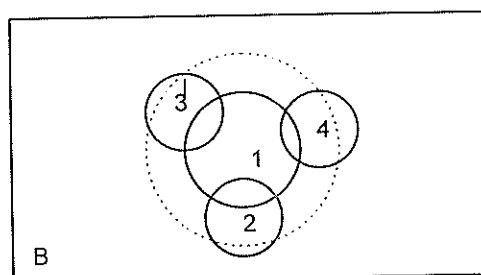
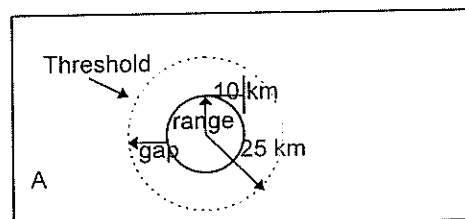
Bila dihubungkan dengan pasar di pedesaan, sistem pasar periodik merupakan pasar yang mempunyai hirarkhi paling rendah yang melayani pemukiman-pemukiman di sekitarnya. Dengan demikian lokasi yang mempunyai kegiatan pasar periodik ini dapat berperan sebagai pusat bagi pemukiman di sekitarnya dalam arti perekonomian khususnya perdagangan.

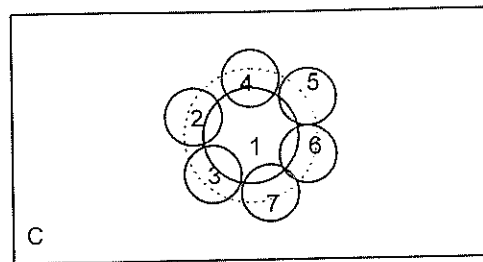
Dengan tumbuhnya pasar periodik membuat pedagang dapat menjual barang dagangannya lebih banyak daripada bila ia hanya berdiam pada satu lokasi. Pergerakan pasar ini dapat terjadi bila ada koordinasi antar pedagang untuk membentuk suatu pola pergerakan pasar dari satu tempat ke tempat lain, sehingga terbentuk pola pergerakan pasar periodik yang teratur. Dari pergerakan pedagang tersebut dapat ditentukan hari berlangsungnya kegiatan pasar periodik pada suatu tempat. Pergerakan pasar ini tergantung pada adanya celah ruang atau gap yang

belum mendapat pelayanan. Semakin besar celah, semakin banyak pula tempat yang harus didatangi.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar memperlancar kegiatan yang bersifat ekonomi. Di bidang produksi, pasar menyediakan kebutuhan modal, alat dan tenaga. Di bidang konsumsi, pasar menyediakan kebutuhan primer dan sekunder. Sebagai pusat kegiatan non ekonomi, pasar berfungsi sebagai tempat rekreasi, pertukaran informasi, pertemuan sosial dan pemerintahan.

Faktor utama yang berperan dalam berlangsungnya kegiatan pasar adalah adanya jaringan jalan dan fasilitas transportasi. Mobilitas orang, barang dan jasa juga sangat tergantung pada ada tidaknya fasilitas transportasi ini. Dengan demikian perkembangan pasar yang berarti perkembangan ekonomi wilayah merupakan fungsi dari jaringan jalan dan sarana transportasi. Gambar berikut memperlihatkan contoh pergerakan pasar periodik dalam satu minggu.



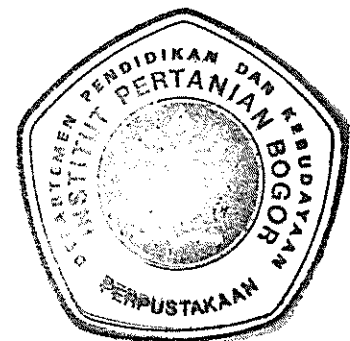


Gambar 5. Batas Ambang dan Jangkauan Pasar serta Pergerakan Pedagang Penjual dalam Pasar Periodik

Sumber : Able, Ronald, Adams, John S (1971) dalam Maulidian (1993)

Keterangan :

- Threshold bagi suatu usaha yang menjual barang atau jasa diartikan sebagai "minimum market" yaitu harga kali jumlah yang diperlukan sehingga pedagang dapat menjaga kelangsungan kegiatannya. Threshold ini sering juga diartikan sebagai jumlah penduduk yang harus dilayani supaya langgeng usahanya.
- Range atau kisaran bagi suatu usaha yang menjual barang atau jasa adalah jarak maksimum rata-rata penduduk yang datang membeli.
- Angka 1 sampai 7 menunjukkan urutan pergerakan pedagang.



III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik, yaitu tercapainya kondisi masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual secara merata. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya, baik sumberdaya alam (SDA) seperti tanah, air, flora dan fauna, sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya buatan yaitu sarana, teknologi, kelembagaan dan modal.

Perbedaan potensi sumberdaya serta perbedaan pertumbuhan wilayah menyebabkan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar wilayah akan menyebabkan adanya wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah kurang berkembang. Sedang ketimpangan antar sektor menyebabkan dominasi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian wilayah tersebut.

Penerapan pendekatan pusat-periferi yang mempertimbangkan hubungan fungsional antara kota dengan desa, telah mendapat perhatian yang besar. Pengembangan daerah belakang dapat dilaksanakan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan yang akan menjadi pusat kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi, yang mendorong pertumbuhan daerah belakang, juga berfungsi sebagai penghantar pertumbuhan kota yang hirarkhinya lebih tinggi ke daerah yang hirarkhinya lebih rendah. Kaitannya dengan pembangunan pedesaan, kota kecamatan merupakan tempat strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Kecamatan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil dengan pertimbangan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan paling dekat dengan masyarakat dan merupakan unit wilayah yang cukup luas untuk satu unit pengembangan. Disamping itu adanya jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

Penentuan jumlah dan lokasi fasilitas sosial ekonomi akan mempengaruhi tingkat efektivitas fasilitas tersebut. Penentuan lokasi fasilitas pelayanan harus mempertimbangkan : (1) ambang batas penduduk dan (2) jangkauan dari fasilitas tersebut. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk minimum untuk mendukung tersedianya fasilitas tertentu. Apabila jumlah penduduk kurang dari nilai ambang batas ini maka fasilitas tersebut menjadi kurang bermanfaat. Setiap jenis fasilitas memerlukan ambang batas penduduk yang berbeda. Jangkauan fasilitas merupakan luas wilayah yang mampu dilayani oleh suatu fasilitas pelayanan. Untuk masyarakat yang di luar jangkauan suatu fasilitas pelayanan akan mencari fasilitas pelayanan yang lain.

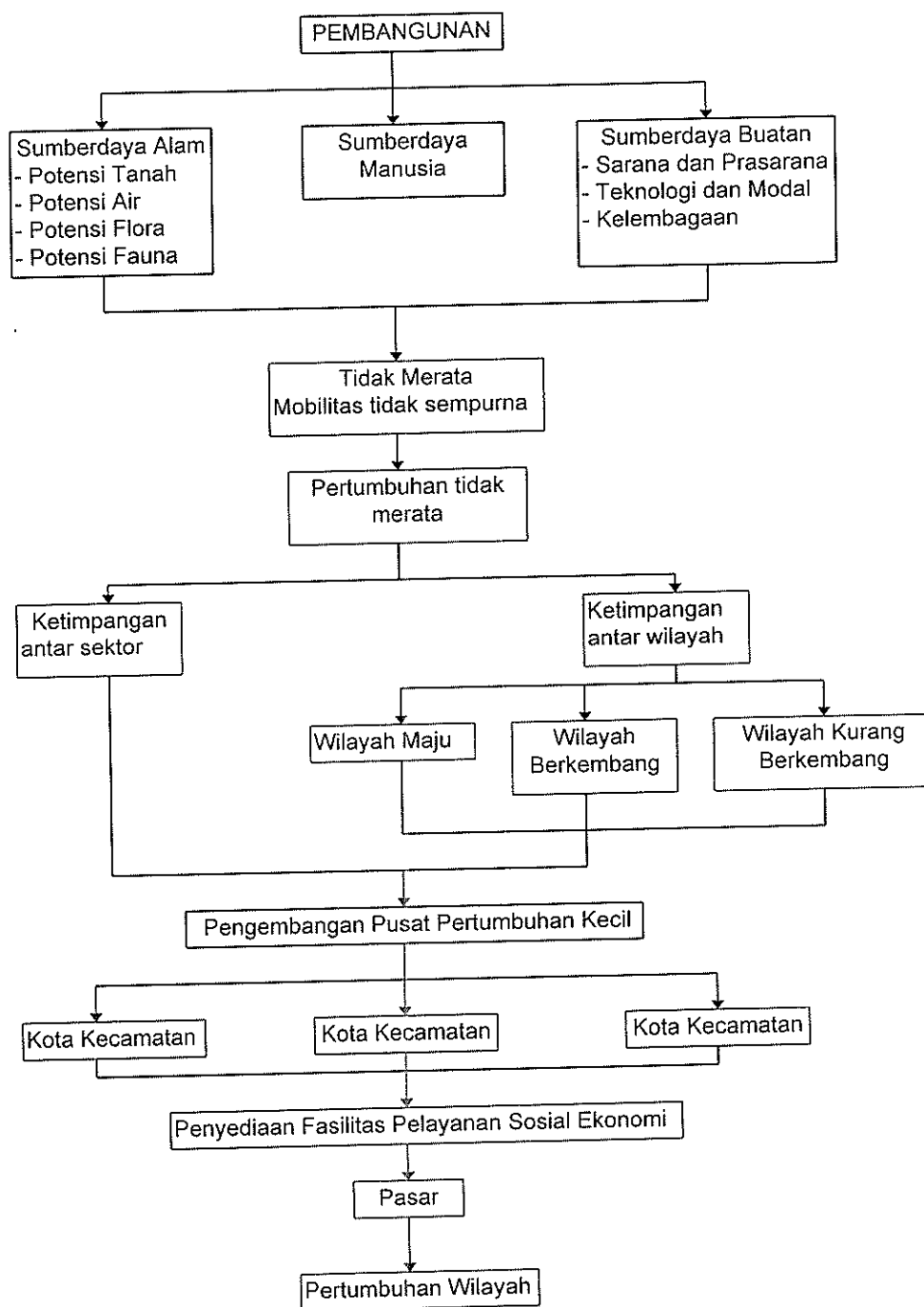
Fasilitas pelayanan pasar memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan wilayah. Peningkatan produksi pertanian, peningkatan lapangan usaha memerlukan fasilitas untuk memasarkan produknya. Disamping itu peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa baik jumlah maupun ragamnya. Pasar dalam hal ini merupakan sarana pertukaran dalam memasarkan produk wilayah tersebut dan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar.

Aktifitas pasar memerlukan penyediaan sarana transportasi untuk kelancaran peredaran barang dan jasa. Dengan demikian perkembangan pasar ini tidak terlepas dari perkembangan dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang lainnya.

Aktifitas pasar akan merangsang dan menumbuhkan aktifitas produksi barang dan jasa yang memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga menunjang pertumbuhan dalam bentuk peningkatan pendapatan dan nilai tambah produk.

Untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan yang tepat, perlu dilakukan : (1) pengidentifikasian hirarkhi struktur tataruang wilayah, (2) identifikasi pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan serta (3) identifikasi potensi wilayah. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fasilitas sosial ekonomi agar seluruh masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat kerangka pemikiran dapat dilihat dari skema di bawah ini.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



Kerangka Pemikiran Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah
Pedesaan

3.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- 1). Kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah berpengaruh pada jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di wilayah yang bersangkutan.
- 2). Aktifitas pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani.

Secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hipotesis 1). Kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah berpengaruh pada jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Kondisi geografis ditekankan pada keadaan suatu wilayah apakah merupakan suatu dataran atau daerah yang berbukit-bukit. Bagi usaha-usaha pertanian adalah lebih menguntungkan bila lahan yang ada relatif datar. Begitu pula halnya dengan pembangunan fasilitas pelayanan.

Sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah tidak hanya meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya, tetapi juga meliputi sumberdaya buatan seperti teknologi dan kelembagaan. Dalam penelitian ini, wilayah dengan sumberdaya yang menguntungkan dicirikan oleh produktivitas hasil pertanian yang tinggi dan beragam serta memiliki pengairan yang baik.

Adapun fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang ditelaah dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi fasilitas administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, pos dan telekomunikasi, transportasi, peribadatan, dan pelayanan umum.

Untuk menguji hipotesa ini menggunakan skalogram, hirarkhi potensi sumberdaya wilayah serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing pusat pemukiman. Setelah itu dilihat apakah terdapat hubungan antara kondisi geografis dan sumberdaya suatu wilayah dengan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimiliki.

Hipotesis 2). Aktifitas pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani.

Pasar merupakan pusat aktivitas perekonomian masyarakat, selain berfungsi sebagai tempat komunikasi dan informasi. Peranan utama pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah sebagai tempat pertukaran komoditi baik yang dihasilkan dalam wilayah tersebut maupun yang dihasilkan dari wilayah lain. Berarti, pasar merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah. Pasar akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, melalui penciptaan nilai tambah produk dan pembukaan peluang berusaha dan kesempatan kerja.

Aktifitas pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani. Semakin besar jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani, maka aktifitas pasar akan semakin besar. Barang yang tersedia di pasar akan lebih banyak, baik jenis maupun jumlahnya dan arus barang yang terjadi semakin besar.

Permintaan yang kecil dari sejumlah penduduk yang dilayani oleh sebuah pasar yang kurang ramai, menyebabkan timbulnya pasar periodik. Pasar ini beroperasi antara satu sampai dua kali dalam seminggu dan berpindah-pindah menurut hari pasarnya. Perpindahan pasar ini akan menjangkau lebih banyak wilayah dan lebih banyak masyarakat yang dilayani.

Adanya pasar akan memberikan sumbangan tersendiri bagi pendapatan daerah yang bersangkutan dilihat dari aktifitas pasar yang diukur berdasarkan jumlah pedagang, jumlah kios atau los, luas areal pasar dan besarnya retribusi yang

diterima. Dengan adanya pendapatan dari besarnya retribusi akan memberikan sumbangan bagi pendapatan wilayah kecamatan. Begitu pula dengan luas areal pasar dan jumlah pedagang yang berada di pasar akan mempengaruhi besar retribusi yang dapat dikumpulkan. Besarnya pendapatan dari sektor pasar ini akan mempengaruhi perekonomian wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Analisis terhadap sistem dan peranan pasar sebagai salah satu fasilitas ekonomi dalam pembangunan wilayah pedesaan dilakukan antara lain dengan (1) memetakan pasar secara geografis untuk mengetahui penyebaran pasar di wilayah yang dianalisis dan (2) memetakan hari-hari pasar dan pergerakan pasar untuk pasar periodik.

Uji terhadap hipotesa ini dilaksanakan melalui perbandingan tabulasi terhadap pasar kecamatan contoh, kemudian dilaksanakan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan. Variabel ini menyangkut variabel yang menunjukkan aktifitas pasar.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan daerah penelitian Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama, Kabupaten Dati II Tasikmalaya mempunyai potensi sumberdaya yang sangat besar dan beragam yaitu pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, potensi laut, industri kerajinan dan pariwisata. Sehingga bila pengembangan wilayah ini direncanakan sesuai hirarkhi tata ruang akan mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih cepat.

Pertimbangan kedua, pengembangan wilayah Jawa Barat terbagi menjadi tiga wilayah pengembangan yaitu wilayah pengembangan Barat, Tengah dan Timur. Kabupaten Dati II Tasikmalaya merupakan salah satu kota penunjang dalam pengembangan Wilayah Timur, yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Jawa Barat.

Pertimbangan ketiga, walaupun relatif tidak mencolok ketimpangan struktur tata ruang wilayah masih terjadi di Kabupaten Dati II Tasikmalaya dengan kecenderungan wilayah Utara lebih berkembang dibandingkan wilayah Selatan Tasikmalaya. Karena itu memberikan pemerataan dan kemudahan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah perlu dilakukan intervensi terhadap struktur tata ruang wilayah.

Pengumpulan data dimulai pada bulan Agustus hingga September 1997.

4.2. Batasan Penelitian

Untuk keperluan analisis fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut :

- a. Dalam penelaahan hubungan pusat-periferi, hubungan antara pusat dengan pusat pada satu tingkat hirarkhi, atau pusat dengan wilayah belakang dari pusat lain, dapat diabaikan. Hal ini untuk mengisolasi pengaruh pusat lain terhadap kondisi ekonomi wilayah analisis.
- b. Batasan analisis wilayah berdasarkan konsep administrasi pemerintahan.

4.3. Metode Analisis

Untuk keperluan analisis dalam studi fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan digunakan beberapa metode analisis yaitu skalogram dan sistem limpitan sejajar. Alat analisis tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya ketimpangan dan menentukan kecamatan-kecamatan contoh yaitu dengan mengidentifikasi kecamatan maju, kecamatan berkembang, dan kecamatan kurang berkembang. Selanjutnya digunakan analisis sistem pasar untuk menganalisa sistem pasar yang ada di kecamatan contoh yang di dukung dengan menggunakan analisa tabulasi dan deskriptif.

4.3.1. Skalogram

Metode ini digunakan untuk mengetahui hirarkhi pusat pengembangan dan sarana pembangunan. Metode skalogram dapat memberi informasi tentang hirarkhi pusat-pusat pengembangan dan penyebaran fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Dalam analisis, fasilitas dibedakan menjadi fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Hal ini untuk melihat apakah kemajuan di bidang ekonomi akan diikuti kemajuan di bidang sosial atau sebaliknya.

Prasarana yang dijadikan indikator ekonomi antara lain : pasar, perusahaan, bank, koperasi, lembaga keuangan lain dll. Sedangkan fasilitas yang dapat dijadikan indikator sosial antara lain sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, puskesmas dan lain-lain.

Menurut Hanafiah (1988b), metode skalogram dapat digunakan untuk beberapa kepentingan antara lain :

- 1). Memperlihatkan hubungan dasar antara jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas pembangunan.
- 2). Dapat mengorganisasikan data mengenai wilayah.
- 3). Membandingkan antara pusat-pusat pengembangan yang ada berdasarkan fasilitas pembangunan yang dimiliki.
- 4). Menggambarkan hirarkhi pusat-pusat pengembangan.
- 5). Secara potensial dapat digunakan untuk merancang pusat-pusat pengembangan baru dan pengalokasian prasarana-prasarana pembangunan.

Sedangkan kelemahan metode skalogram adalah :

- 1). Hasil akhir dapat dipengaruhi oleh pemilihan indikator fasilitas pelayanan yang ada.
- 2). Tidak terdapat informasi tentang ukuran kondisi dan kualitas fasilitas pelayanan.
- 3). Tidak mencakup faktor-faktor lokasi tata ruang dan merupakan perhitungan yang agak kasar.

4.3.2. Sistem Limpitan Sejajar

Analisis sistem limpitan sejajar digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. .

Wilayah maju diprioritaskan karena dalam jangka pendek akan mampu meningkatkan pertumbuhan wilayah secara cepat dan mampu memberikan pelayanan bagi perkembangan wilayah-wilayah belakangnya. Sedangkan wilayah kurang berkembang diprioritaskan dengan pertimbangan sosial, politik yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Wilayah berkembang diprioritaskan karena wilayah ini mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatannya sendiri dan akan mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya.

Pengkategorian wilayah ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui potensi sumberdaya wilayah melalui analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah, yang dipadukan dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi melalui analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi. Langkah-langkah metode analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6. Wilayah kurang berkembang adalah wilayah yang mempunyai peringkat bawah dalam hirarkhi potensi sumberdaya dan mempunyai peringkat bawah pada hirarkhi fasilitas sosial ekonomi. Wilayah berkembang adalah wilayah yang menempati peringkat tengah dalam hirarkhi potensi sumberdaya dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi, dan memiliki potensi pengembangan. Wilayah maju adalah wilayah yang menempati peringkat tinggi pada hirarkhi potensi sumberdaya dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi.

4.3.3. Analisis Sistem Pasar

Analisis sistem pasar dalam tata ruang wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya dilaksanakan dengan menelaah kegiatan pasar dan lokasi pasar dalam tata ruang wilayah kecamatan contoh.

Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis sistem pasar meliputi :

- a. Melakukan inventarisasi kegiatan pasar pada kecamatan contoh. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan disertai dengan wawancara dengan petugas dinas pasar, aparat kecamatan dan didukung dengan wawancara dengan pelaku pasar dalam hal ini pedagang.
- b. Menunjukkan hari-hari pasar dan mengukur kegiatan pasar yang dilakukan melalui pengukuran variabel-variabel yang menunjukkan aktifitas pasar meliputi jumlah pedagang, jenis pedagang, jumlah kios atau los, luas areal pasar dan besarnya retribusi yang diterima.
- c. Membandingkan variabel-variabel aktifitas pasar antara kecamatan contoh. Hal ini untuk mengetahui aktifitas pasar yang dihubungkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani di kecamatan contoh. Analisis perbandingan ini dilakukan dengan analisis tabulasi sederhana dan analisis deskriptif.

4.4. Metode Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

Pengumpulan data untuk keperluan analisis dilaksanakan berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Pemerintah Daerah, kantor statistik dan dinas instansi pemerintah yang terkait dan data potensi desa. Data sekunder ini diperlukan untuk analisis skalogram, analisis sistem limpitan sejajar, serta analisis tabulasi dan deskriptif. Data sekunder yang diambil meliputi data potensi sumberdaya alam, hasil pembangunan berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi dan lain-lain. Data primer digunakan sebagai pelengkap data sekunder terutama dalam analisis sistem pasar. Sampel untuk data primer adalah pedagang dalam wilayah kecamatan contoh.

Pemilihan sampel dilakukan sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan pada tiga kecamatan yang mewakili kecamatan maju, berkembang dan kecamatan kurang berkembang, dengan mengeluarkan

kecamatan yang berada pada wilayah kota administratif Kabupaten Dati II Tasikmalaya dari analisis. Pengecualian kecamatan pada daerah administratif Tasikmalaya dilakukan karena kecamatan di wilayah ini mempunyai aksesibilitas terhadap kota kabupaten yang sangat besar dan pengaruh pertumbuhan kota kabupaten sangat tinggi, sehingga bila dianalisis akan menimbulkan bias yang besar.

- b. Pemilihan kecamatan contoh dilakukan dengan analisis skalogram dan analisis sistem limpitan sejajar. Variabel yang digunakan adalah variabel fasilitas sosial dan ekonomi pada wilayah kecamatan, dengan tiga pengklasifikasian yaitu kecamatan maju, kecamatan berkembang dan kecamatan kurang berkembang.
- c. Kecamatan contoh diambil dari kecamatan yang tergolong maju, berkembang dan kurang berkembang. Pertimbangannya untuk melihat perbedaan fungsi kota kecamatan sampel tersebut.
- d. Di ketiga kecamatan contoh tersebut kemudian diterapkan metode analisis seperti yang dikemukakan di atas.
- e. Pemilihan responden untuk data primer dilakukan dengan metode stratifikasi acak. Sampel diambil dari setiap pasar kecamatan contoh dengan jumlah sampel responden ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pedagang yang ada di pasar.
- f. Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis dilaksanakan dengan menghitung koefisien korelasi antara variabel hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, melalui metode *Rank Spearman*.

Notasi matematis dari uji korelasi Spearman dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$R_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n d_i^2}{n \times (n^2 - 1)}$$

dimana : R_s : nilai koefisien korelasi

d_i : selisih peringkat

n : ukuran populasi

Uji dilaksanakan dengan membandingkan angka yang dihasilkan dengan nilai kritis dari tabel korelasi Spearman. Nilai interval untuk uji korelasi Spearman adalah $-1 < R_s < 1$. Jika nilai R_s lebih besar dari nilai kritis maka terbukti terdapat korelasi yang nyata antara variabel yang dianalisis. Hasil penelitian ini dituangkan dalam laporan tertulis.

4.5. Definisi Operasional

- a. Kota kecamatan adalah desa tempat pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada.
- b. Pasar adalah tempat atau lokasi dimana barang dan jasa ditransaksikan antara penjual dan pembeli.
- c. Aktifitas pasar adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi pada lokasi pasar. Variabel yang digunakan untuk mengukur aktifitas pasar meliputi frekuensi kegiatan pasar, luas areal pasar, jumlah kios atau jumlah los, jumlah pedagang, dan besar retribusi.
- d. Peringkat dari masing-masing observasi ditentukan melalui skor, dengan skor terbesar menempati peringkat pertama dan seterusnya. Jika ada dua observasi atau lebih yang memiliki skor yang sama, maka peringkat dari observasi tersebut adalah sama.

V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Dati II Tasikmalaya secara geografis terletak diantara $7^{\circ} 02'$ dan $7^{\circ} 49'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 97'$ dan $108^{\circ} 25'$ Bujur Timur dibatasi dengan wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Majalengka dan Ciamis.
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Garut.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Ciamis.
- d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Kabupaten Dati II Tasikmalaya memiliki luas wilayah 2741.14 kilometer persegi, terdiri dari satu wilayah kota administratif, delapan wilayah pembantu bupati, 30 wilayah kecamatan (terjadi perubahan kecamatan pada tahun 1993 dari 28 buah menjadi 30 buah), 17 perwakilan kecamatan (kemantren), 397 desa dan 15 kelurahan. Jarak antar kecamatan dan skalogram Kabupaten Dati II Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel lampiran 1 dan 2.

Faktor iklim, diantaranya curah hujan rata-rata pertahun mencapai 2 300 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember dengan pergantian musim berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan Mei musim hujan, bulan Juni sampai bulan September musim kemarau. Kondisi yang demikian berpengaruh terhadap keadaan temperatur normal rata-rata yang berkisar antara 20°C sampai 34°C .

Wilayah Tasikmalaya Utara memiliki kesuburan tanah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah Tasikmalaya Selatan. Hal ini dimungkinkan karena besarnya potensi pertanian lahan basah dan perkebunan. Di bagian wilayah selatan Tasikmalaya memiliki sebaran potensi pengembangan pertanian lahan kering,

disamping pertambangan dan pariwisata. Selain itu Kabupaten Dati II Tasikmalaya berpotensi di bidang kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat yang sudah berorientasi di pasar ekspor.

Kawasan lindung yang dicirikan kawasan hutan, sampai akhir Pembangunan Jangka Panjang I telah dikukuhkan seluas 15.53 persen dari luas Wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya, yang terdiri dari 17.88 persen hutan lindung dan 82.12 persen hutan produksi dengan areal hutan cadangan seluas 10 666 hektar.

Kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan perkotaan (non pertanian) dan kawasan pedesaan (pertanian) telah tumbuh dengan pesat. Perkembangan kawasan perkotaan ini terutama terjadi pada kota-kota kecamatan yang dilalui jalur-jalur jalan regional yang memiliki daya hubung yang cukup tinggi, seperti Indihiang, Rajapolah, Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Karangnunggal, Bantarkalong, dan Cipatujah. Dominasi kegiatan pada kota-kota ini berkisar pada kegiatan permukiman, pariwisata, serta jasa perdagangan atau industri kecil dan kerajinan rakyat.

5.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 1996, penduduk Kabupaten Dati II Tasikmalaya sebanyak 1 896 546 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun 0.26 persen. Dari sejumlah penduduk di atas, jumlah rumah tangga sebanyak 466 610 rumah tangga dengan rata-rata kepadatan penduduk perkilometer persegi sebesar 692 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Cihideung sebesar 11 740 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pancatengah sebesar 182 jiwa/km².

Kabupaten Dati II Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk yang masih tergolong tinggi dengan penyebarannya yang tidak merata. Penyebaran jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.

Dari tabel ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensifikasi kegiatan yang ada. Pada kecamatan yang padat penduduknya, kegiatan ekonomi penduduknya relatif berkembang. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah umumnya didominasi oleh kegiatan pertanian. Penyebaran penduduk yang tidak merata disebabkan juga oleh keragaman dalam kondisi geografis dan potensi sumberdaya, dimana bagian wilayah utara Tasikmalaya memiliki kesuburan tanah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah selatan Tasikmalaya.

Struktur demografi usia kerja di Kabupaten Dati II Tasikmalaya tergolong ke dalam kelompok umur muda dengan jumlah pencari kerja 7 989 orang dan yang berhasil mendapat pekerjaan hanya 1 730 orang atau 21.65 persen. Pencari kerja selama tahun 1995 menurut tingkat pendidikan adalah lulusan SLTA sebanyak 5 277 orang atau 66.05 persen, diikuti lulusan perguruan tinggi baik sarjana atau sarjana muda sebanyak 1 582 orang atau 19.80 persen sedangkan lulusan SLTP berjumlah 551 orang atau 6.90 persen, lulusan SD dan yang tidak tamat sekolah dasar berjumlah 579 orang atau 7.29 persen. Dilihat dari komposisi penyebaran angkatan kerja di Kabupaten Dati II Tasikmalaya sebagian besar berpusat pada daerah di luar kota administratif Tasikmalaya, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara keseluruhan sebesar 54.48 persen dimana lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 44.50 persen.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1996

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk jiwa per km ²
1.	Cipatujah	242.65	54 612	225
2.	Karangnunggal	136.10	70 705	520
3.	Cikalong	136.96	50 974	372
4.	Pancatengah	199.05	36 233	182
5.	Cikatomas	132.63	36 797	277
6.	Cibalong	105.58	52 120	494
7.	Bantarkalong	152.76	64 593	423
8.	Bojonggambir	148.36	33 015	223
9.	Sodonghilir	97.11	51 369	529
10.	Taraju	55.53	32 281	581
11.	Salawu	83.66	78 061	933
12.	Sukaraja	43.14	39 918	925
13.	Tanjungjaya	36.37	35 734	983
14.	Salopa	198.17	84 359	426
15.	Cineam	125.54	42 307	337
16.	Manonjaya	71.80	68 985	961
17.	Cibeureum	64.12	111 916	1745
18.	Kawalu	64.80	122 696	1893
19.	Singaparna	61.05	113 500	1859
20.	Cigalontang	119.13	58 860	494
21.	Leuwisari	115.60	91 388	791
22.	Indihiang	63.51	97 364	1533
23.	Cisayong	72.13	70 061	971
24.	Rajapolah	15.38	37 250	2422
25.	Jamanis	14.99	31 170	2079
26.	Ciawi	85.49	77 592	908
27.	Pagerageung	80.76	72 721	900
28.	Cipedes	8.14	60 831	7473
29.	Cihideung	5.30	62 223	11740
30.	Tawang	5.33	56 911	10677
	Tasikmalaya	2741.14	1 896 546	692

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996e

5.3. Struktur Perekonomian Wilayah

Struktur perekonomian suatu daerah secara kuantitatif dapat digambarkan dengan besarnya persentase peranan nilai tambah dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Pembagian lapangan usaha PDRB Kabupaten Dati II Tasikmalaya menurut sifatnya dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu :

- a. **Sektor Primer** adalah sektor yang hanya memanfaatkan sumber alam atau bahan-bahan yang sudah ada tanpa proses lebih lanjut. Sektor ini terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalan.
- b. **Sektor sekunder** adalah sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder itu sendiri menjadi bahan lebih tinggi nilainya. Sektor ini terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan/konstruksi.
- c. **Sektor tersier** adalah sektor yang tidak memproduksi bahan fisik, melainkan hanya bidang jasa. Sektor ini terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya atas dasar harga berlaku tahun 1995 mencapai 2 365.4 milyar rupiah, lebih besar dibanding dengan angka tahun 1994 yang hanya mencapai 2 003.6 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 1995 sebesar 1 949.7 milyar rupiah juga lebih besar dari tahun 1994 yang mencapai 1 814.5 milyar rupiah. Kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 1993 suatu ciri bahwa semua sektor berkembang sesuai dengan adanya pembangunan di berbagai bidang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2, disajikan atas dasar

harga konstan karena lebih mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan harga yang biasanya cenderung terus naik. PDRB atas dasar harga konstan lebih mencerminkan kenaikan secara nyata.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993, Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1993 - 1995, Menurut Sektor (Juta Rupiah)

No	Sektor	1993	1994	1995
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	478 780.37	513 875.40	550 520.26
2.	Pertambangan dan Penggalian	5 529.96	5 935.62	3 530.94
3.	Industri Pengolahan	146 197.74	152 872.74	159 449.10
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	8 494.35	8 932.03	8 884.09
5.	Bangunan / Konstruksi	201 021.37	218 549.80	255 273.76
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	384 020.07	402 993.55	432 738.86
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	93 542.09	100 060.27	114 558.66
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	111 002.85	121 246.43	122 182.63
9.	Jasa-jasa	282 289.43	290 021.05	302 571.95
Produk Domestik Regional Bruto		1 710 878.23	1 814 486.89	1 949 710.25

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996a

Sektor yang paling mencolok adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor ini paling dominan dan yang terbesar dibanding sektor lainnya, atas dasar harga konstan 1993 sebesar 513.9 milyar rupiah pada tahun 1994 menjadi 550.5 milyar rupiah di tahun 1995, selain merupakan sektor yang paling dominan, sektor ini terus mengalami kenaikan yang cukup berarti, suatu ciri

bahwa sebagian besar masyarakat Tasikmalaya masih tergantung dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, juga masih layak disebut daerah agraris.

Selain layak disebut daerah agraris, juga sebagai daerah perdagangan, karena sebagian masyarakat Kabupaten Dati II Tasikmalaya merupakan pedagang yang ulet. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menduduki peringkat berikutnya, atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 1994 sebesar 403.0 milyar rupiah menjadi 433.0 milyar rupiah pada tahun 1995.

Laju Pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Dati II Tasikmalaya antara tahun 1994-1995, atas dasar harga konstan 1993 sebesar 7.45 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan di tahun 1994 yang mencapai 6.06 persen. Selanjutnya atas dasar harga berlaku laju pertumbuhan pada tahun 1995 mencapai 18.06 persen lebih tinggi bila dibandingkan tahun 1994 yang mencapai 17.11 persen. Suatu ciri bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Dati II Tasikmalaya dari tahun 1994 ke tahun 1995. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dati II Tasikmalaya tahun 1994-1995 atas dasar harga konstan 1993, secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran 3.

Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten Dati II Tasikmalaya atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 sebesar 1 266 818 rupiah menunjukkan kenaikan yang cukup berarti sebesar 188 374 rupiah atau naik sebesar 14.87 persen, sedangkan tahun 1994 sebesar 1 078 444 rupiah. Kenaikan sebesar itu dengan dasar harga berlaku kurang mencerminkan adanya kenaikan daya beli

masyarakat karena dalam kenaikan PDRB tersebut masih terkandung kenaikan harga.

Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga konstan lebih mencerminkan adanya perubahan daya beli masyarakat, karena tidak dipengaruhi kenaikan harga. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 1995 sebesar 1 044 189 rupiah, terjadi kenaikan sebesar 67 529 rupiah atau sebesar 6.47 persen. Adanya kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 1993 merupakan suatu ciri bahwa pendapatan masyarakat meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan di segala sektor.

5.3.1. Sektor Primer

Struktur perekonomian Kabupaten Dati II Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir tidak begitu banyak mengalami pergeseran. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih dominan dibanding sektor yang lainnya dan kelihatan masih menjadi unggulan mata pencaharian masyarakat, kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 1995 sebesar 28.53 persen, angka paling tinggi dibanding sektor yang lainnya. Kontribusinya lebih besar dibanding tahun 1993 maupun 1994 yang masing-masing sebesar 27.98 persen dan 28.38 persen, sub sektor tanaman bahan makanan paling besar sumbangannya pada sektor ini, yaitu sebesar 19.98 persen, menandakan dengan jelas bahwa Kabupaten Dati II Tasikmalaya masih daerah agraris. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang hanya 0.17 persen.

5.3.2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder memberikan kontribusi terhadap perhitungan PDRB di bawah 10 persen kecuali untuk sektor bangunan atau konstruksi yang mencakup kegiatan

pembangunan fisik, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya. Kontribusi sektor ini terhadap penghitungan PDRB sebesar 12.60 persen, lebih besar bila dibandingkan dengan keadaan tahun 1993 maupun tahun 1994, masing-masing sebesar 11.75 persen dan 11.63 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Dati II Tasikmalaya tahun 1993 - 1995 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1993 - 1995, Menurut Sektor

No	Sektor	1993	1994	1995
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	27.98	28.38	28.53
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.32	0.33	0.17
3.	Industri Pengolahan	8.55	8.27	7.97
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.50	0.48	0.43
5.	Bangunan / Konstruksi	11.75	11.63	12.60
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.45	23.17	23.71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.47	5.59	5.55
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.49	6.62	5.99
9.	Jasa-jasa	16.50	15.54	15.04
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996a

Sektor listrik, gas dan air bersih kontribusinya sebesar 0.43 persen. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan sebesar 7.97 persen, sektor ini mencakup sub sektor industri tanpa migas terdiri dari industri besar dan sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Sektor industri pengolahan di Kabupaten

Dati II Tasikmalaya belum mampu menggeser sektor pertanian. Dibandingkan tahun 1993 maupun 1994 yang kontribusinya masing-masing mencapai 8.55 persen dan 8.27 persen, kontribusi sektor industri pada tahun 1995 mengalami penurunan.

5.3.3. Sektor Tersier

Sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya terhadap PDRB mencapai 23.71 persen, lebih tinggi dibanding tahun 1993 dan 1994 masing-masing sebesar 22.45 persen dan 23.17 persen. Sub sektor perdagangan memberikan kontribusi paling besar yaitu 16.81 persen diikuti sub sektor restoran sebesar 6.65 persen dan terakhir sub sektor hotel hanya 0.25 persen.

Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 15.04 persen. Dengan kontribusi terbesar pada sub sektor jasa perorangan kemudian pemerintahan umum dan terakhir jasa hiburan, masing-masing sebesar 5.12 persen, 0.82 persen dan 0.13 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut, selain itu kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan misalnya terminal dan parkir, kegiatan pos dan giro serta jaringan telekomunikasi, kontribusinya terhadap PDRB sebesar 5.55 persen. Lebih besar dibanding dengan tahun 1993 yang sebesar 5.47 persen tapi lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 1994 yang besarnya 5.59 persen.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5.99 persen, lebih kecil dibanding dengan angka tahun 1993 maupun tahun 1994 yang masing-masing besarnya 6.49 persen dan 6.62 persen.

5.4. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Dati II Tasikmalaya

Pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Dati II Tasikmalaya pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara serta Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat, disesuaikan dengan kondisi, potensi serta aspirasi yang tumbuh dari masyarakat Tasikmalaya.

5.4.1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) adalah tercapainya kualitas masyarakat Tasikmalaya yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan yang berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam dan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya pencapaian sasaran umum PJP II diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu : (a) Ekonomi, (b) Kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, (c) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, (d) Ilmu pengetahuan dan Teknologi, (e) Hukum, (f) Politik, aparatur pemerintah, penerangan, komunikasi dan media massa, dan (g) Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Titik berat PJP II Kabupaten Dati II Tasikmalaya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat, diletakkan pada bidang ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan dengan bidang-bidang lainnya.

5.4.2. Kebijakan Tata Ruang Daerah

Kabupaten Dati II Tasikmalaya sebagai sub sistem dari sistem nasional dalam melaksanakan pembangunan harus memelihara keserasian dan integritasnya dengan wilayah-wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam setiap kegiatan pembangunan daerah selain mempertimbangkan kepentingan sektoral, diperhatikan juga kondisi, potensi dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, dalam wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya diusahakan agar pertumbuhan antar wilayah-wilayah bagiannya dapat serasi sehingga dapat memperkecil perbedaan antar wilayah. Untuk itu wilayah-wilayah yang terbelakang mendapat prioritas pengembangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang terdapat di wilayah yang bersangkutan.

Kebijakan tata ruang daerah dilakukan dengan membagi daerah Kabupaten Dati II Tasikmalaya menjadi beberapa Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang bertujuan :

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi dalam suatu SWP dan antar SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah dapat diperkecil.
- b. Mengusahakan dan mengerahkan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi, potensi dan fungsi yang ada di masing-masing SWP.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar SWP yang saling menguntungkan sehingga terwujud struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah minus dan kawasan kritis oleh kegiatan pembangunan.

Berdasarkan analisis keterkaitan fungsional dan hasil kajian terhadap potensi pusat-pusat pertumbuhan, aksesibilitas serta homogenitas wilayah, di Kabupaten Dati II Tasikmalaya terdapat enam Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu :

1). Sub Wilayah Pembangunan Tasikmalaya

Meliputi kecamatan-kecamatan wilayah kota administratif Tasikmalaya (Kecamatan Cipedes, Cihideung, dan Tawang), Kecamatan Cibeureum, Kawalu dan Indihiang dengan pusatnya Kota Tasikmalaya. Potensi pengembangan SWP ini adalah sebagai pusat perdagangan, jasa , industri kecil kerajinan rakyat, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, dan pusat pelayanan bagi seluruh Kabupaten Dati II Tasikmalaya.

2). Sub Wilayah Pembangunan Ciawi

Meliputi kecamatan-kecamatan Ciawi, Pagerageung, Jamanis, Rajapolah dan Cisayong. Pusat SWP adalah Kota Ciawi dengan potensi pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata, pengembangan agroindustri dan kerajinan rakyat, perikanan air tawar, intensifikasi pertanian, penambangan galian golongan C, pengembangan peternakan sapi perah di Kecamatan Pagerageung, dan perkebunan teh di Kecamatan Cisayong dan Pagerageung.

3). Sub Wilayah Pembangunan Singaparna

Pusat SWP adalah kota Singaparna meliputi kecamatan-kecamatan Singaparna, Leuwisari, Cigalontang, Salawu, Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir, Sukaraja dan Tanjung Jaya. Potensi pengembangan yang dimiliki berupa pengembangan perikanan air tawar, perkebunan besar the, pengembangan hortikultura, pariwisata cagar budaya dan kerajinan rakyat, pertambangan galian C, pengawetan hutan, tanah dan air, dan pengembangan ternak besar.

4). **Sub Wilayah Pembangunan Bantarkalong**

Meliputi kecamatan-kecamatan Bantarkalong, Cibalong, Karangnunggal dan Cipatujah, yang mempunyai potensi pariwisata pantai, perkebunan besar karet, intensifikasi lahan kering, ekstensifikasi lahan basah, perikanan laut dan air payau. pertambangan galian C dan pengembangan ternak besar. Pusat pengembangan di kota Bantarkalong.

5). **Sub Wilayah Pembangunan Manonjaya**

Meliputi kecamatan-kecamatan Manonjaya, Cineam, dan Salopa dengan potensi pengembangan yaitu intensifikasi pertanian, unggas dan ternak kecil, pengembangan hortikultura, pengembangan pertanian lahan kering, dan pengawetan hutan di daerah Kecamatan Salopa dan Kecamatan Cineam. Kota Manonjaya menjadi pusat pengembangannya.

6). **Sub Wilayah Pembangunan Cikatomas**

Pusat SWP adalah Kota Cikatomas dengan potensi pengembangan pariwisata alam pantai, perikanan laut dan air payau, pengembangan tanaman kelapa, pengembangan ternak besar, pertambangan dan ekstensifikasi lahan basah serta intensifikasi lahan kering. SWP Cikatomas meliputi kecamatan-kecamatan Cikatomas, Pancatengah dan Cikalong.



VI. POTENSI SUMBERDAYA DAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA

Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi lokasi wilayah yang bersangkutan. Perbedaan potensi sumberdaya alam dan aksesibilitas terhadap kota menimbulkan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Berkaitan dengan hal ini, maka akan terdapat wilayah kaya, wilayah sedang, dan wilayah miskin.

Wilayah miskin dikembangkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan wilayah lainnya dan lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pengembangan wilayah kaya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang melalui pengimbasan pembangunan. Sedangkan wilayah yang mempunyai potensi sedang didorong agar mampu berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan pemanfaatan sumberdaya secara optimal.

6.1. Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah

Analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah menggunakan wilayah kecamatan sebagai satuan wilayah analisis. Kabupaten Dati II Tasikmalaya terbagi ke dalam 30 kecamatan, tiga kecamatan diantaranya terletak di wilayah Kota Administratif Tasikmalaya, sehingga ketiga kecamatan ini dikeluarkan dari analisis. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cipedes, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Tawang.

Berdasarkan hasil analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah, maka kecamatan-kecamatan dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah

kaya, wilayah sedang dan wilayah miskin. Pengelompokan ini didasarkan atas tingkat pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, wilayah kaya adalah kecamatan yang mempunyai skor 88 - 146, wilayah sedang skor 147 - 205 dan wilayah miskin memiliki skor 206 - 264. Sektor-sektor yang digunakan sebagai dasar analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan dan energi, kependudukan, sektor perdagangan dan jasa.

Komponen sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, dilihat dari luas lahan yang ditanami tanaman pangan seperti padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedelai yang dimiliki masing-masing kecamatan. Sedangkan sub sektor hortikultura meliputi tanaman jambu, sawo, pisang, alpukat, mangga, durian, salak dan manggis.

Sub sektor perkebunan meliputi perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara dan perkebunan rakyat. Dengan jenis tanaman diantaranya karet, kelapa, kopi, dan lain-lain. Sub sektor peternakan dilihat dari banyaknya ternak yang ada, dibedakan menjadi ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, peternakan unggas dan kelinci.

Komponen sub sektor perikanan dilihat dari jumlah produksinya dan dibedakan menjadi enam jenis kegiatan usaha yaitu penangkapan ikan di laut, kolam, tambak, sawah, kolam air deras dan penangkapan di perairan umum. Produksi ikan laut terdiri atas kakap merah, tenggiri, tongkol, udang karang, pari dan ikan-ikan lain. Sedangkan perikanan darat meliputi produksi ikan mas, gurame, mujair, nila dan lain-lain. Sektor pertanian didukung oleh luas pelayanan irigasi teknis dan non teknis di masing-masing kecamatan.

Komponen sektor industri meliputi jumlah unit usaha pada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang dan industri besar. Indikator untuk empat jenis industri tersebut berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Untuk industri rumah tangga tenaga kerja yang terserap 1 - 4 orang, industri kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 5 - 19 orang dengan jenis industri kerajinan bambu, pengolahan gula kelapa, industri tahu tempe, bata merah, kelom dan pandai besi. Sedangkan industri sedang menyerap tenaga kerja sebanyak 20 - 99 orang terdiri atas industri pengolahan kayu, konveksi, pabrik genteng dan tegel, pabrik kompor dan tepung tapioka. Terakhir adalah industri besar yang bertenaga kerja 100 orang atau lebih. Sektor kependudukan didasarkan atas kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan.

Sektor pertambangan dan energi, perdagangan dan jasa diukur dari sumbangannya terhadap produk domestik Kabupaten Dati II Tasikmalaya yang menunjukkan tingkat pemanfaatan pada saat ini.

6.1.1. Wilayah Kaya

Berdasarkan hasil hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dengan komponen seperti yang dikemukakan di atas, 51.85 persen wilayah kecamatan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya tergolong ke dalam wilayah yang memiliki potensi sumberdaya yang kaya, wilayah sedang 22.22 persen dan 25.92 persen tergolong wilayah miskin. Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kaya adalah Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Salawu, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Salopa dan Kecamatan Bantarkalong.

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah kecamatan yang mempunyai skor antara 88 sampai dengan 146 pada hirarkhi potensi sumberdaya wilayah.

Kecamatan Leuwisari yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Dati II Tasikmalaya memiliki potensi terutama pada sektor perikanan, peternakan dan irigasi. Unggulnya kecamatan Leuwisari pada sektor perikanan karena tingginya produksi ikan yang diperoleh dari kolam dan sawah. Besarnya luas lahan sawah yang beririgasi menyebabkan tingginya produksi tanaman pangan, yaitu terletak pada peringkat empat. Sedangkan sub sektor peternakan yang menjadi unggulan adalah peternakan unggas.

Sektor perekonomian yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Singaparna adalah sektor perdagangan, sektor jasa dan kependudukan. Khusus Kecamatan Cibeureum mempunyai jenjang pertama pada sektor industri. Sektor lain yang juga potensial adalah sektor peternakan dan sektor perikanan.

Kecamatan Karangnunggal dan Kecamatan Cibalong yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Dati II Tasikmalaya mempunyai potensi pengembangan pada sektor pertambangan, peternakan berupa peternakan unggas dan domba. Sektor lainnya yaitu sektor hortikultura dengan jenis komoditi unggulan seperti rambutan, durian, manggis, dan mangga. Sektor perkebunan berupa perkebunan besar swasta untuk karet di Kecamatan Karangnunggal dan perkebunan kelapa pada perkebunan rakyat. Sedangkan di Kecamatan Cibalong perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa, teh, dan cengkeh.

Sektor yang potensial dikembangkan di Kecamatan Indihiang adalah sektor pertambangan, peternakan khususnya peternakan unggas, sektor perikanan dengan kegiatan usaha di kolam kemudian sektor jasa dan perdagangan. Potensi

sektor perdagangan dan jasa ini didukung oleh letak Kecamatan Indihiang yang dilalui jalur-jalur jalan regional yang memiliki daya hubung cukup tinggi.

Potensi utama yang dimiliki Kecamatan Manonjaya adalah sektor hortikultura terutama buah salak yang luas tanamnya mencapai 4 414 hektar, kemudian sektor industri dan perdagangan. Sedangkan Kecamatan Salopa mempunyai potensi di sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan khususnya perkebunan karet di perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Pagerageung mempunyai potensi utama di sektor industri kemudian sektor pertambangan, sektor tanaman pangan berupa padi sawah dan didukung oleh sektor irigasi yang cukup baik, menempati peringkat delapan. Sektor perikanan di Kecamatan Cisayong juga berpotensi untuk dikembangkan terutama ikan dari kolam sedangkan di Kecamatan Pagerageung sektor lain yang potensial adalah sektor peternakan pada peternakan ayam buras, ayam broiler pedaging dan domba.

Sektor tanaman pangan menjadi sektor yang paling potensial di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Bantarkalong terutama untuk produksi padi sawah dan ubi kayu. Sektor hortikultura juga berpotensi untuk dikembangkan di dua kecamatan ini terutama komoditi jambu, alpukat, mangga, durian, rambutan dan salak. Potensi kedua sektor tersebut didukung oleh sektor irigasi yang baik. Pelayanan irigasi berupa irigasi teknis dan non teknis mencapai keseluruhan lahan yang diusahakan untuk lahan sawah.

Kecamatan Salawu merupakan kecamatan terakhir yang termasuk kedalam wilayah kaya, sektor perekonomian yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor industri, sektor lain relatif mempunyai potensi yang sama karena berada pada

peringkat yang sama, yaitu sub sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, sektor perdagangan dan sektor irigasi.

6.1.2. Wilayah Sedang

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi wilayah sedang meliputi Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Cikatomas. Kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai skor antara 147 - 205 dan mencakup 22.22 persen dari jumlah kecamatan yang dianalisis melalui hirarkhi potensi sumberdaya wilayah.

Potensi wilayah Kecamatan Cigalontang terutama pada sektor perdagangan dan sektor perikanan terutama untuk kegiatan usaha kolam dan sawah. Selain itu sektor pertanian untuk tanaman pangan juga berpotensi untuk dikembangkan karena ketersediaan sarana irigasi yang baik dengan keseluruhan lahan sawah yang ada mendapat layanan irigasi, baik irigasi teknis maupun non teknis. Sektor irigasi menempati jenjang ke dua dari seluruh kecamatan yang ditelaah.

Kecamatan Cikalong dilihat dari letak geografisnya merupakan kecamatan yang paling rendah, ketinggian dari permukaan laut hanya 25 meter. Potensi pengembangan pada sektor perkebunan terutama perkebunan rakyat dengan jenis tanaman cengkeh, kapul, pandan, kopi, dan kelapa. Sektor hortikultura dan pertambangan galian C juga berpotensi untuk dikembangkan.

Kecamatan Cipatujah sama halnya dengan Kecamatan Cikalong, letak geografisnya hanya 53 m dpl dengan potensi pengembangan pada sektor perkebunan, baik berupa perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat atau perkebunan besar. Komoditi yang diusahakan adalah karet, kelapa, kopi, cengkeh, teh, dan lain-lain. Sektor hortikultura juga potensial dikembangkan dengan luas tanam terbesar pada tanaman mangga kemudian pisang, manggis dan alpukat.

Sektor lain yang potensial adalah sektor pertambangan dan industri. Sektor perikanan walaupun hanya menempati jenjang ke 21 dari 27 kecamatan yang ditelaah namun mempunyai kekhususan, karena hanya pada kecamatan ini produksi ikan laut ditemui. Hal ini disebabkan letak kecamatan yang strategis berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sektor perikanan khususnya produksi ikan laut menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Di Kecamatan Sodonghilir sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor tanaman pangan, sektor perkebunan berupa perkebunan rakyat dengan komoditi teh, cengkeh, kelapa dan kopi. Sektor hortikultura dan peternakan juga potensial untuk dikembangkan terutama peternakan ayam buras dan domba.

Potensi wilayah Kecamatan Cikatomas yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor perkebunan yang terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat dengan komoditi karet, kelapa, jambu mete, kapul, kopi, cengkeh dan kapuk. Sektor lainnya yang potensial adalah sektor pertambangan dan peternakan.

Potensi utama yang dimiliki oleh Kecamatan Cineam adalah sektor hortikultura dengan produksi utamanya salak kemudian pisang, rambutan, jambu dan mangga. Sektor tanaman pangan dan perkebunan juga potensial untuk dikembangkan berupa perkebunan besar swasta untuk komoditi karet, perkebunan rakyat untuk komoditi kelapa, aren, cengkeh, kopi dan lada.

6.1.3. Wilayah Miskin

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang relatif rendah meliputi Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Taraju, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Bojunggambir dan Kecamatan Jamanis. Kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai skor 206 - 264 dan mencakup 25.92 persen dari jumlah kecamatan yang ditelaah. Sebagian

besar sektor yang dijadikan indikator dalam analisis potensi sumberdaya, menempati jenjang bawah kecuali untuk sektor kependudukan di Kecamatan Rajapolah dan Jamanis yang menempati urutan satu dan dua. Selengkapnya hasil analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dapat ditelaah pada tabel 4.

Bila diamati, pada umumnya kecamatan yang tergolong wilayah kaya mempunyai peringkat sektor perdagangan dan jasa yang baik. Didukung pula oleh sektor pertanian yang baik. Bila pengamatan didasarkan pada letak geografis wilayah, maka terlihat bahwa kecamatan-kecamatan yang tergolong kecamatan dalam wilayah kaya, mayoritas terletak di Tasikmalaya Utara sedangkan kecamatan miskin mayoritas terletak di Tasikmalaya Selatan kecuali Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Jamanis. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang masuk kategori sedang relatif tersebar merata dengan empat kecamatan di Tasikmalaya Selatan dan dua kecamatan di Tasikmalaya Utara.

Untuk mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya di masing-masing kecamatan diperlukan penyediaan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi, lembaga keuangan, dan lembaga pelatihan. Pemanfaatan potensi yang ada secara optimal akan mendukung pertumbuhan wilayah yang lebih cepat. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi antar wilayah maka dilaksanakan analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Hasil analisis tersebut akan dipadukan dengan analisis potensi sumberdaya akan diketahui penyebaran fasilitas sosial ekonomi antar kecamatan.

Tabel 4 Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Tahun 1997

NO	KECAMATAN	T	P	H	P	P	P	I	I	K	P	P	J	T	P	D
		A	A	O	E	E	E	R	N	E	E	E	A	O	E	E
		N	N	R	R	T	R	I	D	P	R	R	S	T	R	S
		A	G	T	K	E	I	G	U	E	T	D	A	A	I	K
		M	A	I	E	R	K	A	S	N	A	A		L	N	R
		A	N	K	B	N	A	S	T	D	M	G			G	I
		N		U	U	A	N	I	R	U	B	A			K	P
				L	N	K	A		I	D	A	N			A	S
				T	A	A	N			U	N	G			T	I
				U	N	N				K	G	A				
				R						A	A	N				
				A						N	N					
1	CIPATUJAH	15	3	1	23	21	23	12	25	6	20	17	166	17	SEDANG	
2	KARANGNUNGGAL	11	5	8	4	14	21	6	18	1	16	6	110	7	KAYA	
3	CIKALONG	20	7	3	20	17	25	9	22	8	18	14	163	16	SEDANG	
4	PANCATENGAH	14	19	13	14	27	13	24	27	14	22	23	210	21	MISKIN	
5	CIKATOMAS	23	18	2	15	23	18	16	24	10	23	22	194	20	SEDANG	
6	CIBALONG	17	6	6	2	13	19	7	17	3	9	13	112	8	KAYA	
7	BANTARKALONG	1	9	10	22	9	11	15	20	23	10	16	146	14	KAYA	
8	BOJONGGAMBIR	18	24	7	24	26	12	25	26	25	19	26	232	25	MISKIN	
9	SODONGHILIR	9	15	11	16	19	17	21	16	21	17	20	182	18	SEDANG	
10	TARAJU	21	17	15	21	18	16	23	15	22	21	25	214	23	MISKIN	
11	SALAWU	8	12	14	8	8	9	4	12	24	8	11	118	10	KAYA	
12	SUKARAJA	24	11	24	19	20	24	19	13	12	25	21	212	22	MISKIN	
13	TANJUNGGAL	25	14	27	12	25	20	18	9	20	27	24	221	24	MISKIN	
14	SALOPA	5	4	4	17	22	14	10	21	19	15	9	140	13	KAYA	
15	CINEAM	19	2	5	27	10	22	11	23	4	12	19	154	19	SEDANG	
16	MANONJAYA	22	1	9	13	16	15	2	8	18	5	12	121	11	KAYA	
17	CIBEUREUM	13	13	12	11	5	10	1	4	13	2	4	88	1	KAYA	
18	KAWALU	3	16	22	7	6	6	8	5	16	3	3	95	3	KAYA	
19	SINGAPARNA	7	23	21	5	2	4	17	3	11	1	1	95	3	KAYA	
20	CIGALONTANG	10	20	20	10	7	2	22	19	15	7	18	150	15	SEDANG	
21	LEUWISARI	4	21	16	1	1	1	14	14	5	6	5	88	1	KAYA	
22	INDIHIANG	16	26	23	3	3	3	13	6	2	4	2	101	5	KAYA	
23	CISAYONG	6	22	18	9	4	5	3	7	7	14	10	105	6	KAYA	
24	RAJAPOLAH	26	25	25	26	12	26	27	1	25	24	15	232	25	MISKIN	
25	JAMANIS	27	27	26	25	24	27	26	2	25	26	27	262	27	MISKIN	
26	CIAWI	2	8	19	18	11	7	20	10	17	13	7	122	12	KAYA	
27	PAGERAGEUNG	12	10	17	6	15	8	5	11	9	11	8	112	8	KAYA	

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996e (diolah)

Catatan :

Wilayah Kaya adalah kecamatan yang memiliki skor 88 - 146

Wilayah Sedang adalah kecamatan yang memiliki skor 147 - 205

Wilayah Miskin adalah kecamatan yang memiliki skor 206 - 264

6.2. Hirarkhi Fasilitas Sosial Ekonomi

Analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi menunjukkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi pada wilayah-wilayah yang diteliti. Indikator analisis didasarkan pada ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang terdiri dari 34 jenis fasilitas yang berbeda. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi : fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, peribadatan, pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, pelayanan pos dan telekomunikasi dan fasilitas transportasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan yang mempunyai fasilitas sosial ekonomi yang baik dengan kategori kecamatan maju terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Pagerageung. Sedangkan kategori kecamatan terbelakang sebagian besar terletak di wilayah selatan Kabupaten Dati II Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Tanjungjaya dan Kecamatan Taraju sedangkan Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Jamanis dan Kecamatan Cigalontang terletak di Tasikmalaya Utara. Kondisi ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan pembangunan yang menyangkut fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, khususnya antara wilayah Tasikmalaya Utara dengan Tasikmalaya Selatan.

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai fasilitas sosial ekonomi yang lengkap juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi cenderung terpusat pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar atau pemukiman penduduk cenderung

menempati lokasi yang strategis dari fasilitas sosial ekonomi yang ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Tahun 1997

Kecamatan	Eko nomi	Pendi dikan	Kese hatan	Fas lbadah	Pemerin tahan	Fas Umum	Telkom	Trans portasi	Total	Pering kat	Des kripsi
Cipatujah	102	134	50	20	24	15	36	20	401	21	Terblk
Karangnunggal	74	135	61	19	16	12	31	10	358	15	Sedang
Cikalong	123	108	44	13	28	10	36	17	379	16	Terblk
Pancatengah	125	110	74	14	30	12	36	27	428	24	Terblk
Cikatomas	114	101	55	25	23	27	31	16	397	19	Terblk
Cibalong	83	56	33	19	24	15	27	15	272	7	Sedang
Bantarkalong	95	57	38	10	21	12	36	19	288	12	Sedang
Bojonggambir	96	125	63	22	22	27	36	25	416	22	Terblk
Sodonghilir	125	81	63	12	29	15	36	23	384	17	Terblk
Taraju	121	157	71	26	24	27	36	26	488	27	Terblk
Salawu	68	102	30	4	14	27	31	11	287	11	Sedang
Sukaraja	92	160	67	28	24	15	22	13	421	23	Terblk
Tanjungjaya	143	99	89	23	33	15	48	22	472	25	Terblk
Salopa	112	31	43	8	17	27	31	17	286	10	Sedang
Cineam	86	119	38	24	24	10	30	6	337	14	Sedang
Manonjaya	65	61	20	15	10	13	18	5	207	5	Maju
Cibeureum	44	18	21	6	11	14	7	3	124	1	Maju
Kawalu	64	37	28	7	9	9	7	1	162	3	Maju
Singaparna	74	18	6	3	4	14	14	2	135	2	Maju
Cigalontang	128	107	41	16	23	27	31	24	397	19	Terblk
Leuwisari	99	58	38	11	14	27	19	12	278	9	Sedang
Indihiang	82	45	26	4	5	10	10	4	187	4	Maju
Cisayong	105	73	46	19	14	27	25	7	316	13	Sedang
Rajapolah	88	134	67	27	32	10	19	14	391	18	Terblk
Jamanis	119	125	71	29	32	27	56	21	480	26	Terblk
Ciawi	83	95	20	16	13	10	31	8	276	8	Sedang
Pagerageung	86	34	33	18	18	15	14	9	227	6	Maju

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996e (diolah)

Dilihat dari ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, enam kecamatan (22.22 persen) termasuk kategori kecamatan maju, sembilan kecamatan (33.33 persen) termasuk dalam kategori kecamatan sedang dan 12 kecamatan (44.44 persen) termasuk kategori kecamatan terbelakang. Dengan tersedianya sarana fasilitas sosial ekonomi yang baik diharapkan akan menunjang aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan

menggali potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Disamping ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi, hal yang menentukan adalah sumberdaya alam. Kecamatan-kecamatan yang menduduki peringkat atas adalah kecamatan yang memiliki sumberdaya alam yang besar, termasuk kategori wilayah kaya dalam analisis potensi sumberdaya wilayah. Sedangkan bila dilihat dari topografinya merupakan wilayah dataran rendah.

6.3. Hubungan Sumberdaya Wilayah dan Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah ketimpangan yang terjadi antar kecamatan dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam hipotesis penelitian bahwa kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu wilayah berpengaruh pada jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi di wilayah yang bersangkutan (hipotesis 1).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan korelasi jenjang Spearman (Rank Spearman Correlation) yang merupakan bagian dari metode statistik non parametrik. Peringkat dari variabel satu yaitu ketersediaan sumberdaya wilayah diperoleh dengan menggunakan metode hirarkhi potensi sumberdaya wilayah, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 6.1. Sedangkan peringkat variabel kedua, yaitu ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi diperoleh dengan menggunakan metode hirarkhi fasilitas sosial ekonomi seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 6.2. Perhitungan korelasi jenjang Spearman (R_s) disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan Korelasi Jenjang Spearman

No.	Kecamatan	Potensi Sumberdaya		Fasilitas Sosial Ekonomi		di	di ²
		Jumlah	Peringkat	Jumlah	Peringkat		
1.	Cipatujah	166	17	401	21	4	16
2.	Karangnunggal	110	7	358	15	8	64
3.	Cikalong	163	16	379	16	-	-
4.	Pancatengah	210	21	428	24	3	9
5.	Cikatomas	194	20	397	19	-1	1
6.	Cibalong	112	8	272	7	-1	1
7.	Bantarkalong	146	14	288	12	-2	4
8.	Bojonggambir	232	25	416	22	-3	9
9.	Sodonghilir	182	18	384	17	-1	1
10.	Taraju	214	23	488	27	4	16
11.	Salawu	118	10	287	11	1	1
12.	Sukaraja	212	22	421	23	1	1
13.	Tanjungjaya	221	24	472	25	1	1
14.	Salopa	140	13	286	10	-3	9
15.	Cineam	154	19	337	14	-5	25
16.	Manonjaya	121	11	207	5	-6	36
17.	Cibeureum	88	1	124	1	-	-
18.	Kawalu	95	3	162	3	-	-
19.	Singaparna	95	3	135	2	-1	1
20.	Cigalontang	150	15	397	19	4	16
21.	Leuwisari	88	1	278	9	8	64
22.	Indihiang	101	5	187	4	-1	1
23.	Cisayong	105	6	316	13	7	49
24.	Rajapolah	232	25	391	18	-7	49
25.	Jamanis	262	27	480	26	-1	1
26.	Ciawi	122	12	276	8	-4	16
27.	Pagerageung	112	8	227	6	-2	4
Jumlah							395

Sumber : Tabel 4 dan Tabel 5 (diolah)

$$R_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n di^2}{n \times (n^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \times 395}{27 \times (27^2 - 1)}$$

$$R_s = 0.879$$

Uji statistik ini membuktikan bahwa ada hubungan antara sumberdaya yang dimiliki dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R_s) yang lebih besar dari nilai kritis uji peringkat Spearman.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai R_s uji hubungan antara sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi adalah 0.879. Sedangkan nilai kritis (r_s) dari tabel untuk $n = 27$ pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan $\alpha = 0.005$ adalah 0.509. Dengan demikian bisa dilihat bahwa terjadi korelasi positif dan antara potensi sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dilihat dari kondisi geografisnya.

Jika diamati dari peringkat yang diberikan oleh hirarkhi sumberdaya wilayah dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi maka terlihat sebagian besar peringkat bawah adalah kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah Tasikmalaya Selatan, seperti Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Taraju, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sodonghilir dan Kecamatan Cikalong. Sedangkan peringkat atas pada hirarkhi potensi sumberdaya wilayah dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi adalah kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Tasikmalaya Utara dan mempunyai potensi yang tinggi pada sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Pagerageung dan Kecamatan Leuwisari.

Berkaitan dengan keadaan ini dan dihubungkan dengan hasil pengujian hipotesis pertama, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan, khususnya pembangunan fasilitas pelayanan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya masih belum merata. Dengan perkataan lain pembangunan fasilitas pelayanan di Kabupaten

Dati II Tasikmalaya masih menunjukkan adanya ketimpangan. Ketersediaan fasilitas pelayanan dianggap sebagai indikator kesejahteraan maka ketidakmerataannya juga dapat dijadikan indikator bahwa masih ada ketimpangan kesejahteraan antar kecamatan.

Ketidakmerataan fasilitas pelayanan dapat menyebabkan kecamatan-kecamatan dengan sumberdaya yang kurang berkembang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia fasilitas pelayanan yang efektif guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ketidakefektifan ini dapat menyebabkan kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai pertumbuhan wilayah yang lambat.

Tersedianya fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik pada kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi wilayah yang besar dapat dimengerti, karena untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa pada wilayah ini akan terjadi pertumbuhan yang pesat yang disebabkan aglomerasi aktifitas ekonomi dan pemusatan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Penggabungan antara hirarkhi potensi sumberdaya dan hirarkhi fasilitas sosial ekonomi akan menghasilkan analisis limpitan sejajar untuk memilih tiga kecamatan contoh. Hasil lengkapnya dapat ditelaah pada tabel lampiran 4. Dari hasil analisis limpitan sejajar diperoleh tiga kecamatan contoh masing-masing Kecamatan Indihiang untuk kecamatan maju, Kecamatan Cineam untuk kecamatan berkembang dan Kecamatan Sukaraja untuk kecamatan kurang berkembang. Pembahasan kondisi umum kecamatan contoh membahas antara lain kondisi geografis, kependudukan dan perekonomian pada masing-masing kecamatan.

6.4. Gambaran Umum Kecamatan Contoh

6.4.1. Kecamatan Indihiang

Wilayah Kecamatan Indihiang terletak 4 kilometer dari Kota Administratif Tasikmalaya. Batas wilayah kecamatan ini sebelah Selatan meliputi Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Singaparna, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Administratif Tasikmalaya, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Cigalontang.

Wilayah Kecamatan Indihiang merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki ketinggian 354 m dpl. Luas wilayah keseluruhan 63.51 km², yang terbagi ke dalam 21 pemerintahan desa. Jumlah penduduk Kecamatan Indihiang pada tahun 1996 adalah 97 364 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1 533 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk pada kecamatan ini belum merata, variasi kepadatan penduduk masih cukup besar. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Panyingkiran dengan kepadatan 7444 jiwa perkilometer persegi sedangkan yang paling jarang penduduknya di Desa Linggajati hanya 393 jiwa perkilometer persegi. Selengkapnya dapat ditelaah pada tabel 7.

Struktur perekonomian Kecamatan Indihiang relatif merata, walaupun sektor pertanian masih merupakan sektor utama. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 24.71 persen pada tahun 1992 dan meningkat menjadi 28.48 persen pada tahun 1993. Sektor lain yang mempunyai kontribusi yang besar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta bangunan atau konstruksi, masing-masing 25.66 persen, 21.49 persen dan 11.11 persen pada tahun 1992 berubah menjadi 24.92 persen, 19.18 persen dan 10.01 persen pada tahun 1993.

Pada tahun 1993 PDRB Kecamatan Indihiang sebesar 32 609.58 juta rupiah nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 8.81 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB perkapita tahun 1992 sebesar 305 874.36 rupiah naik menjadi 332 272.75 rupiah pada tahun 1993.

Tabel 7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Indihiang, Tahun 1996

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per Km ²)
1.	Tawangbanteng	3.20	4684	1464
2.	Gunungsari	4.29	7302	1702
3.	Bantarsari	2.06	6057	2940
4.	Sukamulya	0.92	3499	3803
5.	Sukajaya	2.13	3385	1589
6.	Cibunigeulis	5.82	3895	662
7.	Bungursari	3.25	3983	1198
8.	Sukarindik	2.14	4278	1999
9.	Panyingkiran	0.74	5509	7444
10.	Parakannyasag	1.88	5987	3184
11.	Sirnagalih	1.00	4229	4229
12.	Indihiang	1.42	5204	3665
13.	Sukamajukidul	2.36	5445	2307
14.	Sukamajukaler	3.38	6909	2044
15.	Sukagalih	1.98	3237	1635
16.	Sukamahi	2.44	3710	1520
17.	Sukalaksana	3.00	4639	1546
18.	Sukaratu	4.82	4266	885
19.	Indrajaya	3.27	3601	1101
20.	Sinagar	5.62	4576	814
21.	Linggajati	7.79	3059	393
	Jumlah	63.51	97364	1533

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996c

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB meskipun dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor ini bukan merupakan sektor yang terbesar laju pertumbuhannya. Besarnya laju pertumbuhan sektor pertanian 21.17 persen masih lebih rendah dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang besarnya 68 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 4.50 persen dengan besar kontribusi 7 926.36 juta rupiah pada tahun 1992 meningkat menjadi 8 282.86 pada tahun 1993. Sama halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6 671.29 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 8.98 persen. Selengkapnya PDRB Kecamatan Indihiang menurut sektor pada tahun 1992 dan 1993 dapat ditelaah pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Indihiang Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan 1993 (Juta Rupiah)

Sektor	Produksi Domestik Regional Bruto				Pertumbuhan
	1992	%	1993	%	%
Pertanian	7 321.44	24.43	8 871.69	27.21	21.17
Pertambangan & Penggalian	110.66	0.37	185.91	0.57	68.00
Industri Pengolahan	7 926.32	26.45	8 282.86	25.40	4.50
Listrik, Gas dan Air Minum	364.30	1.22	388.66	1.19	6.69
Bangunan / Konstruksi	3 530.15	11.78	3 424.25	10.50	-3.00
Perdagangan, Hotel dan Rest	6 121.51	20.43	6 671.29	20.46	8.98
Angkutan dan Komunikasi	1 085.71	3.62	1 146.28	3.52	5.58
Bank dan Lembaga Keuangan	26.27	0.09	27.53	0.08	4.80
Sewa rumah	322.91	1.08	324.54	1.00	0.50
Pemerintah dan Hankam	2 097.13	7.00	2 161.77	6.63	3.08
Jasa-jasa	1 061.64	3.54	1 124.80	3.45	5.95
P D R B	29 968.04	100.00	32 609.58	100.00	8.81
Jumlah Penduduk	97 975		98 141		0.19
PDRB perkapita (rupiah)	305874.36		332272.72		

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1994

Masih tingginya pertumbuhan di sektor pertanian menunjukkan kurang berjalannya transformasi perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, walaupun kontribusi yang diberikan sektor sekunder cukup besar dan mengalami peningkatan pada PDRB yang diamati.

6.4.2. Kecamatan Cineam

Wilayah Kecamatan Cineam terletak lebih kurang 21 kilometer dari Kota Tasikmalaya. Secara geografis letak Kecamatan Cineam berbatasan dengan Kabupaten Ciamis di sebelah Utara, Timur dan Selatan, sebelah Barat dengan Kecamatan Manonjaya. Wilayah Kecamatan Cineam merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki ketinggian 480 m dpl. Luas wilayah keseluruhan 125.54 kilometer persegi, yang terdiri dari 14 pemerintahan desa. Selengkapnya luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Cineam dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Cineam, Tahun 1996

No.	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan penduduk (Jiwa per Km ²)
1.	Cisarua	24.18	2268	94
2.	Citalahab	8.75	1404	160
3.	Sirnajaya	18.23	3407	187
4.	Karangjaya	9.41	2736	291
5.	Karanglayung	11.46	3968	346
6.	Pasirmukti	5.79	2393	413
7.	Cikondang	6.29	3224	513
8.	Cijulang	7.65	3787	495
9.	Nagaratengah	6.14	1453	237
10.	Ciampanan	5.31	4216	794
11.	Cineam	3.43	3789	1105
12.	Madasari	4.89	3002	614
13.	Rajadatu	8.32	4631	557
14.	Ancol	5.69	2029	357
Jumlah		125.54	42 307	337

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996b

Jumlah penduduk di Kecamatan Cineam pada tahun 1996 mencapai 42 307 dengan kepadatan penduduk tertinggi di Desa Cineam sebesar 1105 jiwa per km² dan terendah di Desa Cisarua sebesar 94 jiwa per km². Kepadatan penduduk rata-rata adalah 337 jiwa per km².

Besarnya PDRB Kecamatan Cineam pada tahun 1993 mencapai 19 900.46 juta rupiah atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan sebesar 7.18 persen dari tahun 1992 yang besarnya 18 556.99 juta rupiah. PDRB Kecamatan Cineam menurut sektor pada tahun 1992 dan 1993 dapat ditelaah pada tabel 10.

Tabel 10. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Cineam Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan 1993 (Juta Rupiah)

Sektor	Produksi Domestik Regional Bruto				Pertumbuhan %
	1992	%	1993	%	
Pertanian	10 446.06	56.26	11 391.16	57.24	9.05
Pertambangan & Penggalian	69.53	0.37	60.92	0.31	-12.38
Industri Pengolahan	510.03	2.75	540.46	2.72	5.97
Listrik, Gas dan Air Minum	94.93	0.51	101.65	0.51	7.08
Bangunan / Konstruksi	1 610.65	8.67	1 658.97	8.34	3.00
Perdagangan, Hotel dan Rest	3 456.16	18.61	3 673.95	18.46	6.30
Angkutan dan Komunikasi	1 160.18	6.25	1 215.48	6.11	4.77
Bank dan Lembaga Keuangan	8.47	0.05	8.87	0.04	4.72
Sewa rumah	83.10	0.45	83.76	0.42	0.79
Pemerintah dan Hankam	864.70	4.66	886.40	4.45	2.51
Jasa-jasa	263.18	1.42	278.84	1.40	5.95
P D R B	18 556.99	100.00	19 900.46	100.00	7.18
Jumlah Penduduk	42 219		42 456		0.50
PDRB perkapita (rupiah)	439 778.06		468 731.39		

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1994

Struktur perekonomian Kecamatan Cineam masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 1992 mencapai 54.47 persen meningkat menjadi 54.97 persen pada tahun 1993. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diurutan ke dua dengan kontribusi 20.28 persen dan 18.57 persen pada tahun 1992 dan 1993. Sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi di bawah 10 persen.

Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada tahun 1992 dan 1993 masing-masing Rp 439 778.06 dan Rp 468 731.39, hal ini menunjukkan pendapatan masyarakat Kecamatan Cineam mengalami peningkatan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 11 391.16 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 9.05 persen disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3 673.95 atau sekitar 18.5 persen dari total PDRB.

Sektor bangunan/konstruksi dan sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi masing-masing 1 658.97 dan 1 215.48 atau sekitar 8.34 persen dan 6.11 persen dari total PDRB dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan yang cepat dan besarnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya menunjukkan struktur perekonomian di kecamatan Cineam masih di dominasi sektor pertanian melebihi 50 persen dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada.

6.4.3. Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Secara geografis, letak Kecamatan Sukaraja berbatasan dengan kecamatan Salopa di sebelah Timur, sebelah Utara dengan Kecamatan Kawalu dan Singaparna,

sebelah Barat dengan Kecamatan Tanjungjaya dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Cibalong.

Wilayah Kecamatan Sukaraja merupakan dataran rendah dengan ketinggian 350 m dpl. Luas wilayah Kecamatan Sukaraja seluruhnya 43.14 km² yang terbagi kedalam delapan pemerintahan desa. Jumlah penduduk seluruhnya mencapai 39 918 pada tahun 1996 dengan kepadatan penduduk berkisar 2473 jiwa perkm² di Desa Margalaksana dan 495 jiwa perkm² di Desa Mekarjaya. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 925 jiwa perkm². Selengkapnya luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Sukaraja dapat ditelaah pada tabel 11.

Tabel 11. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sukaraja, Tahun 1996

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
1.	Mekarjaya	9.81	4858	495
2.	Sirnajaya	7.57	7032	929
3.	Janggala	3.31	4432	1339
4.	Sukapura	2.83	5062	1789
5.	Tarunajaya	4.88	3545	726
6.	Leuwibudah	4.90	4868	993
7.	Linggaraja	7.97	5496	690
8.	Margalaksana	1.87	4625	2473
Jumlah		43.14	39 918	925

Sumber : Kantor Statistik Tasikmlaya, Tahun 1996d

Produk domestik Kecamatan Sukaraja pada tahun 1993 mencapai 8036.14 juta rupiah menurut harga konstan, dengan pendapatan perkapita sebesar 218

035.65 rupiah. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan PDRB sebesar 6.15 persen dari 7 570.86 juta rupiah pada tahun 1992.

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 23.11 persen dari 35.53 juta rupiah pada tahun 1992 menjadi 27.32 juta rupiah pada tahun 1993. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami kenaikan dari 2 767.25 juta rupiah pada tahun 1992 menjadi 3 037.96 juta rupiah di tahun 1993. Selengkapnya dapat ditelaah pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Sukaraja Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1992 dan 1993 (juta rupiah)

Sektor	Produksi Domestik Regional Bruto				Pertumbuhan %
	1992	%	1993	%	
Pertanian	2 767.25	36.55	3 037.96	37.80	9.78
Pertambangan & Penggalian	35.53	0.47	27.32	0.34	-23.11
Industri Pengolahan	575.94	7.61	598.99	7.45	4.00
Listrik, Gas dan Air Minum	68.30	0.90	80.61	1.00	18.02
Bangunan / Konstruksi	1 082.32	14.30	1 135.41	14.13	4.91
Perdagangan, Hotel dan Rest	1 241.80	16.40	1 307.17	16.27	5.26
Angkutan dan Komunikasi	506.37	6.69	525.67	6.54	3.81
Bank dan Lembaga Keuangan	55.35	0.73	58.00	0.72	4.79
Sewa rumah	55.85	0.74	55.91	0.70	0.11
Pemerintah dan Hankam	965.21	12.75	979.44	12.19	1.47
Jasa-jasa	216.76	2.86	229.66	2.86	5.95
P D R B	7 570.68	100.00	8 036.14	100.00	6.15
Jumlah Penduduk	36 976		36 857		0.26
PDRB perkapita (rupiah)	204 745.78		218 035.65		

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1994

PDRB terbesar diperoleh dari sektor pertanian yang mencapai 37.80 persen atau sekitar 3 037.96 juta rupiah, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 16.27 persen atau sekitar 1 307.17 juta rupiah. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum yang mencapai 18.02 persen dari 68.30 juta rupiah pada tahun 1992 menjadi 80.61 juta rupiah pada tahun 1993.

VII. FUNGSI KOTA KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN

7.1. Struktur Tata Ruang Kecamatan Indihiang

Dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang terletak pada sub wilayah pembangunan Tasikmalaya bersama-sama dengan kecamatan-kecamatan wilayah Kota Administratif Tasikmalaya, Cibeureum, dan Kawalu. Sebagai daerah hinterland dari Kota Tasikmalaya, fungsi Kecamatan Indihiang mengembangkan sektor perikanan air tawar, perdagangan, pariwisata, agroindustri dan industri kerajinan rakyat. Sedangkan dalam struktur tata ruang wilayah kecamatan, Kota Indihiang berfungsi sebagai pusat pemerintahan tingkat kecamatan. Sebagai pusat pemerintahan, di Kota Indihiang tersedia lokasi perkantoran yang meliputi kantor kecamatan, kantor desa serta kantor-kantor instansi di tingkat kecamatan.

Berdasarkan analisis skalogram pada tabel 13, Kota Indihiang menempati peringkat pertama dari 21 desa yang dianalisis. Berarti ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota kecamatan ini lebih lengkap dibandingkan desa-desa lainnya dan terjadi konsentrasi penyediaan fasilitas pelayanan di Kota Indihiang. Jenis fasilitas pelayanan yang terdapat di Kota Indihiang adalah fasilitas pemerintahan (kantor kecamatan, kantor desa), fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan (dokter, bidan, dukun bayi), fasilitas ekonomi (bank, koperasi, pasar dan warung) fasilitas komunikasi (kantor pos), dan mesjid. Untuk fasilitas pasar, kantor pos dan kantor kecamatan hanya tersedia di Kota Indihiang, maka apabila penduduk di Kecamatan Indihiang membutuhkan salah satu dari fasilitas tersebut hanya dapat memanfaatkannya di Kota Indihiang.

Tabel 13. Analisis Skalogram Kecamatan Indihiang (Keadaan Tahun 1996)

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		W A R U N G	M E S J I D	D U K U N B A Y I	S D	B I D A N D E S A	K A N T O R	D E S A	K O P E R A S I	P U S K E S M A S	P E M B A N T U	B A N K	P R O K T E R	D O K T E R	S M P	S M A	P U S K E S M A S	K A N T O R	K E C A M A T A N	K A N T O R	P O S	T E R M I N A L	P A S A R	
		1987	1996																							
1	GUNUNGSARI	5882	7302	73	20	4	7		1			1					1	1								
2	SUKAMAJU KALER	5476	6909	31	10	12	4	1	1	1							1	1								
3	BANTARSARI	4270	6057	76	11	2	2	3	1	3	1	1	1													
4	PARAKANNYASAG	3942	5987	73	8	1	4		1								1	1								
5	PANYINGKIRAN	3284	5509	75	8	3	2	2	1	3				1				2								
6	SUKAMAJU KIDUL	4543	5445	53	11	4	5	2	1	1				3										1		
7	INDIHIANG	3626	5204	87	6	4	3	2	1	2				1	3		1	1			1	1			1	
8	TAWANGBANTENG	4604	4684	51	11	5	5		1			1														
9	SUKALAKSANA	3797	4639	47	23	3	2	2	1			1														
10	SINAGAR	4050	4576	41	16	4	4		1																	
11	SUKARINDIK	3451	4278	41	8	2	3		1			1	1													
12	SUKARATU	4270	4266	47	14	3	4	2	1			1			1											
13	SIRNAGALIH	3395	4229	94	7	2	2	2	1								1				1					
14	BUNGURSARI	3636	3983	31	8	2	2		1											1						
15	CIBUNIGEULIS	3034	3895	41	7	2	5	2	1			1														
16	SUKAMAHI	3350	3710	20	9	5	3	2	1			1														
17	INDRAJAYA	3446	3601	37	11	6	4		1			1														
18	SUKAMULYA	2573	3499	54	7	3	2	2	1	2	1				1											
19	SUKAJAYA	2683	3385	49	5	4	2		1	1																
20	SUKAGALIH	3487	3237	37	6	4	4		1	2					1		1									
21	LINGGAJATI	2955	3059	31	10	3	2	1	1																	
JUMLAH		79 754	97 364																							

T O R A S A R A N J E N I S
--

8
9
10
7
9
9
14
6
7
5
7
8
9
6
7
7
6
9
6
8
6

T O R A S A R U N I T

108
62
101
89
97
81
114
74
79
66
57
73
111
45
59
41
60
73
62
56
48

P E R I N G K A T

3
13
4
6
5
7
1
9
8
12
17
10
2
20
16
21
15
10
13
18
19

TOTAL JENIS PRASARANA	21	21	21	21	11	21	8	10	5	5	4	5	2	1	1	1	1
TOTAL UNIT PRASARANA	1089	216	78	71	23	21	15	10	7	7	6	6	2	1	1	1	1
JENJANG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	11	11	13	14	14	14	14
PENYEBARAN (%)	100	100	100	100	52	100	38	48	24	24	19	24	10	5	5	5	5

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996c

Ketersediaan fasilitas pelayanan yang lebih banyak dan beragam dari jenis dan jumlahnya menjadikan Kota Indihiang sebagai pusat pelayanan kecil pedesaan yang melayani desa-desa yang berada di sekitarnya. Kota Indihiang menyediakan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan penduduk terutama fasilitas yang hanya dapat ditemui di kota kecamatan. Namun konsentrasi fasilitas pelayanan di Kota Indihiang tidak diikuti dengan terkonsentrasinya pemukiman penduduk di sekitar kota. Jumlah penduduk ataupun kepadatan penduduk di Kota Indihiang bukan yang terbanyak ataupun terpadat.

7.2. Struktur Tata Ruang Kecamatan Cineam

Dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Kecamatan Cineam terletak pada sub wilayah pembangunan Manonjaya bersama-sama dengan kecamatan-kecamatan Manonjaya dan Salopa. Fungsi hinterland Kecamatan Cineam mengembangkan sektor hortikultura terutama buah-buahan dan konservasi hutan. Dalam struktur tata ruang wilayah kecamatan, Kota Cineam memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Cineam.

Berdasarkan analisis skalogram pada tabel 14 dapat diamati bahwa Kota Cineam menempati peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dari 14 desa yang dianalisis. Fasilitas pelayanan yang tersedia di Kota Cineam adalah fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan (praktek dokter, puskesmas, bidan dan dukun bayi), fasilitas ekonomi (pasar, bank, dan warung), fasilitas komunikasi dan transportasi (kantor pos, terminal) dan fasilitas pemerintahan (kantor kecamatan, kantor desa) dan fasilitas peribadatan. Tersedianya fasilitas pelayanan yang lebih lengkap dibandingkan desa-desa lainnya menyebabkan Kota Cineam sebagai kota

Tabel 14. Analisis Skalogram Kecamatan Cineam (Keadaan Tahun 1996)

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		MESJID	DUKUN BAYI	SD	KANTOR DESA	SAPRODI	NON KUD	BIDAN DESA	PEMBANTU DESA	WARUNG	SMP	BANK	TERMINAL	PRAKTEK	DOKTER	PUSKESMAS	SMA	KANTOR POS	KANTOR	KECAMATAN	KUD	PASAR	SAPRODI KUD	TOTAL JENIS	TOTAL UNIT	PERINGKAT
		1987	1996																									
1	RAJADATU	4404	4631	14	7	3	1	2		1			1													7	29	2
2	CIAMPANAN	4071	4216	12	5	3	1	1	2			2		1											1	10	29	2
3	KARANGLAYUNG	3586	3968	8	7	3	1	1		1		1		1											1	10	25	4
4	CINEAM	3466	3789	10	2	3	1		1			3	2	1	1	1		1	1		1			1	15	30	1	
5	CIJULANG	3467	3787	5	2	1	1	1	1																	7	12	13
6	SIRNAJAYA	2868	3407	9	10	3	1	1								1										6	25	4
7	CIKONDANG	3019	3224	9	5	4	1				1		1													6	20	7
8	MADIASARI	2835	3002	7	3	2	1	1	1			1			1											8	17	8
9	KARANGJAYA	2385	2736	8	3	2	1				1															5	15	10
10	PASIRMUkti	2148	2393	5	3	2	1	1	1																	6	13	12
11	CISARUA	2193	2268	6	4	3	1			1	1															6	16	9
12	ANCOL	1939	2029	6	3	1	1			1																5	12	13
13	NAGARATENGAH	1420	1453	11	3	4	1	1			1															6	21	6
14	CITALAHAB	1293	1404	4	4	1	1	1	1	1	1	1														7	14	11
JUMLAH		39 094	42 307																									

TOTAL JENIS PRASARANA	14	14	14	14	9	8	8	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-----------------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL UNIT PRASARANA	114	61	35	14	10	9	8	8	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
----------------------	-----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JENJANG	1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PENYEBARAN (%)	100	100	100	100	64	57	21	36	21	21	21	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
----------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996b

kecamatan berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi desa-desa di sekitarnya.

Apabila dilihat dari angka kepadatan penduduknya, Kota Cineam menempati peringkat pertama dibandingkan desa lainnya, tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk hanya menempati peringkat empat setelah desa-desa Rajadatu, Ciampanan, dan Karanglayung. Angka kepadatan penduduk di Kota Cineam mencapai 1105 jiwa perkm². Dengan demikian Kota Cineam juga berfungsi sebagai pusat pemukiman penduduk Kecamatan Cineam. Tersedianya fasilitas pelayanan yang lengkap mendorong konsentrasi pemukiman penduduk di sekitar pusat kota sehingga akan terbentuk pola pemukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi optimal dari pusat pelayanan. Jumlah penduduk yang padat dan fasilitas pelayanan yang lengkap akan mendorong kegiatan perekonomian yang lebih berkembang dan merupakan peluang usaha yang besar.

7.3. Struktur Tata Ruang Kecamatan Sukaraja

Dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya, Kecamatan Sukaraja terletak pada sub wilayah pembangunan Singaparna bersama-sama dengan kecamatan-kecamatan Singaparna, Leuwisari, Cigalontang, Salawu, Taraju, Sodonghilir dan Bojonggambir. Fungsi hinterland Kecamatan Sukaraja mengembangkan sektor hortikultura dan palawija, peternakan sapi dan galian golongan C. Dalam struktur tata ruang wilayah kecamatan, Kota Sukapura berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan jasa di tingkat kecamatan dan merupakan kota hirarkhi ketiga.

Berdasarkan analisis skalogram kecamatan pada tabel 15, konsentrasi penyediaan fasilitas sosial ekonomi terjadi di Kota Sukapura. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat peringkat Kota Sukapura yang menempati urutan

pertama dari delapan desa yang dianalisis. Jenis dan jumlah fasilitas sosial ekonomi di kota kecamatan ini lebih lengkap dibandingkan desa-desa lainnya. Di Kota Sukapura tersedia fasilitas pelayanan berupa fasilitas pendidikan (SD, SMP), fasilitas kesehatan (praktek dokter, puskesmas, dukun bayi), fasilitas ekonomi (bank, pasar, KUD, saprodi non KUD, dan warung), fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan dan fasilitas transportasi yaitu terminal. Adanya terminal dan sarana transportasi yang cukup baik di Kota Sukapura memudahkan penduduk pedesaan sekitarnya untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan tersebut. Dengan demikian tersedianya berbagai fasilitas pelayanan yang lebih lengkap dan didukung sarana transportasi yang cukup baik menjadikan Kota Sukapura sebagai pusat pelayanan kecil pedesaan yang melayani desa-desa yang berada disekitarnya.

Terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kota Sukapura akan memberikan manfaat dan ketersediaannya akan menarik lebih banyak penduduk sehingga akan terbentuk pola pemukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi optimal dari pusat pelayanan.

Dari hasil analisis skalogram di ketiga kecamatan contoh terjadi penyebaran fasilitas sosial ekonomi yang terkonsentrasi di kota kecamatan. Pada analisis skalogram kota kecamatan menduduki peringkat pertama baik dalam jumlah jenis maupun jumlah unit fasilitas sosial ekonomi yang tersedia. Terkonsentrasinya fasilitas sosial ekonomi menambah efektifitas fasilitas tersebut karena melayani sejumlah penduduk yang merupakan ambang batas.

Bila dibandingkan ketersediaan fasilitas pelayanan di ketiga kecamatan contoh, di Kota Indihiang yang mewakili kecamatan maju jumlah fasilitas pelayanannya jauh lebih besar dibandingkan Kota Cineam dan Sukapura. Namun apabila diperhatikan berdasarkan jenis fasilitas, Kota Cineam yang mewakili

kecamatan berkembang memiliki jenis fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan Kota Indihiang ataupun Kota Sukapura yang masing-masing sebagai kecamatan maju dan kurang berkembang. Di kota kecamatan Cineam juga terjadi konsentrasi pemukiman penduduk, sebaliknya Kota Indihiang hanya menempati peringkat empat dan peringkat dua untuk kota Sukapura.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kota-kota kecamatan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya berfungsi sebagai penyedia fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh desa-desa di sekitarnya serta diharapkan dapat menjadi tempat konsentrasi pemukiman penduduk agar tercipta pola pemukiman yang optimal dari pusat kota.

VIII. SISTEM PASAR DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Pasar sebagai salah satu fasilitas pelayanan ekonomi dalam suatu pemukiman berfungsi untuk melayani penduduk dalam pemukiman tersebut dan keadaannya sejalan dengan aktifitas masyarakat yang dilayaninya. Semakin kompleks aktifitas perekonomian masyarakat dan semakin besar jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan semakin kompleksnya aktifitas pasar yang terjadi.

Salah satu bentuk nyata intensitas kegiatan pasar adalah waktu berlangsungnya. Ada kegiatan pasar yang berlangsung setiap hari dan ada pula yang bersifat periodik. Hal ini dihubungkan dengan jumlah dan tingkat kehidupan penduduk serta ragam dan banyaknya barang yang dibutuhkan.

Fungsi ekonomi suatu pasar terlihat dari peranannya dalam mempertukarkan barang yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan para pedagang maupun masyarakat desa. Di satu sisi petani produsen menjual hasil pertaniannya, di sisi lain pedagang menjual barang-barang kebutuhan penduduk untuk mendapatkan keuntungan jual beli yang dilakukannya.

Banyaknya pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya adalah 34 buah yang tersebar di 21 kecamatan. Pasar yang berstatus pasar pemda ada lima buah dengan tiga diantaranya terletak pada kecamatan yang berada di Kota Administratif Tasikmalaya sedangkan sisanya di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Singaparna. Pasar berstatus pasar inpres terletak di tujuh kecamatan, yaitu : pasar Indihiang di Kecamatan Indihiang, pasar Manonjaya di Kecamatan Manonjaya, pasar Singkir di Kecamatan Cikalong, pasar Pakemitan di Kecamatan Cikatomas, pasar Cibalong di Kecamatan Cibalong, pasar Rancabakung di Kecamatan Karangnunggal dan pasar Taraju di Kecamatan Taraju. Sisanya berstatus pasar desa yang tersebar di 13

kecamatan. Secara lengkap penyebaran pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya dapat diamati pada tabel 16.

Tabel 16. Nama, Status dan Hari Pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, menurut Kecamatan, Tahun 1996

No	Kecamatan	Nama Pasar	Status pasar	Hari Pasar
1.	Cihideung	Pasar I Tasikmalaya	Pemda	Setiap hari
		Pasar III Tasikmalaya	Pemda	Setiap hari
2.	Tawang	Pasar II Tasikmalaya	Pemda	Setiap hari
3.	Indihiang	Indihiang	Inpres	Setiap hari
4.	Manonjaya	Manonjaya	Inpres	-
		Gunung Tanjung	Desa	Senin / Kamis
5.	Ciawi	Ciawi	Pemda	Senin / Jumat
6.	Singaparna	Singaparna	Pemda	-
7.	Rajapolah	Rajapolah	Desa	Minggu
8.	Pagerageung	Pagerageung	Desa	Senin / Jumat
9.	Cikalong	Cikalong	Desa	Senin / Kamis
		Kalapa Genep	Desa	Rabu
		Singkir	Inpres	Selasa
		Cibeber	Desa	Selasa
		Panyiaran	Desa	Kamis
		Cikancra	Desa	Sabtu
		Cimanuk	Desa	Senin
		Tawang	Desa	Minggu
		Cikatomas	Desa	Rabu
11.	Cikatomas	Pakemitan	Inpres	Senin
		Lengkong Barang	Desa	Selasa
		Cibalong	Inpres	Minggu
12.	Cibalong	Cibalong	Inpres	Minggu
13.	Karangnunggal	Ranca Bakung	Inpres	Rabu / Minggu
14.	Cipatujah	Darawati	Desa	Kamis
		Ciheras	Desa	Rabu / Minggu
		Sabeulit	Desa	Minggu
15.	Salawu	Salawu	Desa	Rabu / Minggu
		Puspahiang	Desa	Senin / Kamis
16.	Sodonghilir	Sodonghilir	Desa	Rabu / Minggu
17.	Taraju	Taraju	Inpres	Senin / Selasa
18.	Bojonggambir	Bojonggambir	Desa	Kamis
19.	Bantarkalong	Simpang	Desa	Rabu / Minggu
20.	Sukaraja	Sukaraja	Desa	Selasa / Jumat
21.	Cineam	Cineam	Desa	Selasa / Jumat

Sumber : Dinas Pasar dan Informasi Harga Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 1996

Pasar-pasar desa dikelola secara swadaya oleh pemerintah setempat sehingga retribusi pasarnya merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Dati II Tasikmalaya memperoleh 10 persen dari total retribusi tiap pasar pertahunnya.

Penelaahan terhadap sistem pasar dalam suatu wilayah dapat dilihat dari keadaan dan jumlah penduduk yang dilayani, luas wilayah yang dilayani, jenis dan jumlah pedagang yang terlibat dalam kegiatan pasar, retribusi pasar dan unit pendukung lain yang ada. Uraian berikut ini akan menerangkan hasil analisis pasar yang ada di Kecamatan Indihiang, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Sukaraja.

8.1. Sistem Pasar di Kecamatan Indihiang

Kecamatan Indihiang memiliki sebuah pasar yang berstatus pasar Impres, yaitu pasar Indihiang yang terletak di Desa Indihiang. Aktifitas pasar terjadi setiap hari yang didukung oleh lokasi yang strategis yang berada pada jalur utama antar kecamatan dan antar kabupaten serta jaraknya hanya empat km dari Kota Tasikmalaya merupakan salah satu sebab tingginya aktifitas pasar.

Wilayah layanan pasar Indihiang sebagai pasar kecamatan meliputi seluruh wilayah di kecamatan, juga wilayah di luar kecamatan Indihiang, seperti Kecamatan Cisayong, Leuwisari dan Kecamatan Cipedes yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Indihiang. Sebagai pasar kecamatan pasar Indihiang merupakan tempat konsentrasi kegiatan ekonomi terutama perdagangan dan jasa. Pengelolaan pasar dilakukan oleh aparat dinas pasar kecamatan. Di sekitar pasar terdapat fasilitas pemberhentian angkutan, bank, dan wartel. Besarnya retribusi pasar Indihiang Rp 140 000 - Rp 160 000 tiap hari dengan jumlah pedagang mencapai 160 - 200 orang. Luas areal pasar 2946 meter persegi berupa bangunan permanen di dalamnya didirikan sebanyak 163 buah kios.

Pedagang di pasar Indihiang hampir seluruhnya berasal dari desa-desa di Kecamatan Indihiang. Pedagang di pasar ini terdiri dari pedagang tetap dan pedagang tidak tetap. Pedagang tidak tetap biasanya merupakan pedagang yang mempunyai modal kecil, dimana kegiatan berdagang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja tergantung modal yang dimiliki. Jumlah pedagang dan jenis dagangannya dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Indihiang, Tahun 1997

No	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang (orang)
1.	Sayur-mayur	80 - 90
2.	Buah	20 - 25
3.	Ayam & daging	10 - 15
4.	Ikan basah	5 - 7
5.	Tahu & tempe	5 - 7
6.	Beras	5 - 7
7.	Ikan asin	10 - 12
8.	Kelontong	10 - 15
9.	Makanan & jajanan	25 - 30
10.	Sepatu & sandal	5 - 7
11.	Alat -alat rumah tangga	12 - 15
12.	Pakaian	12 - 15
13.	Gerabah & anyaman	8 - 10

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 17 dapat dilihat jumlah pedagang paling banyak adalah pedagang sayur mayur. Di pasar Indihiang jumlah pedagang sayur-mayur mencapai lebih-kurang 80 sampai 90 orang pedagang. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar Indihiang sebagian besar merupakan produk dari luar kecamatan. Para pedagang umumnya membeli barang dagangannya di pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Namun ada juga pedagang yang membeli barang dagangannya dari

Bandung atau Kecamatan Rajapolah. Barang-barang yang berasal dari Kecamatan Indihiang umumnya adalah kelapa, pisang, kacang panjang, ayam, tahu dan tempe, timun dan makanan kecil. Hal ini berarti bahwa pasar Indihiang masih berfungsi sebagai pembeli produk-produk dari luar kecamatan dibandingkan menjual produk yang berasal dari kecamatannya sendiri. Dilihat dari asal pedagang yang hampir seluruhnya penduduk Kecamatan Indihiang, maka pasar dapat dijadikan sebagai sarana lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kecamatan Indihiang.

8.2. Sistem Pasar di Kecamatan Cineam

Kecamatan Cineam memiliki satu buah pasar pasar, yaitu pasar Cineam yang terletak di Desa Cineam. Status pasar ini merupakan pasar desa yang sekaligus berfungsi sebagai pasar kecamatan. Wilayah layanan pasar adalah kecamatan Cineam itu sendiri. Pengelolaan pasar dilakukan oleh pemerintah desa Cineam. Aktifitas pasar terjadi pada hari Selasa dan Jumat. Di luar hari yang disebutkan masih terjadi kegiatan pasar dengan intensitas kegiatan tidak seramai pada saat hari pasar.

Lokasi pasar cukup strategis terletak di dekat terminal Cineam yang menghubungkan lalu lintas antar kecamatan dan dengan Kabupaten Ciamis. Unit pendukung lain yang ada di sekitar pasar adalah gudang penyimpanan, beberapa toko dan kantor pos.

Luas areal pasar 4790 meter persegi dengan bentuk bangunan permanen. Jumlah pedagang yang terlibat dalam kegiatan pasar ini kurang lebih mencapai 150 - 180 pedagang. Dalam areal pasar didirikan 155 kios dengan besarnya retribusi dalam satu hari pasar Rp 88 000 - Rp 100 000.

Pedagang di pasar Cineam sebagian besar berasal dari desa-desa di Kecamatan Cineam. Namun ada beberapa pedagang yang berasal dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Manonjaya bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Ciamis. Pedagang di pasar Cineam terdiri dari pedagang tetap dan tidak tetap. Pedagang tidak tetap biasanya para pedagang yang mempunyai modal kecil atau penduduk yang menjadi pedagang musiman terutama pada saat musim buah salak di kecamatan ini. Jumlah dan jenis dagangan pedagang yang ada di pasar Cineam dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Cineam, Tahun 1997

No	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang (orang)
1.	Sayur-mayur	70 - 80
2.	Buah	35 - 40
3.	Ayam & daging	10 - 15
4.	Ikan basah	2
5.	Tahu & tempe	5 - 7
6.	Beras	2
7.	Ikan asin	5 - 7
8.	Kelontong	13 - 15
9.	Makanan & jajanan	15 - 20
10.	Saprodi	5 - 7
11.	Alat -alat rumah tangga	5 - 7
12.	Pakaian	5 - 7
13.	Gerabah & anyaman	2

Sumber : Data primer (diolah)

Pada tabel 18 dapat dilihat bahwa jumlah pedagang paling banyak adalah pedagang sayur-mayur yang mencapai setengah dari total pedagang yang ada di pasar Cineam kemudian disusul pedagang buah. Apabila sedang musim buah salak sebagian besar penduduk menjadi pedagang dengan menjual hasil panennya

di pasar Cineam atau ke pasar Cikurubuk, pasar Pancasila atau pasar Padayungan di Tasikmalaya. Pada umumnya mereka merupakan pedagang tidak tetap yang berdagang pada saat-saat tertentu.

Barang-barang yang diperdagangkan sebagian merupakan produk dari dalam kecamatan seperti sayur-mayur, buah, ayam, ikan, tahu dan tempe, makanan kecil, lat-alat pertanian sederhana dan kerajinan rumah tangga sedangkan barang-barang lain para pedagang umumnya membeli dari pasar Cikurubuk, Tasikmalaya.

8.3. Sistem Pasar di Kecamatan Sukaraja

Jumlah pasar yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja hanya satu buah, yaitu pasar Sukaraja yang terletak di Desa Sukapura. Status pasar tersebut adalah pasar desa dengan aktifitas pasar berlangsung pada hari Selasa dan Jumat dari pukul 06.00 - 11.00 wib. Pasar melayani penduduk yang berada di Kecamatan Sukaraja dan pengelolaannya dilakukan oleh aparat kecamatan Sukaraja.

Lokasi pasar cukup strategis berada di pinggir jalan besar yang menghubungkan kecamatan-kecamatan sehingga memudahkan mencapai pasar baik untuk pedagang yang membawa barang dagangan atau pembeli yang menuju pasar. Luas areal pasar sebesar 840 meter persegi dengan bangunan semi permanen. Jumlah pedagang yang terlibat dalam aktifitas pasar ini sekitar 60 - 75 orang dengan jumlah los 60 buah dan kios lima buah. Besarnya retribusi pasar dalam satu hari pasar Rp 35 000 - 40 000. Unit pendukung lain adanya koperasi pedagang yang membantu modal para pedagang di pasar Sukaraja dalam menjalankan usahanya.

Barang-barang yang diperjualbelikan, sebagian besar berasal dari luar kecamatan. Para pedagang umumnya membeli barang dagangannya dari pasar-pasar di kota administratif Tasikmalaya atau membeli dari Kecamatan Rajapolah

dan Kecamatan Kawalu. Barang-barang yang berasal dari Kecamatan Sukaraja adalah timun, pisang, makanan kecil, tahu dan tempe. Dilihat dari kondisi ini pasar Sukaraja masih berfungsi sebagai pembeli produk-produk dari luar kecamatan dibandingkan sebagai penjual produknya sendiri. Jenis dan jumlah para pedagang dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Jenis dan Jumlah Pedagang pada saat Berlangsungnya Kegiatan Pasar di Pasar Sukaraja Tahun 1997

No	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang (orang)
1.	Sayur-mayur	17 - 20
2.	Buah	15
3.	Ayam	3 - 5
4.	Tahu & tempe	7 - 9
5.	Beras	3 - 5
6.	Ikan asin	8 - 10
7.	Kelontong	2 - 3
8.	Makanan & jajanan	2 - 3
9.	Pakaian	5 - 7
10.	Gerabah & anyaman	2 - 5
11.	Sendal	3 - 5

Sumber : Data primer (diolah)

Pedagang di pasar Sukaraja sebagian besar berasal dari desa-desa di Kecamatan Sukaraja, tetapi ada beberapa pedagang berasal dari kecamatan Rajapolah dan Kawalu. Pedagang di pasar Sukaraja terdiri dari pedagang tetap dan tidak tetap. Pedagang tidak tetap biasanya melakukan perdagangan berpindah-pindah ke kecamatan lain menurut hari pasar. Para pedagang berpindah ke kecamatan yang dekat dengan kecamatan Sukaraja yaitu Kecamatan Cibalong, Salawu dan Sodonghilir.

8.5. Aktifitas Pasar dan Karakteristik Perdagangan

Penelaahan aktifitas pasar pada ketiga kecamatan contoh dilaksanakan dengan membandingkan variabel yang mencerminkan kegiatan pasar yaitu luas areal pasar, jumlah kios atau los, jumlah pedagang, dan retribusi pasar. Analisis perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Perbandingan aktifitas pasar pada Kecamatan Contoh, Tahun 1997

No	Nama Pasar	Luas (m ²)	Jumlah los	Jumlah kios	Jumlah Pedagang	Retribusi satu hari (rupiah)
1.	Indihiang	2946	-	163	160 - 200	140 000 - 160 000
2.	Cineam	4790	-	155	150 - 180	88 000 - 100 000
3.	Sukaraja	840	60	5	60 - 75	35 000 - 40 000

Sumber : Dinas Pasar dan Informasi Harga, 1996 dan Data primer (diolah)

Aktifitas pasar terbesar terjadi pada pasar Indihiang, kemudian pasar Cineam dan pasar Sukaraja. Jumlah kios di pasar Indihiang mencapai 163 buah, di pasar Cineam 155 buah sedangkan di pasar Sukaraja 5 buah.

Jumlah pedagang di ketiga pasar juga bervariasi. Pada pasar Indihiang jumlah pedagang mencapai 160 - 200 orang pedagang. Sedangkan untuk pasar Cineam 150 - 180 orang pedagang. Jumlah pedagang yang beroperasi pada pasar Sukaraja yaitu 60 - 75 orang pedagang. Jika dilihat dari pendapatan retribusi, pasar Indihiang menempati urutan pertama kemudian pasar Cineam dan terakhir pasar Sukaraja.

Kegiatan pasar Indihiang terjadi setiap hari dengan tingkat kesibukan yang hampir sama. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah layanan

pasar yang tidak hanya terbatas melayani penduduk di Kecamatan Indihiang tetapi juga penduduk yang tinggal di kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan kecamatan Indihiang. Lokasi pasar yang strategis terletak pada jalur lalu-lintas antar kecamatan dan antar kabupaten, yaitu dari Tasikmalaya ke Kabupaten Garut, Ciamis ataupun Bandung. Disamping itu jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Kota Tasikmalaya menyebabkan aksesibilitas kecamatan ini terhadap kota administratif Tasikmalaya cukup tinggi juga mempengaruhi kegiatan pasar yang terjadi.

Fasilitas transportasi yang baik memudahkan mobilisasi para pedagang untuk membeli barang ke kota Tasikmalaya dan menjualnya kembali di pasar Indihiang, tetapi akibatnya barang-barang yang diperdagangkan di pasar ini yang berasal dari produk lokal hanya 33.33 persen. Kondisi demikian menunjukkan bahwa wilayah ini masih menjadi tempat pemasaran produk dari wilayah lain dan kemampuan produk lokal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan perekonomian kecamatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Kondisi perekonomian di Kecamatan Cineam lebih baik dibandingkan di Kecamatan Sukaraja. Hal ini ditunjukkan dengan dengan lebih tingginya peringkat Kecamatan Cineam dibandingkan Kecamatan Sukaraja dan lebih seringnya kegiatan pasar yang terjadi di pasar Cineam, walaupun jarak dari kota Tasikmalaya ke kota Cineam lebih jauh dibandingkan ke kota Sukaraja. Karena dukungan sarana transportasi yang baik Kecamatan Cineam dapat lebih berkembang. Aktifitas pasar yang terjadi di pasar Cineam dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat aglomerasi perekonomian wilayah karena sekitar 62.96 persen produk lokal terdapat di pasar tersebut serta membuka peluang kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Berbeda halnya dengan pasar Sukaraja, di pasar ini produk lokal yang di jual hanya 14.81 persen. Barang-barang dagangan umumnya berasal dari Kota Tasikmalaya, Kawalu dan Rajapolah. Hal ini terjadi karena tersedianya fasilitas transportasi yang memadai bagi para pedagang untuk mengangkut barang dagangan. Kondisi yang terjadi seperti saat ini kurang mendukung pertumbuhan perekonomian kecamatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Seharusnya dengan tersedianya sarana transportasi yang cukup baik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor perdagangan dan pemasaran khususnya produk hortikultura dan sektor pertambangan yang berpotensi untuk dikembangkan. Dari hasil pengamatan, arus barang dari luar berupa pakaian, sandal dan sepatu, sebagian besar buah-buahan dan sayur-mayur, alat-alat rumah tangga dan ikan asin.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini besarnya pengaruh *spread effects* masih lebih kecil dari *backwash effects*. Dengan demikian peningkatan fungsi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan pedesaan sangat penting untuk mengurangi pengaruh *backwash effects* tersebut.

Berdasarkan hasil analisa, pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya dilihat dari waktu berlangsungnya terdiri dari pasar tetap dan pasar periodik. Pasar Indihiang dan pasar Cineam termasuk pasar tetap karena relatif besar ukurannya, lokasinya tetap dan berlangsung setiap hari sedangkan pasar Sukaraja adalah pasar periodik karena berlangsung hanya dua kali seminggu dan komoditi yang diperjualbelikan terbatas.

Bila dihubungkan antara aktifitas pasar dengan kondisi kota kecamatan terlihat bahwa aktifitas pasar terbesar terjadi pada pasar Indihiang yang mewakili kecamatan maju. Besarnya aktifitas pasar juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk

dan luas wilayah layanannya. Kecamatan Indihiang memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan dua kecamatan lain. Selain itu pasar Indihiang tidak hanya melayani penduduk di kecamatan Indihiang saja tetapi juga penduduk di kecamatan lain yang berada di sekitarnya. Aktifitas pasar secara keseluruhan di Kecamatan Sukaraja adalah yang terendah dari ketiga kecamatan contoh. Dengan demikian hipotesis kedua dapat dibuktikan bahwa aktifitas pasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang dilayani dan luas wilayah layanannya. Semakin besar jumlah penduduk dan semakin luas wilayah layanannya maka aktifitas pasar tersebut semakin tinggi.

Sistem pasar yang ada di kecamatan contoh dapat dikategorikan sebagai pasar dendritik. Hal ini mengingat bahwa pasar-pasar yang ada masih tergantung dengan pasar lain yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu pasar besar di kota administratif Tasikmalaya yaitu pasar Cikurubuk, pasar Pancasila dan pasar Padayungan. Dengan menggunakan analisis skalogram kecamatan serta sistem pasar yang berlangsung, terlihat bahwa desa-desa dimana lokasi pasar berada mempunyai hirarki yang lebih tinggi dalam struktur tata ruang kecamatan.

Dari uraian di atas, pasar-pasar di Kabupaten Dati II Tasikmalaya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari dan dapat menjadi lapangan berusaha bagi penduduk setempat. Namun tingkat ketergantungan pasar-pasar tersebut terhadap produk dari luar cukup tinggi sehingga untuk kondisi sekarang fungsi pasar masih sebagai pembeli dibandingkan penjual suatu produk sehingga peranan pasar sebagai sarana bagi petani untuk memasarkan produknya masih rendah.

IX. PEMBAHASAN

9.1. Pembangunan Wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya

Pendekatan pembangunan wilayah pada Kabupaten Dati II Tasikmalaya dilaksanakan dengan menyusun perencanaan pembangunan di dasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah. Karena itu disusun satuan-satuan perencanaan yang di kenal dengan Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya terbagi ke dalam enam Sub Wilayah Pembangunan.

Perencanaan pembangunan wilayah disusun berdasarkan konsep Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan. Berkaitan dengan hal itu, kota kecamatan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kecil pedesaan dengan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi untuk menunjang pertumbuhan wilayah.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Dati II Tasikmalaya mempunyai ketersediaan sumberdaya yang berbeda-beda, baik dalam jenis maupun kuantitasnya. Dihubungkan dengan perumusan masalah dan hipotesis pertama penelitian, dengan menggunakan *korelasi rank Spearman* hipotesis pertama dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi jenjang Spearmannya (R_s) sebesar 0.879 lebih besar jika dibandingkan nilai kritis pada tingkat kepercayaan 99 persen yaitu 0.509. Diterimanya hipotesis pertama ini maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumberdaya suatu wilayah berpengaruh pada ketersediaan fasilitas sosial ekonomi baik dalam jumlah maupun jenis.

Berdasarkan analisis hirarkhi potensi sumberdaya wilayah di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, 14 kecamatan (51.85 persen) kecamatan tergolong ke dalam wilayah

kaya, enam kecamatan (22.22 persen) tergolong ke dalam wilayah sedang dan tujuh kecamatan (25.92 persen) tergolong wilayah miskin. Bila diamati berdasarkan letak geografis, kecamatan yang tergolong wilayah kaya mayoritas terletak di Tasikmalaya Utara yaitu berturut-turut kecamatan-kecamatan Cibeureum, Singaparna, Kawalu, Leuwisari, Indihiang, Cisayong, Ciawi, Pagerageung, Salawu, dan Kecamatan Manonjaya sedangkan yang terletak di Tasikmalaya Selatan berturut-turut adalah kecamatan-kecamatan Karangnunggal, Cibalong, Bantarkalong dan Salopa. Sebaliknya terjadi pada kecamatan kategori wilayah miskin, mayoritas terletak di Tasikmalaya Selatan yaitu kecamatan-kecamatan Pancatengah, Bojongsambir, Taraju, Sukaraja, dan Tanjungjaya sedangkan dua lainnya yaitu Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Jamanis berada di wilayah Tasikmalaya Utara.

Di Kabupaten Dati II Tasikmalaya berdasarkan analisis hirarkhi fasilitas sosial ekonomi, terjadi ketimpangan penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Ketimpangan ini searah dengan ketimpangan dalam hal ketersediaan sumberdaya. Jika dihubungkan dengan hasil pengujian hipotesis pertama, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya masih belum merata dan terfokus pada daerah-daerah yang berpotensi.

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi maka dalam kebijaksanaan tata ruang daerahnya Kabupaten Dati II Tasikmalaya membagi daerahnya ke dalam enam SWP yang bertujuan pemeratakan pembangunan yang serasi dalam suatu SWP dan antar SWP, agar perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah dapat diperkecil dan mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah kurang berkembang oleh kegiatan pembangunan.

Mengacu pada konsep Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil Pedesaan (Hanafiah, 1988), maka kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Dati II Tasikmalaya harus dibangun sesuai dengan potensi yang ada. Kedudukan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi berfungsi menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat setempat. disamping itu kota kecamatan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan diharapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian desa-desa sekitarnya. Dengan demikian kota kecamatan menduduki posisi yang strategis dalam upaya pembangunan pedesaan dan upaya pemerataan pembangunan.

Walaupun semua kecamatan perlu dibangun namun karena strategi pembangunan wilayah yang dipilih adalah strategi kutub dan pusat pertumbuhan, maka sebagai konsekuensinya, beberapa kecamatan yang terpilih sebagai pusat harus diberi perhatian lebih mengingat fungsinya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

9.2. Fasilitas Pemasaran pada Kota Kecamatan

Fasilitas pasar merupakan salah satu fasilitas ekonomi masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan wilayah. Pasar merupakan fasilitas sentral dalam memasarkan produk dan memperoleh kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sarana produksi berupa bahan baku dan peralatan. Dengan demikian pasar merupakan urat nadi perekonomian wilayah

Secara umum pasar tercipta karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pedagang dan penduduk untuk mempertemukan permintaan dan penawaran pada suatu lokasi. Lokasi yang dipilih tentunya mempertimbangkan nilai strategis dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Besarnya aktifitas pasar memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi dan tingkat produksi. Semakin maju aktifitas

ekonomi pada suatu lokasi, maka aktifitas pasar pada lokasi itu akan lebih majemuk. Dengan menggunakan analisis skalogram kecamatan serta analisis pasar terlihat bahwa desa-desa lokasi pasar berada mempunyai hirarkhi yang tinggi dalam struktur tata ruang kecamatan.

Berdasarkan konsep PPPKP, pasar adalah salah satu fasilitas yang sangat diperlukan bagi suatu Pusat Pertumbuhan, yaitu kota kecamatan. Adanya pasar di suatu lokasi menyebabkan timbulnya kegiatan-kegiatan lain seperti toko, jasa pelayanan seperti praktek dokter, rumah makan, jasa keuangan bahkan jasa-jasa pemerintahan dan kesehatan di pusatkan pada desa tersebut. Keadaan ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Skinner (1965) dalam Setiawan (1995) yaitu perkembangan pasar akan mendorong munculnya pusat-pusat pengembangan.

Kecamatan Indihiang merupakan kecamatan paling maju perekonomiannya. Hubungannya dengan aktifitas pasar ditunjukkan bahwa pasar Indihiang merupakan pasar yang terbesar dilihat dari jumlah kios atau los, status pasar, jumlah pedagang yang ada dan besarnya total retribusi pasar. Kecamatan Sukaraja merupakan kecamatan yang kurang berkembang yang hanya memiliki satu pasar desa yang berlangsung dua kali seminggu, aktifitas pasar yang berlangsung lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cineam. Sedangkan pasar di Kecamatan Cineam merupakan pasar yang berpotensi untuk berkembang walaupun berstatus pasar desa, pasar ini merupakan pusat kegiatan perekonomian di Kecamatan Cineam.

Pasar Indihiang dan pasar Cineam merupakan bentuk pasar tetap karena pasar-pasar tersebut relatif besar ukurannya, lokasinya tetap dan transaksi yang terjadi setiap hari. Letak pasar juga merupakan persimpangan sistem transportasi

dan memiliki aksesibilitas yang baik. Sedangkan pasar Sukaraja merupakan pasar periodik yang hanya ada 1-2 kali perminggu, relatif kecil dan komoditi yang diperjualbelikan juga terbatas.

Kegiatan pasar yang terjadi di ketiga kecamatan tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Anderson (1980) terhadap pasar pedesaan di Jawa Barat dengan studi kasus daerah Majalengka, Indramayu, dan Garut. Administrasi dan pengawasan untuk pasar-pasar besar dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sedangkan pasar yang lebih kecil diserahkan pada pemerintahan desa. Kondisi pasar pada saat ini lebih berfungsi sebagai pembeli daripada penjual, hal ini bisa dilihat dari prosentase penjualan produk lokal yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Terakhir, tidak terdapat monopoli dalam jaringan pasar yang ada dimana pedagang bebas membeli dari daerah manapun dan menjualnya kembali di pasar, tidak seperti yang dikatakan Dewey (1962) dalam Anderson (1980) dimana barang-barang yang akan di jual dikumpulkan pada satu tempat tertentu (*bulking*) dan didistribusikan kembali kepada pedagang-pedagang dengan sistem satu penyaluran (monopoli).

Aktifitas pasar yang besar akan mendorong perekonomian pusat pertumbuhan dan juga wilayah belakangnya dalam bentuk pemasaran hasil produksi pertanian. Penyediaan fasilitas pemasaran ini selayaknya mendapat perhatian yang besar dari pihak yang terkait dengan pembangunan wilayah.

Demikian pembahasan yang dikemukakan berkaitan dengan fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan dimana fungsi kota kecamatan tersebut ditekankan pada penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi bagi terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kegiatan perekonomian di wilayah yang bersangkutan.

X. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

- a). Dilihat dari struktur tata ruang wilayah, masih terjadi ketimpangan dalam pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Dati II Tasikmalaya, baik dalam hal pemanfaatan potensi sumberdaya ataupun ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Pelaksanaan pembangunan masih terfokus pada daerah-daerah yang berpotensi, yang umumnya terletak di wilayah Tasikmalaya Utara.
- b). Kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil pedesaan menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penduduk di desa-desa sekitarnya. Fasilitas pelayanan yang lengkap akan mendorong konsentrasi pemukiman penduduk di sekitar pusat kota, sehingga akan terbentuk pola pemukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi yang optimal dari pusat pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan akan lebih efektif.
- c). Fungsi kota kecamatan sebagai pusat aktifitas ekonomi dapat dilihat melalui kegiatan pasar yang ada di kecamatan tersebut. Pasar-pasar yang ada masih berfungsi sebagai tempat pemasaran produk dari wilayah lain dan sebagai suatu sarana bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aktifitas pasar yang terjadi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah layanannya.

SARAN

Apabila kota kecamatan dijadikan sebagai pusat pengembangan daerah pedesaan, maka perlu mengurangi jumlah desa yang didukung oleh sebuah kota kecamatan atau mengelompokkan desa-desa dalam koordinasi lurah kepala untuk memudahkan hubungan dan koordinasi antara kota kecamatan dengan wilayah layanannya.

Pembangunan fasilitas pelayanan di suatu wilayah sebaiknya tidak hanya memperhatikan jenis, kuantitas dan kualitas fasilitas tetapi juga harus memperhatikan aksesibilitas wilayah, sarana transportasi yang tersedia, kepadatan penduduk dan lokasi beradanya fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memperluas efek perembesan terhadap wilayah layanannya. Untuk itu pemilihan desa sebagai kota kecamatan juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Pengembangan sektor informal dan pembangunan fasilitas pasar dapat dijadikan alternatif untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Hanafiah, T. 1988b. **Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil dalam Rangka Pengembangan Wilayah.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- _____. 1989. **Aspek Lokasi dalam Analisis Ekonomi Wilayah.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- _____. 1997. **Konsep dan Aplikasi Pengembangan Wilayah Agribisnis.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1994. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 1993-1994.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1996a. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 1993-1995.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1996b. **Sensus Ekonomi Kecamatan Cineam.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1996c. **Sensus Ekonomi Kecamatan Indihiang.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1996d. **Sensus Ekonomi Kecamatan Sukaraja.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Kantor Statistik Tasikmalaya. 1996e. **Tasikmalaya dalam Angka 1995.** Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya. Tasikmalaya.
- Karjoredjo, J.S. 1989. **Peranan Kota Kecamatan dalam Pengembangan Pedesaan Studi Kasus Jawa Tengah.** Disertasi. Fakultas Pascasarjana. UGM. Yogyakarta.
- Karseno. 1990. **Peranan dan Fungsi Pusat-pusat Pelayanan dalam Rangka Pembangunan Wilayah Pedesaan Studi Kasus Wilayah Pasaman Barat Kabupaten DT II Pasaman Propinsi Sumatera Barat.** Tesis. Fakultas Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Maulidian, N. 1993. **Analisis Perkembangan Struktur Tata ruang Wilayah Transmigrasi. Studi Kasus di Proyek Karang Agung Tengah, Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Propinsi Sumatera Selatan.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Nasoetion, W.M. 1995. **struktur Tata ruang Wilayah yang Memusat : Penyebab dan Pengaruhnya pada Daerah Belakang Studi Kasus Kotamadya Tebing Tinggi Sumatera Utara.** Disertasi. Fakultas Pascasarjana. IPB. Bogor.

- Sangkala, M. 1989. **Analisis Tingkat Perkembangan Desa dan Dampak Sektor Pertanian terhadap Pembangunan Wilayah di Daerah Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu Sanrego Kabupaten Dati II Bone.** Disertasi. Fakultas Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Setiawan, B.B. 1995. **Peranan dan Fungsi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah. Studi kasus Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Smith, C.A. 1976. **Regional Analysis Volume I Economic System.** Academic Press. New York.
- Sumedi. 1997. **Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan dalam Pembangunan Wilayah. Studi Kasus di Kabupaten DT II Cilacap, Propinsi DT I Jawa Tengah.** Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Van Dusseldorp, D. B. W. M. 1971. **Planning of Service Centres in Rural Areas of Developing Countries.** International Institute for Land Reclamation and Improvement. Wageningen. Nederland.
- Wanmali, Sudhir. 1983. **Service Provision and Rural Development in India : A Study of Miryalguda Taluka.** International Food Policy Research Institute. India.

LAMPIRAN

Tabel Lampiran 1. Jarak Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dati II Tasikmalaya

TASIKMALAYA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			CIHIDEUNG	CIPEDES	TAWANG	INDIHIANG	KAWALU	CISAYONG	CIAWI	RAJAPOLAH	PAGERAGEUNG	SINGAPARNA	LEUWISARI	CIGALONTANG	SUKARAJA	MANONJAYA	CINEAM	CIBEUREUM	TARAJU	BOJONGGAMBIR	SODONGHILIR	SALAWU	CIKATOMAS	CIKALONG	PANCATENGAH	SALOPA	KARANGNUNGGAL	BANTARKALONG	CIBALONG	CIPATUJAH
1	CIHIDEUNG	2		3	5	6	9	10	22	14	28	19	22	29	19	14	23	7	48	60	50	30	52	82	57	36	53	55	29	75
2	CIPEDES	3	3		5	5	10	11	25	11	25	22	25	32	22	17	26	10	51	63	53	33	55	85	60	39	56	58	32	78
3	TAWANG	3	5	5		8	6	14	28	14	28	19	22	29	19	11	20	4	54	67	56	36	49	79	63	33	50	55	29	75
4	INDIHIANG	4	6	5	8		11	8	20	12	26	21	24	31	21	16	25	9	50	64	52	32	54	84	59	38	55	57	31	77
5	KAWALU	7	9	10	6	11		19	31	33	37	10	73	20	10	19	28	12	53	67	55	35	43	73	48	27	44	46	20	70
6	CISAYONG	12	10	11	14	8	19		12	4	18	29	32	39	29	24	33	17	58	72	60	40	62	92	67	46	63	65	39	85
7	CIAWI	24	22	25	28	20	31	12		8	6	31	34	51	41	36	35	29	70	84	72	52	74	104	79	58	75	77	51	97
8	RAJAPOLAH	16	14	22	14	12	23	4	8		14	41	36	43	33	28	37	21	62	76	64	44	66	96	71	59	67	69	43	89
9	PAGERAGEUNG	30	28	25	28	26	37	18	6	14		47	50	37	47	42	51	35	76	90	78	58	80	110	85	64	81	83	57	103
10	SINGAPARNA	17	19	22	19	21	10	29	31	41	47		3	10	34	29	38	22	29	43	31	11	69	97	72	51	68	70	44	90
11	LEUWISARI	20	22	25	22	24	13	32	34	36	50	3		7	37	32	41	25	32	46	34	14	80	110	75	54	71	73	47	93
12	CIGALONTANG	27	29	32	29	31	20	39	51	43	57	10	7		42	37	46	30	39	53	41	21	73	103	108	57	74	59	50	96
13	SUKARAJA	17	19	22	19	21	10	29	41	33	47	34	37	42		15	35	18	61	75	63	43	33	63	38	17	34	36	10	56
14	MANONJAYA	12	14	17	11	16	19	24	36	28	42	29	32	37	15		9	7	58	72	58	38	60	90	65	44	61	63	37	83
15	CINEAM	21	23	26	20	25	28	33	35	37	51	38	41	46	35	9		16	63	68	65	45	67	97	72	51	68	70	44	92
16	CIBEUREUM	5	7	10	4	9	12	17	29	21	35	22	25	30	18	7	16		47	61	49	29	51	81	56	35	52	54	28	73
17	TARAJU	46	48	51	54	50	53	58	70	62	76	29	32	39	61	58	63	47		14	12	24	108	136	113	76	117	119	69	116
18	BOJONGGAMBIR	60	60	63	67	64	67	72	84	76	90	43	46	53	75	72	68	61	14		26	32	100	130	135	90	107	109	83	129
19	SODONGHILIR	45	50	53	56	52	55	60	72	64	78	31	34	41	63	58	65	49	12	26		20	94	118	99	78	95	97	71	118
20	SALAWU	28	30	33	36	32	35	40	52	44	58	11	14	21	43	38	45	29	24	32	20		68	104	73	58	75	77	51	97
21	CIKATOMAS	50	52	55	49	54	43	62	74	66	80	67	80	73	33	60	67	51	108	100	94	68		30	5	16	48	50	41	85
22	CIKALONG	80	82	85	79	84	73	92	104	96	110	97	110	103	63	90	97	81	136	130	118	104	30		35	21	68	70	44	90
23	PANCATENGAH	55	57	60	63	59	48	67	79	71	85	72	75	108	38	65	72	56	113	135	99	73	5	35		21	47	49	23	69
24	SALOPA	34	36	39	33	38	27	46	58	59	64	51	54	57	17	44	51	35	76	90	78	58	16	46	21		47	49	23	69
25	KARANGNUNGGAL	51	53	56	50	55	44	63	75	67	81	68	71	74	34	61	68	52	117	107	95	75	48	93	68	47		2	24	18
26	BANTARKALONG	53	55	58	55	57	46	65	77	69	83	70	73	59	36	63	70	54	119	109	97	77	50	95	70	49	2		26	21
27	CIBALONG	27	29	32	29	31	20	39	51	43	57	44	47	50	10	37	44	28	69	83	71	51	41	69	44	23	24	26		46
28	CIPATUJAH	73	75	78	75	77	70	85	97	89	103	90	93	96	56	83	92	73	116	129	118	97	85	122	90	69	18	20	46	

Sumber : Bappeda Kabupaten Dati II Tasikmalaya (diolah)

Tabel Lamp

ECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		MESJID	SD	KANTOR DESA	KTD	PASAR	TERMINAL	LOSMEN	STASIUN	TOTAL JENIS PRASARANA	TOTAL UNIT PRASARANA	PERINGKAT	
	1986	1996												
KAWALU	91 774	122 696	210	68	18	2		5	5		27	478	2	
SINGAPARNA	95 766	113 500	241	73	22	3	1	1	1		29	468	3	
CIBEUREUM	89 041	111 916	212	58	23	3		1		1	26	537	1	
INDIHIANG	79 486	97 364	226	60	21	2	1	1	3	2	28	428	4	
LEUWISARI	72 992	91 388	181	48	20	1			1		24	327	11	
SALOPA	70 858	84 359	204	73	19	2					21	372	6	
SALAWU	65 142	78 061	226	57	20	2	2				20	370	7	
CIAWI	66 923	77 592	148	49	17	2	1	1		2	28	312	14	
PAGERAGEUNG	61 940	72 721	147	55	18	3	1	1			26	330	10	
KARANGUNGGAL	59 774	70 705	190	60	14	1	1	2			24	349	8	
CISAYONG	61 946	70 061	146	57	20	2					23	285	16	
MANONJAYA	58 522	68 985	152	51	18	2	2	1		1	29	349	8	
BANTARKALONG	56 283	64 593	183	56	17	2	1	2			24	325	12	
CIGALONTANG	49 992	58 860	148	49	16	1					21	258	18	
CIPATUJAH	45 497	54 612	126	51	14	1	3	1	4		21	266	17	
CIBALONG	48 261	52 120	146	54	14	1	1	1			24	373	5	
SODONGHILIR	48 653	51 369	172	51	12	1	1	1			20	317	13	
CIKALONG	47 446	50 974	163	47	13	1	7	3	1		21	301	15	
CINEAM	39 113	42 307	114	31	14	2	1	3			22	222	20	
SUKARAJA	60 755 *	39 918	85	31	8	1	1	1			24	174	25	
RAJAPOLAH	57 378**	37 250	98	27	8	1	1	1		2	28	181	24	
CIKATOMAS	35 090	36 797	105	33	9	1	3				24	198	22	
PANCATENGAH	31 367	36 233	158	32	11	1	1	2			20	255	19	
TANJUNG JAYA		35 734	117	22	7	1		1			20	186	23	
BOJONGGAMBIR	29 125	33 015	120	40	8	1	1				22	217	21	
TARAJU	26 827	32 281	99	27	8	1	1				18	166	26	
JAMANIS		31 170	63	19	8	1					17	125	27	
JUMLAH	1449951	1896546												

TOTAL JENIS PRASARANA	27	27	27	7	19	18	6	5
-----------------------	----	----	----	---	----	----	---	---

TOTAL UNIT PRASARANA	4180	1279	397	2	31	29	15	8
----------------------	------	------	-----	---	----	----	----	---

PERINGKAT	1	2	3	3	20	23	27	28
-----------	---	---	---	---	----	----	----	----

PENYEBARAN (%)	100	100	100	3	70	67	22	19
----------------	-----	-----	-----	---	----	----	----	----

Keterangan :

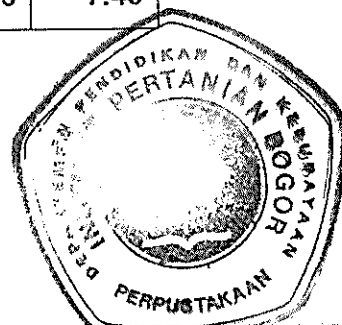
* : termasuk kecamatan Tanjung Jaya

** : termasuk kecamatan Jamanis

Tabel lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Dati II Tasikmalaya Tahun 1994-1995, Menurut Sektor

No	Sektor	1994	1995
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	7.33	7.13
	a. Tanaman bahan makanan	2.41	8.65
	b. Tanaman perkebunan	10.88	2.09
	c. Peternakan dan hasil-hasilnya	17.55	2.30
	d. Kehutanan	9.73	- 11.64
	e. Perikanan	40.35	9.71
2.	Pertambangan dan Penggalian	7.34	- 40.51
	a. Minyak dan gas bumi	-	-
	b. Pertambangan tanpa migas	8.15	- 68.71
	c. Penggalian	7.32	- 39.81
3.	Industri Pengolahan	4.57	4.30
	a. Industri migas	-	-
	b. Industri tanpa migas	4.57	4.30
4.	Listrik, Gas dan Air bersih	5.15	- 0.54
	a. Listrik	4.97	3.95
	b. Gas kota	-	-
	c. Air bersih	5.60	- 11.65
5.	Bangunan dan Konstruksi	8.72	16.80
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.94	7.38
	a. Perdagangan besar dan eceran	4.73	4.90
	b. Hotel	31.29	16.45
	c. Restoran	4.68	13.01
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6.97	14.49
	a. Pengangkutan	5.47	12.54
	b. Komunikasi	22.73	32.18
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9.23	0.77
	a. Bank	20.82	- 13.05
	b. Lembaga Keuangan lainnya	6.65	- 0.96
	c. Sewa Bangunan	5.29	6.00
	d. Jasa Perusahaan	6.67	6.40
9.	Jasa-jasa	2.74	4.33
	a. Pemerintahan Umum	0.98	5.53
	b. Swasta	5.46	2.55
	Produk Domestik Regional Bruto	6.06	7.45

Sumber : Kantor Statistik Tasikmalaya, Tahun 1996a



Tabel Lampiran 4. Analisis Limpitan Sejar Kab. Dati II Tasikmalaya, 1997

NO	KECAMATAN	P O T E N S I	S D A	P E R I N G K A T	P E M B A N G U N A N	P E R I N G K A T	J U M L A H	P E R I N G K A T	D E S K R I P S I
1	CIPATUJAH	166		17	401	21	567	19	Berkembang
2	KARANGNUNGGAL	110		7	358	15	468	14	Berkembang
3	CIKALONG	163		16	379	16	542	16	Berkembang
4	PANCATENGAH	210		21	428	24	638	23	Kurang Berkmb
5	CIKATOMAS	194		20	397	19	591	20	Kurang Berkmb
6	CIBALONG	112		8	272	7	384	8	Maju
7	BANTARKALONG	146		14	288	12	434	13	Berkembang
8	BOJONGGAMBIR	232		25	416	22	648	24	Kurang Berkmb
9	SODONGHILIR	182		18	384	17	566	18	Berkembang
10	TARAJU	214		23	488	27	702	26	Kurang Berkmb
11	SALAWU	118		10	287	11	405	10	Berkembang
12	SUKARAJA	212		22	421	23	633	22	Kurang Berkmb
13	TANJUNGGAYA	221		24	472	25	693	25	Kurang Berkmb
14	SALOPA	140		13	286	10	426	12	Berkembang
15	CINEAM	154		19	337	14	491	15	Berkembang
16	MANONJAYA	121		11	207	5	328	5	Maju
17	CIBEUREUM	88		1	124	1	212	1	Maju
18	KAWALU	95		3	162	3	257	3	Maju
19	SINGAPARNA	95		3	135	2	230	2	Maju
20	CIGALONTANG	150		15	397	19	547	17	Berkembang
21	LEUWISARI	88		1	278	9	366	7	Maju
22	INDIHIANG	101		5	187	4	288	4	Maju
23	CISAYONG	105		6	316	13	421	11	Berkembang
24	RAJAPOLAH	232		25	391	18	623	21	Kurang Berkmb
25	JAMANIS	262		27	480	26	742	27	Kurang Berkmb
26	CIAWI	122		12	276	8	398	9	Berkembang
27	PAGERAGEUNG	112		8	227	6	339	6	Maju

Sumber : Kantor Statistik Kab. Dati II Tasikmalaya, Tahun 1996 (diolah)

Catatan :

Kecamatan Maju adalah kecamatan yang memiliki skor 212 - 389

Kecamatan Berkembang adalah kecamatan yang memiliki skor 390 - 567

Kecamatan Kurang Berkembang adalah kecamatan yang memiliki skor 568 - 745

Lampiran 5. Langkah-langkah Metode Analisis Hirarkhi Potensi Sumberdaya Wilayah








1. Tuliskan nama seluruh kecamatan pada baris tabel.
2. Tuliskan nama setiap sektor yang dipilih pada kolom tabel.
3. Tentukan peringkat setiap kecamatan di setiap sektor, dimana peringkat satu diberikan kepada kecamatan yang memiliki potensi sektor yang bersangkutan dengan jumlah paling banyak dan diurutkan seterusnya.
4. Tentukan nilai akhir setiap kecamatan untuk keseluruhan sektor dengan menjumlahkan semua peringkat sektor yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dengan terlebih dahulu mengalikan peringkat sektor tersebut dengan nilai faktor pembobot apabila menggunakan metode hirarkhi potensi sumberdaya wilayah yang mempertimbangkan relatif pentingnya sektor tersebut dalam perekonomian wilayah.
5. Tentukan peringkat akhir setiap kecamatan, dimana peringkat satu ditempati oleh kecamatan yang memiliki nilai akhir paling kecil dan seterusnya untuk peringkat berikutnya. Penentuan interval skor dilakukan dengan mengurangi nilai akhir paling besar dengan nilai akhir terkecil kemudian dibagi tiga.
7. Tentukan tingkat ketimpangan antar kecamatan dengan menetapkan kategori wilayah sebagai berikut :
 - a. Wilayah kaya, skor akhir 88 - 146 pada analisis tanpa bobot.
 - b. Wilayah sedang, skor akhir 147 - 205 pada analisis tanpa bobot.
 - c. Wilayah miskin, skor akhir 206 - 264 pada analisis tanpa bobot.

Lampiran 6. Langkah-langkah Metode Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi

1. Tuliskan nama seluruh kecamatan pada baris tabel.
2. Tuliskan nama setiap sektor yang dipilih pada kolom tabel.
3. Tentukan peringkat tingkat ketersediaan setiap kecamatan untuk setiap sektor yang dipilih, dimana peringkat satu diberikan kepada kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan paling baik atau memiliki hasil kegiatan pembangunan sektoral yang paling banyak dan diurutkan seterusnya sampai peringkat akhir yang diberikan kepada wilayah yang mempunyai tingkat ketersediaan paling buruk .
4. Tentukan nilai akhir setiap kecamatan untuk keseluruhan sektor dengan menjumlahkan semua peringkat sektor yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan dengan terlebih dahulu mengalikan peringkat sektor tersebut dengan nilai faktor pembobot pada analisis dengan bobot.
5. Tentukan peringkat akhir setiap kecamatan, dimana peringkat satu ditempati oleh kecamatan yang memiliki nilai akhir paling kecil dan seterusnya untuk peringkat berikutnya. Penentuan interval skor dilakukan dengan mengurangi nilai akhir paling besar dengan nilai akhir terkecil kemudian dibagi tiga.
7. Tentukan tingkat ketimpangan antar kecamatan dengan menetapkan kategori wilayah sebagai berikut :
 - a. Wilayah maju, skor akhir 124 - 245 pada analisis tanpa bobot.
 - b. Wilayah sedang, skor akhir 246 - 367 pada analisis tanpa bobot.
 - c. Wilayah terbelakang, skor akhir > 367 pada analisis tanpa bobot.

HENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH
KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA

ADMINISTRASI

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Propinsi
-  Jalan Kabupaten
-  Pusat Kecamatan
-  Pusat Kabupaten Tasikmalaya
-  Sungai

Sumber: Kantor Pemda Kabupaten Dati II
Tasikmalaya

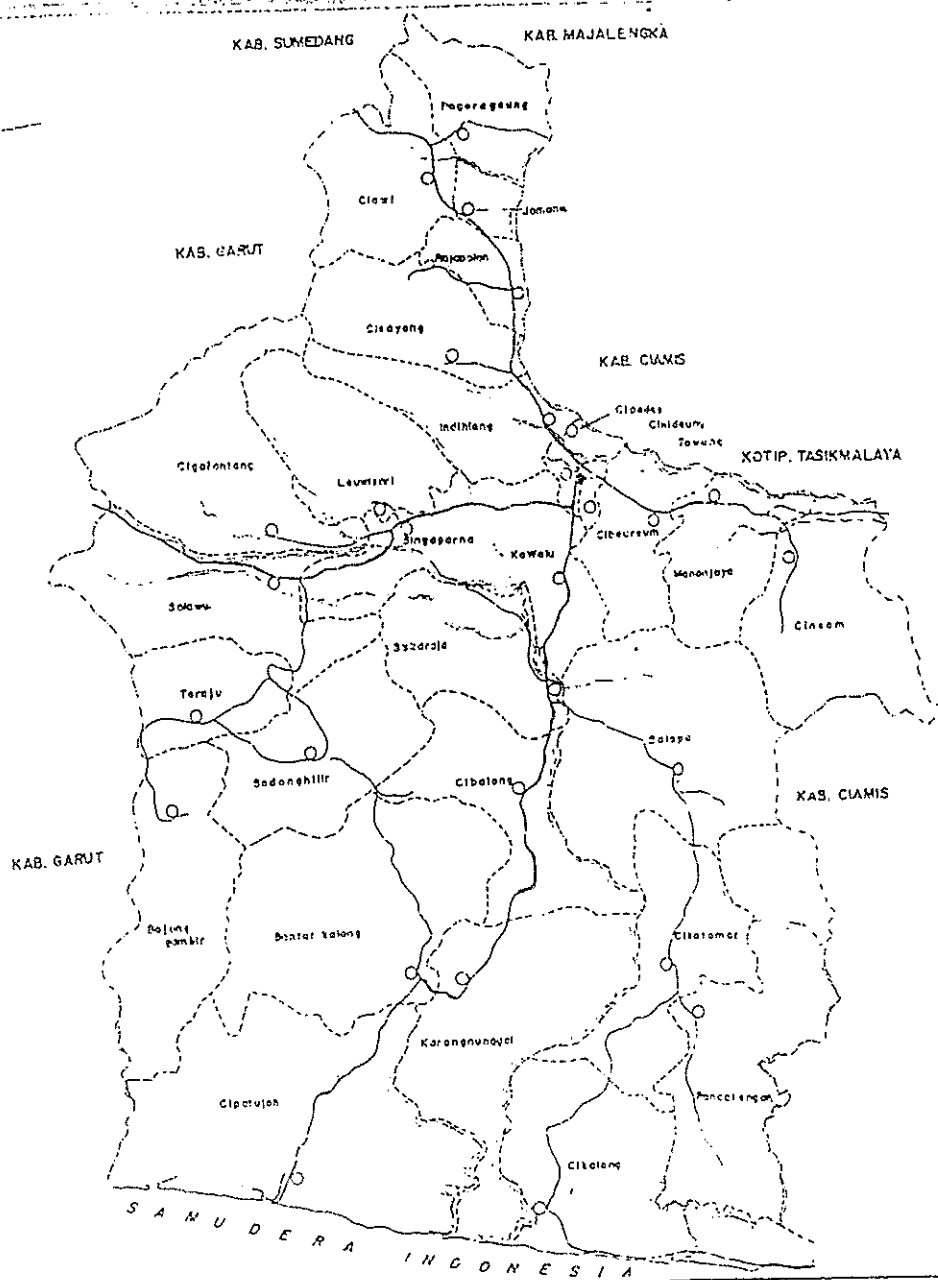


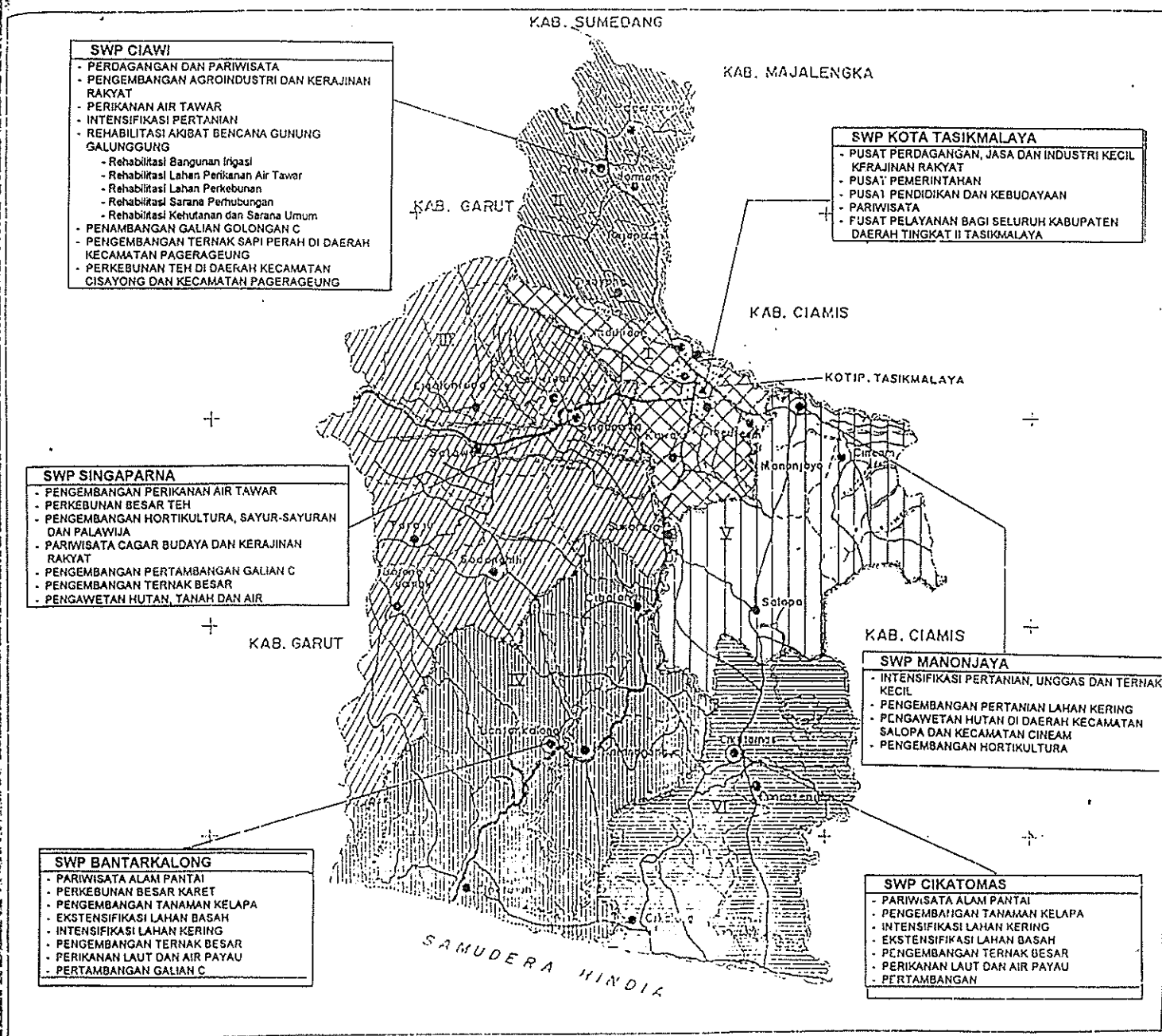
0 3.5 7 10.5 Km
SKALA : 1 : 350.000

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA



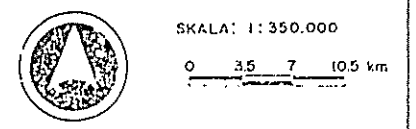


RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

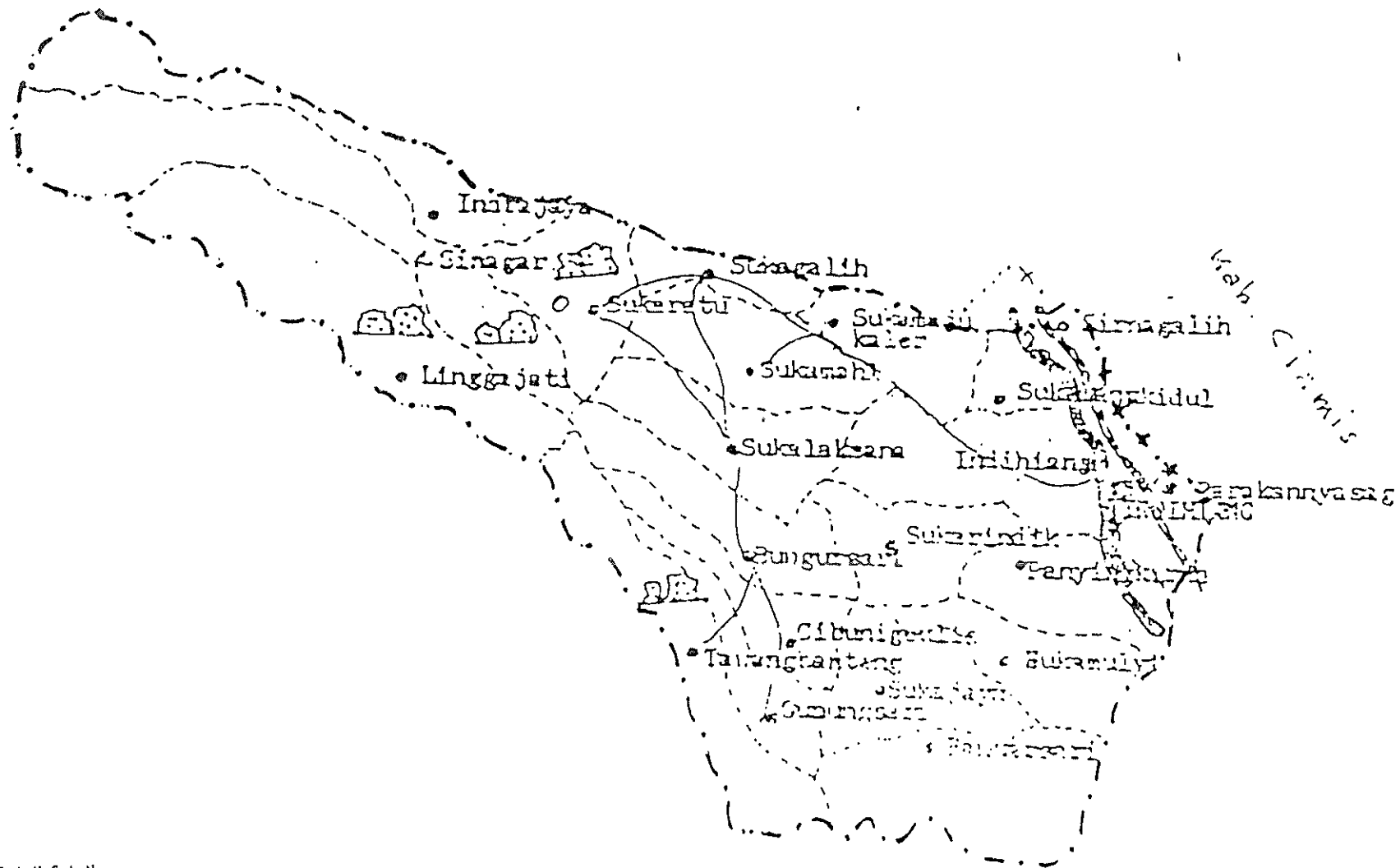
- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten / Pusat SWP
 - Ibukota Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai
 - Pusat SWP
 - Pusat / Simpul
 - Batas Sub Wilayah

Sumber: Hasil Analisis



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA



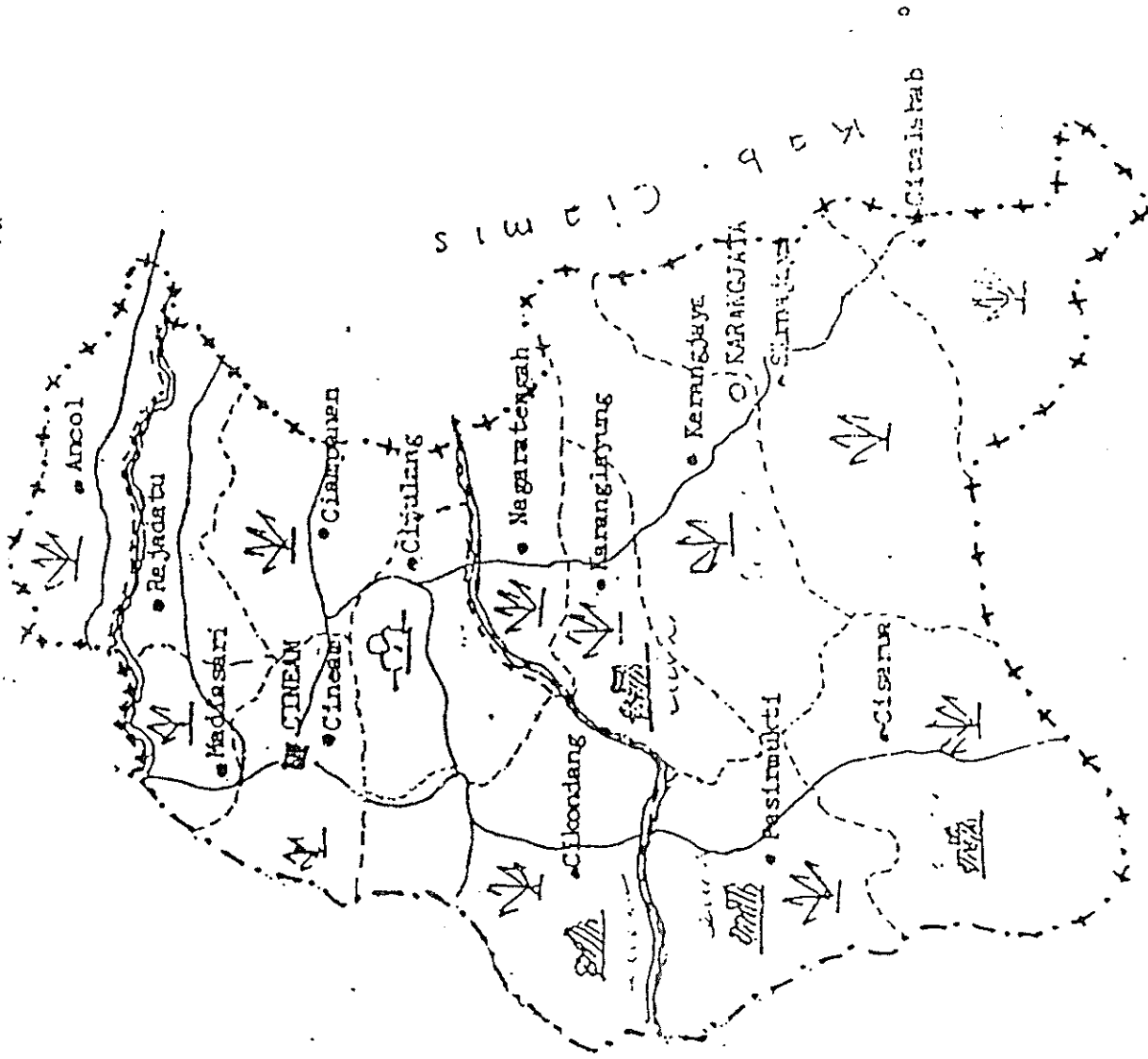
KETERANGAN

- = Batas Kabupaten
- = Batas Kecamatan
- = Eltas Desa
- = Ibu Kota Kecamatan
- = Ibu Kota Desa
- = Jalan Raya Propinsi
- = Jalan
- = Jalan Kereta Api
- = Jalan

KECAMATAN INDIHIANG



KECAMATAN CINEAM



KETERANGAN

+ + + + + Batas Kabupaten

- - - - - Batas Kecamatan

- - - - - Batas Desa

☐ Ibu Kota Kecamatan

● Ibu Kota Desa

— Jalan

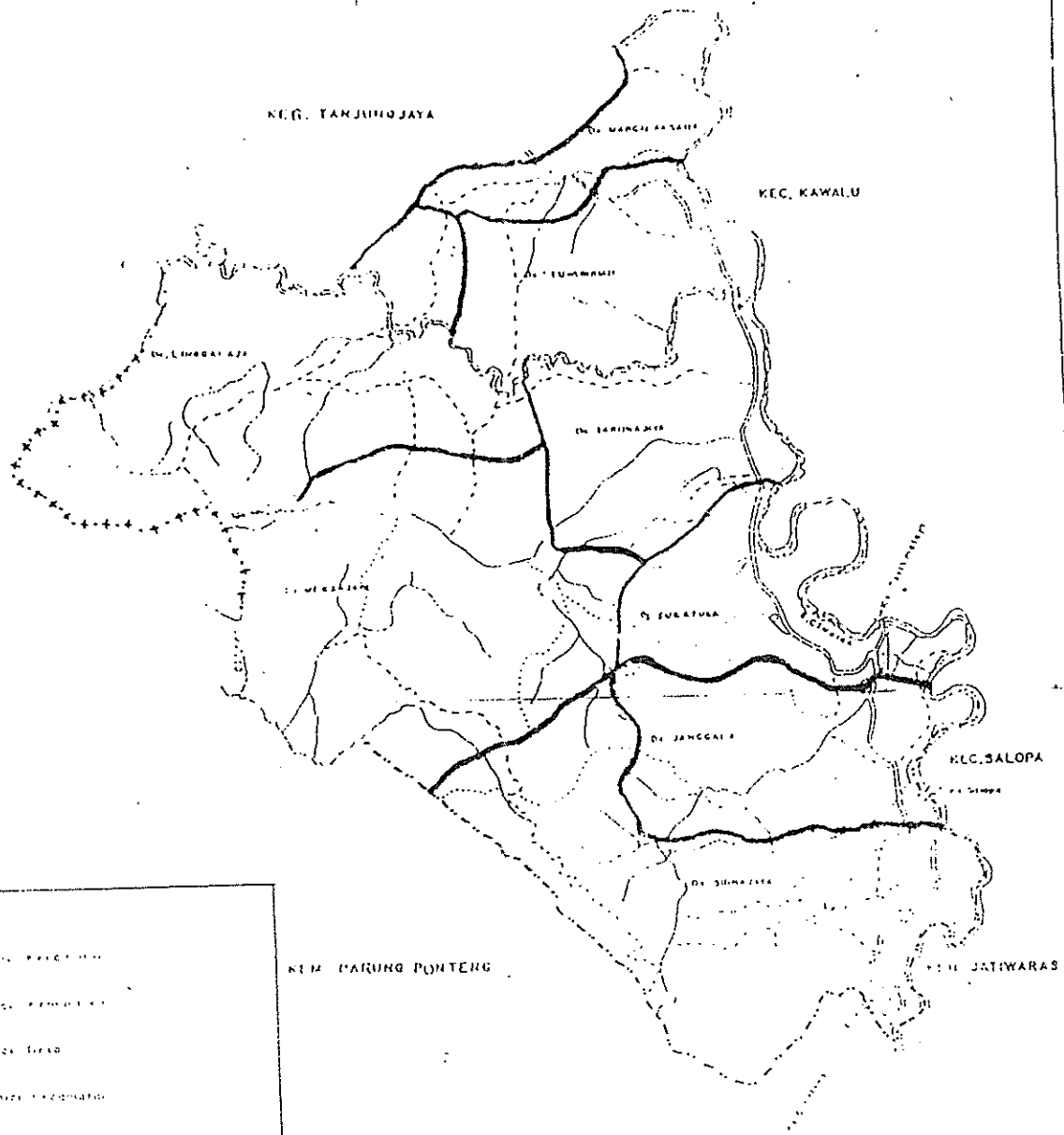
— Jalan Kereta Api

▨ Bahan Tambang Emas










▨ Bahan Tambang Kapur

▨ Desa Penghasil Buah Salak

KECAMATAN SUKARAJA



LEGENDA

-  Batas Kecamatan
-  Batas Kabupaten
-  Batas Desa
-  Kantor Kecamatan
-  Kantor Desa
-  Sungai
-  Jalan Aspal
-  Jalan Tanah
-  Jalan Setapak



SKALA 1 : 50,000

0 0.5 1 1.5 2 KM